# LKjIP 2025

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dapat tersusun. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

LKjIP ini bukan sekedar kewajiban formal, melainkan sebagai bentuk transparansi dan komitmen untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada semua pihak yang terlibat. Dalam landasan prinsip akuntabilitas, laporan ini disajikan dengan tujuan utama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kinerja yang dijanjikan untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi Pimpinan dalam rangka evaluasi kinerja, mencari *room for improvement* sebagai dasar pengambilan keputusan strategis internal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan mendatang yang lebih baik sehingga dapat terus meningkatkan kinerja.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, terutama komitmen dan dedikasi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban yang terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Tuban, Januari 2026
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

**SISWANTO, S.H., M.M.**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Tahun 2025 ini merupakan tahun transisi, dimana indikator dan target kinerja pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, sedangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, perencanaan anggaran, indikator kinerja dan target kinerja disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dalam revisi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dari uraian Misi, tujuan dan sasaran misi berdasarkan RPJMD 20252029, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mendukung pencapaian misi 3, yaitu: mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Dengan tujuan mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dengan indikator kinerja Indeks Harmoni Indonesia (IHaI).

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, tujuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dengan sasaran meningkatnya ketetraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), meningkatnya pelayanan penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran dengan indikator persentase kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* dan sarasan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dengan capaian

Indikator tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU sebesar 87,04 dari target 85 dengan capaian kinerja 102,4% dan realisasi anggaran 89,36% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 13,04%;
2. Persentase kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* sebesar 83,33% dari target 80% dengan capaian kinerja 104,16% dan realisasi anggaran 99,38% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 4,78%;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah sebesar 89,12 dari target yang ditetapkan sebesar 89,31 dengan capaian kinerja 99,79% dan realisasi anggaran sebesar 87,58% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 12,21%.

Efisiensi kinerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 untuk 3 (tiga) indikator sasaran cukup baik. Efisiensi kinerja anggaran tersebut didukung oleh pola perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kerja sama dan komitmen aparatur yang bertanggung jawab. Namun demikian, untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah, meskipun nilainya naik tapi belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perubahan strategi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan pada tahun mendatang.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... ii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR TABEL ..... vi
DAFTAR GAMBAR ..... vii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tugas Dan Fungsi Organisasi ..... 2
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama ..... 14
1.4 Landasan Hukum ..... 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 24
2.1 Rencana Strategis ..... 24
2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026 ..... 25
2.1.2 Renstra 2025-2029 ..... 28
**2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025** ..... 33
**2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)** ..... 33
**2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025** ..... 34
**2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025** ..... 35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 37
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 37
3.1.1 Capaian Atas Kreview / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... 44
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ..... 57
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra) ..... 59
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Organisasi Lain Yang Setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja) ..... 60
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan ..... 65
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 72
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja ..... 80
3.2 Realisasi Anggaran ..... 82
BAB IV PENUTUP ..... 86
4.1. Kesimpulan ..... 86
4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut ..... 89

LAMPIRAN ..... 91

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Jumlah SDM Berddasarkan Golongan ..... 12
Tabel 1.2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 12
Tabel 1.2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana ..... 13
Tabel 1.3 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban ..... 15
Tabel 2.1.1.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 27
Tabel 2.1.1.2 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 28
Tabel 2.1.2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran..... 31
Tabel 2.1.2.2 Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis ..... 32
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan Awal/sebelum Perubahan) ..... 38
Tabel 3.1.1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024 ..... 44
Tabel 3.1.2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya ..... 57
Tabel 3.1.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah ..... 59
Tabel 3.1.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah..... 61
Tabel 3.1.4.2 Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Satpol PP dan Damkar Tuban ..... 64
Tabel 3.1.4.3 Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur ..... 64
Tabel 3.1.6.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 72
Tabel 3.1.7.1 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja ..... 81
Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran ..... 82

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....4
Gambar 2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 .....29
Gambar 2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 .....30
Gambar 2.1.2.3 Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 .....30
Gambar 2.1.2.4 Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 .....30
Gambar 3.1.2.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....59

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sekaligus sebagai upaya mewujudkan organisasi perangkat daerah yang akuntabel, menjadikan pemerintah yang bersih (*clean government*) menuju ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

## 1.2 Tugas Dan Fungsi Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tipe perangkat daerah tipe A.

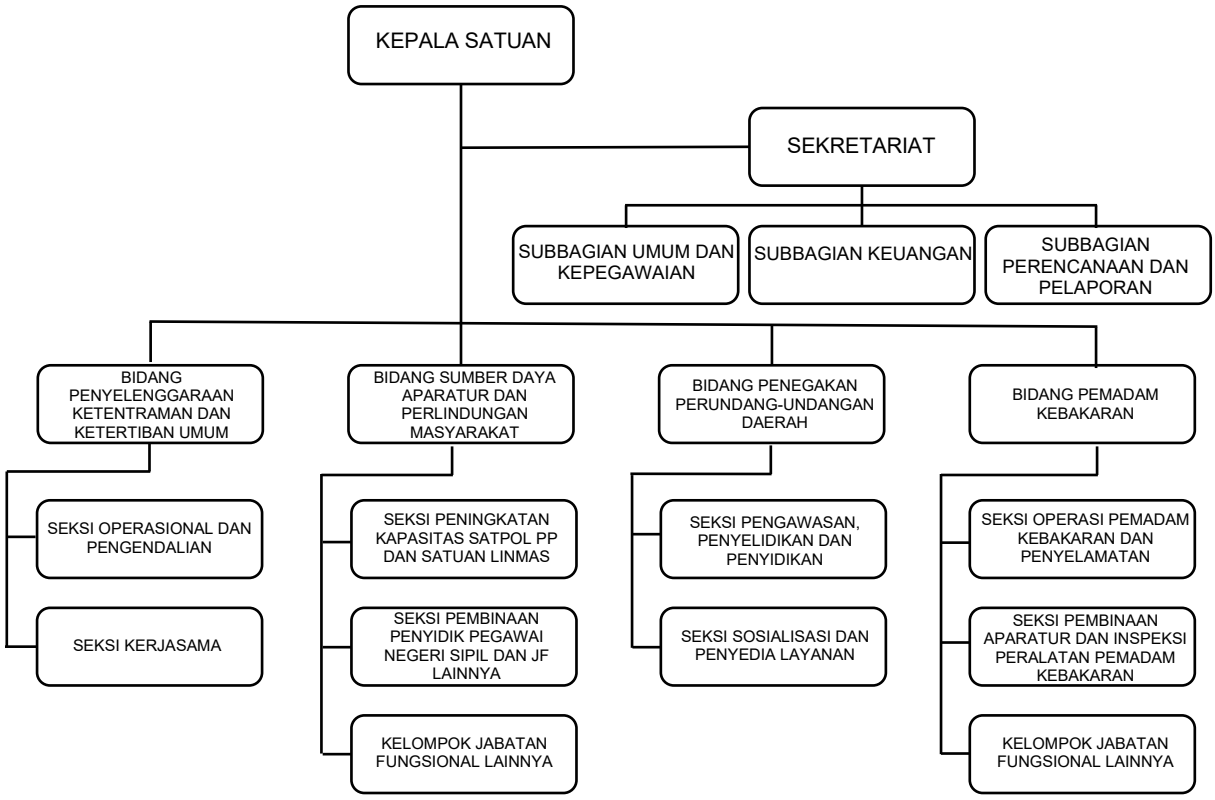
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban terdiri atas:

1. Kepala Satuan :
2. Sekretariat :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
    1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    2) Seksi Kerja Sama.
4. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat :
    1) Seksi Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
    2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Lainnya.
    3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :
    1) Seksi Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan;
    2) Seksi Sosialisasi dan Penyediaan Layanan.
6. Bidang Pemadam Kebakaran :
    1) Seksi Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
    2) Seksi Pembinaan Aparatur dan Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran;
    3) Kelompok Jabatan Fungsional.

# STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN

**SUSUNAN ORGANISASI**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**KABUPATEN TUBAN**




**Gambar 1.2.1**
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 tahun 2022 Tentang Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerinatahan Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dibantu oleh :

1. Sekretariat;
   1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
   2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan;
   3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
      a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
      b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
      c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
      d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
      e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
      f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
      g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
      h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
      i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
      j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
      k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
      l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

1) Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2) Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian;
   d. pelaksanaan kerja sama;
   e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
   g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
   1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
d. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Lainnya;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah

1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
c. pelaksanaan pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan;
d. pelaksanaan sosialisasi dan penyediaan layanan;
e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah;
f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pemadam Kebakaran

1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pemadam

kebakaran.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pemadam kebakaran sedini mungkin dengan mengutamakan penyelamatan jiwa sesuai Standar Operasional Prosedur yang ada;
i. penyiapan dan penyediaan bahan pengendalian sistem dan metode penanggulangan kebakaran bagi gedung-gedung tinggi dan rumah yang tidak memiliki akses jalan masuk;
j. penyiapan dan penyediaan bahan penyelamatan kepada masyarakat dan lingkungan;
k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
   1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil/ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya.
   2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
   3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
   4) Kelompok Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban pada tahun 2025 sebanyak 207 Orang, yang terdiri dari:

**Tabel 1.2.1** Jumlah SDM Berddasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Golongan I | 0 |
| 2 | Golongan II | 14 |
| 3 | Golongan III | 31 |
| 4 | Golongan IV | 10 |
| 5 | Golongan V (PPPK) | 55 |
| 6 | Tenaga Non-ASN | 97 |
| | **Jumlah** | **207** |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

**Tabel 1.2.2** Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SD | 1 orang |
| 2 | SMP Sederajat | 1 orang |
| 3 | SMA Sederajat | 131 orang |
| 4 | D3 | 3 orang |
| 5 | D4 | 1 orang |
| 6 | S1 | 62 orang |
| 7 | S2 | 8 orang |
| | **Jumlah** | 207 orang |

Secara kuantitatif, jumlah personel tersebut telah mendukung pelaksanaan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, khususnya dalam kegiatan lapangan yang bersifat teknis dan operasional. Namun secara kualitatif, terdapat tantangan dalam pemenuhan standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan pelayanan publik di bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Rendahnya proporsi pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi atau keahlian teknis khusus, serta dominasi tenaga non-ASN, menunjukkan perlunya strategi peningkatan kapasitas SDM secara sistematis. Kebutuhan akan aparatur dengan kemampuan manajerial, kepemimpinan lapangan, komunikasi publik, dan koordinasi lintas

sektor menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatnya potensi bencana.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2.3** Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak | |
| 1 | Kendaraan Roda 2 | 34 unit | - | 34 unit |
| 2 | Kendaraan Roda 3 | 2 Unit | - | 2 Unit |
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 8 Unit | - | 8 Unit |
| 4 | Kendaraan Roda 6 | 10 Unit | - | 10 Unit |
| 5 | Gergaji | - | 2 unit | 2 Unit |
| 6 | GLOBAL Positioning System | | 1 Unit | 1 Unit |
| 7 | Filing Besi/Metal | 4 Buah | - | 4 Buah |
| 9 | Papan Visuil | 57 Buah | - | 57 Buah |
| 10 | Papan Nama Instansi | 3 Buah | - | 3 Buah |
| 11 | White Board | 3 Buah | - | 3 Buah |
| 12 | Mesin Absensi | 4 Unit | - | 4 Unit |
| 13 | Alat Kantor Lainnya | 2 Buah | - | 2 Buah |
| 14 | Lemari Kayu | 13 Buah | - | 13 Buah |
| 15 | Rak Kayu | 12 Buah | - | 12 Buah |
| 16 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 17 Buah | - | 17 Buah |
| 17 | Meja Rapat | 14 Buah | - | 14 Buah |
| 19 | Meja Komputer | 7 Buah | - | 7 Buah |
| 20 | Tenda | | 1 Unit | 1 Unit |
| 21 | Sofa | 2 Unit | - | 2 Unit |
| 22 | Lemari Es | 1 Buah | - | 1 Buah |
| 23 | AC | 16 Buah | - | 16 Buah |
| 24 | Kipas Angin | 3 Buah | - | 3 Buah |
| 25 | Wireless | 1 Unit | - | 1 Unit |
| 26 | Megaphone | 5 Unit | - | 5 Unit |
| 27 | Camera Vidio | 1 Buah | - | 1 Buah |
| 28 | Tustel | 1 Buah | - | 1 Buah |
| 29 | Lambang Garuda Pancasila | | 1 Buah | 1 Buah |
| 30 | Tangga Alumunium | 1 Unit | - | 1 Unit |
| 31 | Lambang Instansi | 1 Buah | - | 1 Buah |
| 32 | Handy Cam | | 1 Buah | 1 Buah |
| 33 | Alat Rumah Tangga | 5 Buah | - | 5 Buah |
| 34 | Alat Pembantu Pemadam Kebakaran | 9 Unit | - | 9 Unit |
| 35 | PC Unit | 17 Unit | - | 17 Unit |
| 36 | Laptop | 13 Unit | - | 13 Unit |
| 37 | Notebook | 6 Unit | - | 6 Unit |
| 38 | Line Printer | | 5 Unit | 5 Unit |
| 39 | Hard Disk | | 2 Unit | 2 Unit |
| 40 | Peralatan Komputer Mainframe | 3 Unit | - | 3 Unit |
| 41 | Printer | 22 Unit | - | 22 Unit |

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak | |
| 42 | Peralatan Personal Komputer (UPS) | 7 Unit | - | 7 Unit |
| 43 | Meja Rapat Pejabat | 1 Buah | - | 1 Buah |
| 44 | Unit Power Supply | 1 Unit | - | 1 Unit |
| 45 | Handy Talky | 44 Buah | | 44 Buah |
| 46 | Faxsimile | - | 1 unit | 1 Unit |
| 47 | Pesawat Telephone | 3 Unit | - | 3 Unit |
| 49 | Gerinda | 6 Buah | - | 6 Buah |
| 50 | Tandu | 5 Buah | - | 5 Buah |
| 51 | Bomber Senter *Rescue* | 8 Buah | - | 8 Buah |
| 52 | Tripod | 2 Buah | - | 2 Buah |
| 53 | Sound System | 2 Buah | - | 2 Buah |

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berada dalam kondisi layak guna, namun ada beberapa dalam kondisi rusak, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi.

## 1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban diarahkan untuk memaksimalkan kinerja Satuan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta meningkatnya koordinasi dan penanggulangan darurat kebakaran secara cepat dan tepat.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting

untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan pelayanan dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 1.3.1** Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Masih tingginya gangguan ketertiban umum dan ketentraman maysarakat | 1. Kurangnya patroli pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;<br>2. Kurangnya pengamanan aset vital tertentu daerah;<br>3. Kurangnya pengamanan kegiatan Pemkab dan sosial kemsyarakatan;<br>4. Kurangnya kegiatan penertiban dan operasi pengendalian secara terpadu terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;<br>5. Kurangnya kegiatan pengendalian unjuk rasa/demonstrasi;<br>6. Kurangnya kegiatan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antar kecamatan Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar perangkat daerah;<br>7. Kompetensi SDM yang masih belum maksimal dan |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | memenuhi kebutuhan lapangan. |
| | | Kurang optimalnya penegakan Perda dan perkada | 1. Kurangnya sosialisasi terkait penegakan Perda dan perkada kepada masyarakat;<br>2. Kurangnya kerjasama antar perangkat daerah terkait data pelanggaran perda/perkada;<br>3. Kurangnya pengawasan bersama terkait perijinan berusaha;<br>8. Masih belum optimalnya tindak lanjut atas pengawasan pelanggaran Perda dan Perkada melalui tindakan Yustisia dan Non Yustisia |
| | | Kurang Optimalnya Peran Satlinmas | Kurangnya kapasitas/ Kompetensi Satlinmas dan kurangnya pemberdayaan Satlinmas |
| 2 | Penanganan Kasus kejadian kebakaran yang belum memenuhi *response time* | Belum optimalnya pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan | 1. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan darurat kebakaran yang sesuai standar;<br>2. Kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;<br>3. Belum optimalnya pemberdayaan relawan kebakaran |

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian dan penanganan terpadu.

Meskipun peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran semakin strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat, namun tingginya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan ini bersumber dari sejumlah akar persoalan, antara lain: belum efektiknya patroli pencegahan yang bersifat rutin dan menyeluruh, belum maksimalnya pengamanan terhadap aset vital daerah, serta kurangnya dukungan pengamanan terhadap kegiatan Pemerintah Kabupaten maupun aktivitas sosial masyarakat. Kegiatan penertiban dan pengendalian secara terpadu, termasuk pengendalian unjuk rasa dan demonstrasi, belum dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, belum meratanya penanganan gangguan di lintas kecamatan, minimnya koordinasi antar perangkat daerah, serta kompetensi SDM yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional di lapangan turut memperparah situasi.

Dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, implementasinya masih belum berbasis pada pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi terhadap penegakan Perda dan Perkada masih belum berdampak efektif pada tingkat kepatuhan masyarakat. Koordinasi lintas perangkat daerah terkait data pelanggaran dan pengawasan perizinan usaha juga belum optimal. Di sisi lain, tindak lanjut atas pelanggaran Perda dan Perkada, baik melalui jalur yustisia maupun non-yustisia, belum berjalan efektif sehingga efek jera belum terbentuk secara kuat.

Fungsi strategis Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pun masih belum optimal. Permasalahan utamanya adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi Satlinmas serta minimnya kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan, yang menyebabkan potensi mereka sebagai mitra keamanan masyarakat belum tergali secara maksimal.

Sementara itu, pada aspek pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, tantangan utama terletak pada belum terpenuhinya *response time* ideal dalam penanganan kejadian kebakaran. Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada dan peralatan yang sesuai standar, khususnya di wilayah kecamatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat menyebabkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi insiden kebakaran masih rendah. Akibatnya, upaya penanganan tidak hanya terbatas pada aspek teknis Damkar, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan dasar menghadapi keadaan darurat.

Dengan demikian, permasalahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran di Kabupaten Tuban tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengadaan sarana-prasarana yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pelayanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan publik.

Dari uraian diatas, isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban disajikan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Satlinmas**

   Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tuban menjadi urgensi strategis dalam memperkuat peran aparat penegak peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi teknis, fasilitas operasional, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Melalui program pelatihan terpadu, peningkatan sarana prasarana, dan penguatan sistem manajemen kinerja, diharapkan Satlinmas mampu lebih responsif terhadap potensi gangguan ketertiban umum, Satpol PP lebih efektif menegakkan regulasi daerah, dan Damkar lebih sigap dalam penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan lainnya. Upaya ini bukan hanya bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta memperkuat sinergi

antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tanggap darurat.

2. **Optimalisasi penegakan Perda dan Perkada**

Optimalisasi penegakan Perda dan Perkada menjadi perhatian utama. Tantangan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas personel, tetapi juga oleh minimnya dukungan teknologi informasi dan lemahnya pengawasan internal. Dalam era disrupsi teknologi informasi dan komunikasi, Satpol PP dituntut untuk mampu melakukan transformasi digital dalam sistem pengawasan dan pelaporan penegakan hukum daerah, guna menjaga kewibawaan regulasi dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. **Ketertiban Ruang Publik**

Ketertiban ruang publik menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat top-down belum cukup efektif dalam membangun kesadaran hukum dan budaya tertib di tingkat akar rumput. Kurangnya pelibatan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan Linmas dan forum kewaspadaan dini, berdampak pada lemahnya kesiapsiagaan sosial dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan ketertiban umum.

4. **Potensi Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Di Kabupaten Tuban, kawasan padat penduduk berisiko mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik akibat gangguan terhadap aktivitas ekonomi maupun lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kewajiban perizinan, pajak dan retribusi. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah terkait ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terutama di sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap PAD.

5. ***Response time*** **Penanganan Kebakaran**,

rutama di kawasan padat penduduk dan wilayah rawan bencana, memperkuat urgensi penguatan sistem mitigasi dan tanggap darurat. Keterbatasan sarana-prasarana damkar, minimnya

pelatihan petugas, serta belum optimalnya integrasi perencanaan kebencanaan dalam dokumen daerah menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam hal kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

## 1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026 (Berita Daaerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 seri E Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Berita Daaerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 seri E Nomor 108).

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan instansi pemerintah memerlukan integrasi antara potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/kendala yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan tujuan serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategi yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Perencanaan strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Sehingga perencanaan program kegiatan serta penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Tuban berdasarkan pada Rencana Strategis 2021 – 2026 pada tahapan awal dan menyesuaikan dengan

penetapan indikator kinerja baru berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026

Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan arah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan karena akan menjadi Visi, Misi dari Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Visi, Misi ini perlu dikritisi guna menunjang dan mendukung Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah ”Membangun serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan” dengan Misi sebagai berikut:

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun;
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.

Kalau ditinjau dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi ke-1

yaitu membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berupaya menciptakan tata kehidupan yang harmonis, tertib, dan tentram sehingga akan membantu dalam mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan sebagaimana visi dari Pemerintah Kabupaten Tuban.

Misi ke-1 dari Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI);
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Hidup (IKLH);
3. Berkurangnya resiko bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana (IRB);
4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis dengan indikator Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup.

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah masih tingginya pelanggaran perundang-undangan daerah serta masih kurangnya jangkauan pelayanan dan penanggulangan darurat kebakaran. Berdasarkan isu strategis tersebut serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dalam

mendukung tercapainya Misi 1, dengan sasaran Misi pada poin ke-3 dan ke-4.

**Tabel 2.1.1.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Tahun 2021 | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Tujuan: Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Indeks Toleransi/ Kerukunan hidup | Indeks | 88,88 | 89,5 | 90,26 | 91,03 | 91,81 | 92,59 |
| 2 | Sasaran: Tingkat Penurunan Kasus Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah | Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah | % | - 83.67% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Tujuan: Berkurangnya resiko bencana | Indeks resiko bencana | Indeks | 145.52 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
| 4 | Sasaran: Menurunnya resiko bencana akibat kebakaran | Persentase Penurunan Tingkat Kasus/ Kebakaran | % | n/a | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Polisi Pamong Praa dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban serta tujuan dan sasaran jangka menengah di atas, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.1.2** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (Satuan) | Formulasi Perhitungan | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah | Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang–Undangan Daerah (%) | (Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun ke-n-1 dikurangi Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang- undangan Daerah Tahun ke-n/ Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun Ke-n-1) x 100% | 3% |
| 2 | Menurunnya Resiko Bencana Akibat Kebakaran | Persentase Penurunan Tingkat Kasus/ Kejadian Kebakaran (%) | (Jumlah kasus/kejadian kebakaran Tahun ke-n-1 dikurangi Jumlah kasus/kejadian kebakaran tahun ke- n/ Jumlah kasus/kejadian kebakaran Tahun Ke-n- 1) x 100% | 5% |

### 2.1.2 Renstra 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, ditetapkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban tahun 2025- 2029 adalah: ***"Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan".***

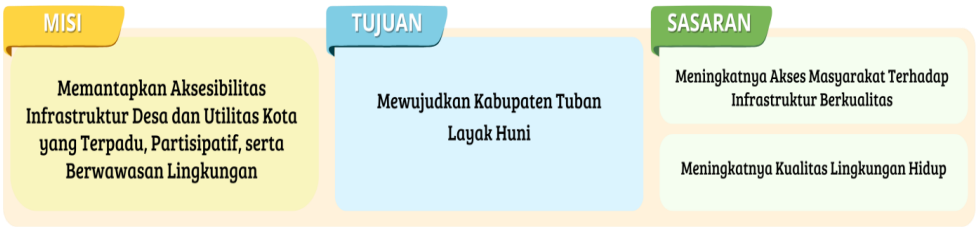
Dalam rangka mengimplementasikan visi pembangunan

Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 secara nyata dan terarah, diperlukan langkah- langkah strategis yang dituangkan ke dalam bentuk misi pembangunan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun mendatang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap rumusan misi Kepala Daerah yang ditetapkan perlu dijabarkan secara lebih operasional ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai tahapan strategis yang memberikan arah pencapaian misi secara sistematis dan terukur selama periode perencanaan lima tahunan. Sehingga setiap misi yang telah dirumuskan akan memiliki serangkaian tujuan sebagai capaian antara serta sasaran sebagai indikator spesifik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan. Misi Pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 beserta penjabaran tujuan dan sasaran misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

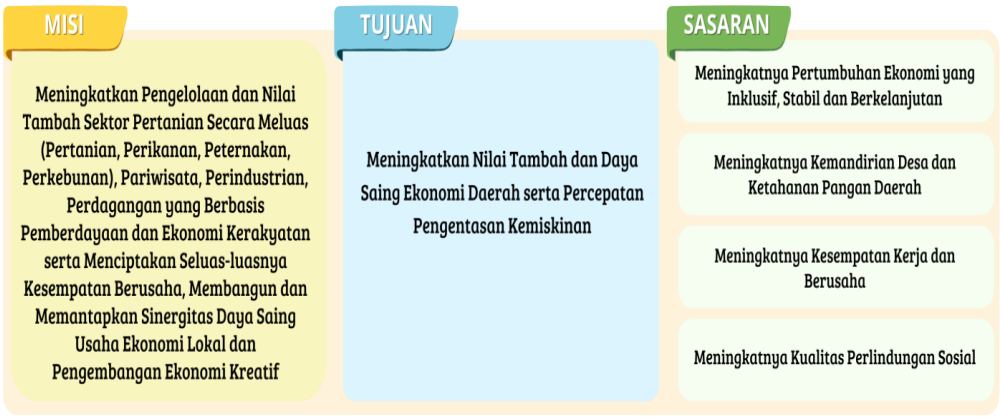
1. Misi 1 dijabarkan kedalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan pada misi ini adalah mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak huni yang didukung infrastruktur terpadu dan berkelanjutan berbasis kewilayahan.

**Gambar 2.1.2.1** Tujuan dan Sasaran pada Misi 1



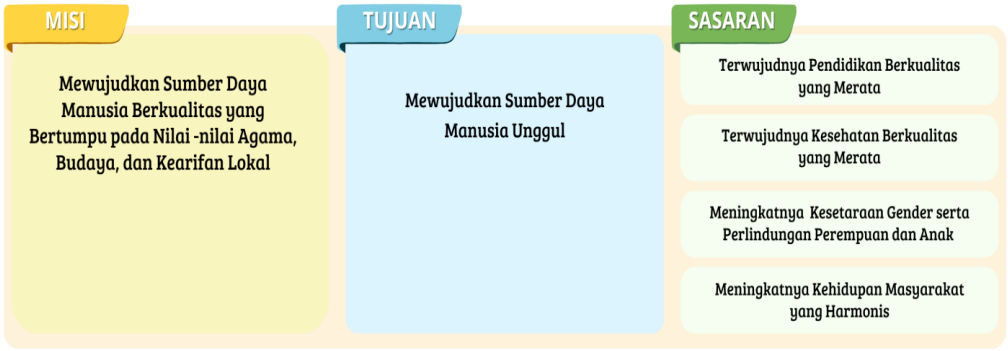

2. Misi 2 dijabarkan kedalam satu tujuan dan tiga sasaran. Tujuan pada misi ini adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

**Gambar 2.1.2.2** Tujuan dan Sasaran pada Misi 2



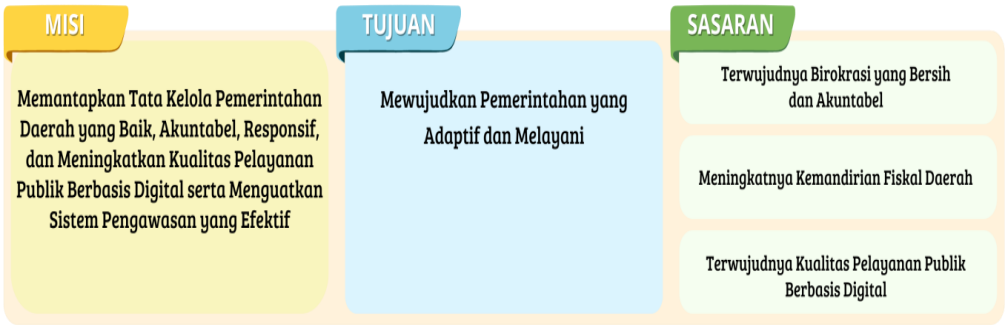

3. Misi 3 terkait dengan pembangunan SDM, dijabarkan menjadi satu tujuan dan empat sasaran

**Gambar 2.1.2.3** Tujuan dan Sasaran pada Misi 3




4. Misi 4 difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik, dijabarkan dalam satu tujuan dan tiga sasaran

**Gambar 2.1.2.4** Tujuan dan Sasaran pada Misi 4




Dari uraian Misi, tujuan dan sasaran misi berdasarkan RPJMD 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mendukung pencapaian misi 3, yaitu: mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang

bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Dengan tujuan mewujudkan sumber daya manusia unggul dan sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.2.1** Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Tahun 2024 | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Tujuan: Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) | Indeks | n/a | 7,01 | 7,16 | 7,31 | 7,46 | 7,61 | 7,76 |
| 2. | Sasaran: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | Angka | n/a | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 3. | Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase kasus/ kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* | % | 78,64 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 4. | Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Angka | 88,66 | 89,31 | 89,96 | 90,61 | 91,26 | 91,91 | 92,56 |

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang diwujudkan dalam rencana kinerja tahunan. Dalam kaitannya dengan pengukuran akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang ditetapkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan. Demikian halnya dengan perencanaan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, perencanaan kinerja yang dibuat sebagai kegiatan tahunan akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam kinerja tahunan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 di atas, tujuan dan Sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.2.2** Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (Satuan) | Formulasi Perhitungan | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis | Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) | Nilai Indeks Harmoni Indonesia | 7,01 |
| 2 | Sasaran: Meningkatnya Ketentraman | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan | Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan | 85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | Ketertiban Umum (IPKKU) | |
| 3 | Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi *Response time* (%) | Jumlah Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Menenuhi *Response Time*/ Jumlah keseluruhan KasusKejadian Kebakaran x 100% | 80 |
| 4 | Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 89,31 |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan dari tahapan awal perencanaan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 awal disusun berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025 dengan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022-2026, sedangkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029.

### 2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 awal terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan penetapan indikator kinerja dan target serta rincian anggaran program pendukung sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1.1** Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah | Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah | 3% |
| 2. | Tingkat Penurunan Kasus/ Kejadian Kebakaran | Persentase Penurunan Tingkat Kasus/Kejadian Kebakaran | 5 % |

| | PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp. | 5.327.088.210 | APBD/DBHCHT |
| 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. | 874.741.910 | APBD |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. | 15.686.394.145 | APBD |
| | **J U M L A H** | **Rp.** | **21.888.224.265** | |

### 2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menyesuaikan perubahan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahu 2025-2029 maupun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan target dan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.1.** Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | 85 |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon | 80 % |
| 3. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 89,31 |

| | PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp. | 5.301.279.378 | PABPD/DBHCHT |
| 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. | 826.927.910 | PAPBD |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. | 13.227.082.841 | PAPBD |
| | **J U M L A H** | **Rp.** | **19.355.290.129** | |

### 2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Dalam perubahan perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat bahwa sasaran startegis dan Indikator Kinerja Utama sebelum dan sesudah perubahan mengalami perubahan indikator yang sangat signifikan, dimana 2 (dua) indikator sasaran strategis sebelumnya dihapus dan diganti dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis baru dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3.1** Tabel Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

| **PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)** | | | **REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)** | | | **KETERANGAN** (diisi indikator tetap, berubah, dihapus, atau ditambahkan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Sasaran | Indikator | No | Sasaran | Indikator | |
| 1. | Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah | Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah | | | | Dihapus |
| 2. | Tingkat Penurunan Kasus/ Kejadian Kebakaran | Persentase Penurunan Tingkat Kasus/Kejadian Kebakaran | | | | Dihapus |
| | | | 1. | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | Ditambahkan |
| | | | 2. | Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time | Ditambahkan |
| | | | 3. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Ditambahkan |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, sebagai pelaksana tugas di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran di wilayahnya, memahami sepenuhnya tanggung jawabnya untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan. Kewajiban ini diemban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Konsep kinerja instansi pemerintah tidak hanya mencakup gambaran tentang sejauh mana sasaran atau tujuan instansi pemerintah tercapai, melainkan juga merupakan penunjukan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Laporan ini, yang disusun dengan itikad baik, bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi selama Tahun 2025.

Melalui penyajian ini, diharapkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dapat terwujud. Dengan transparansi dan keterbukaan yang dikedepankan dalam laporan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi penilaian, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan untuk peran dan kontribusi instansi ini dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tuban.

## A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan Awal/sebelum Perubahan)

**Tabel 3.1.1** Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan Awal/sebelum Perubahan)

| No | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) (Rp) | Program / Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah** | **Persentase Penurunan Pelanggarann Perundang-Undangan Daerah** | **3 (%)** | | **41,93 (%)** | | | |
| **I** | | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 100 (%) | 5.301.279.378 | 100 (%) | 2.925.036.100 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | | Persentase Petugas Satlinmas yang mengikuti pelatihan | 2.7 (%) | | 379.63 (%) | | | |
| | | Persentase pelanggaran gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100 (%) | | 100 (%) | | | |

| No | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) (Rp) | Program / Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Kasus Gangguan Trantibum yang Terselesaikan | 100 (%) | 4.705.931.751 | 100% | 2.699.113.800 | 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - Koordinasi antar Lembaga dan kemitraan antar di wilayah Kabupaten dan atar Kota / Kabupaten<br>- Patroli dan Pengamanan kegiatan KDH/WKDH dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah<br>- Operasi pengendalian terpadu, pengendalian unjuk rasa dan penertiban wilayah di Kecamatan<br>- Deteksi dan kesiapsiagaan dini linmas<br>- Kirab Pataka Kabupaten |
| | | Jumlah Petugas Satlinmas yang mengikuti pelatihan | 200 (Orang) | | 378 (%) | | | |
| | | Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah Yang Terselesaikan Secara Yustisia | 38 (Kasus) | 588.236.770 | 0,00% | 225.922.300 | 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan | - Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada<br>- Pengumpulan informasi barang kena cukai illegal<br>- Operasi pemberantasan |

| No | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) (Rp) | Program / Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Bupati/Wali Kota | barang kena cukai illegal<br>- Peningkapan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai<br>- Pengawasan kepatuhan penegakan Perda /Perkada |
| | | Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah Yang Terselesaikan Secara Non Yustisia | 113 (Kasus) | | 85,84% | | | |
| | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 1 (Kegiatan) | 7.110.857 | 100,00% | 0 | 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota | koordinasi terkait pengembangan kapasitas PPNS dan JF Pol PP |
| **B** | **Tingkat Penurunan kasus/ kejadian kebakaran** | **Persentase Penurunan Tingkat Kasus/ Kejadian Kebakaran** | **5 (%)** | | **932%** | | | |

| No | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) (Rp) | Program / Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II** | | Waktu tanggap (*Response time* ) penanganan kebakaran (menit) | 15 (Menit) | 826.927.910 | 100,00% | 426.781.591 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | |
| | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 (%) | 826.927.910 | 100,00% | 426.781.591 | 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - kegiatan pemadaman kasus kebakaran, penyelamatan dan penanganan satwa liar<br>- Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan pemadaman dan penyelamatan serta alat pelindung diri<br>- Pembinaan internal aparatur damkar |
| **C** | **Penunjang** | | | | | | | |
| **III** | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 81,9 (Poin) | 13.227.082.841 | 100,92% | 8.319.426.895 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | |

| No | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) (Rp) | Program / Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | 9 (Dokumen) | 121.516.307 | 100,00% | 16.580.500 | 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah |
| | | Jumlah Aparat Satpol PP dan Damkar | 91 (Orang) | 11.793.036.680 | 117,58% | 7.754.395.151 | 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Penyusunan dokumen pengajuan gaji, tunjangan dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan<br>- Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah |
| | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas | 220 (Orang) | 81.399.550 | 0% | 0 | 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan PSH |
| | | Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum | 6 (Jenis) | 265.592.013 | 100,00% | 147.729.341 | 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Penyediaan Alat listrik/ penerangan bangunan kantor<br>- penyediaan ATK<br>- Penyediaan mamin harian, mamin rapat dan mamin tamu<br>- Penyediaan barang cetak dan penggandaan<br>- Penyediaan surat kabar |

| No | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) (Rp) | Program / Kegiatan | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi |
| | | Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan | 1 (Laporan) | 265.205,275 | 100,00% | 36.408.000 | 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan 1 unit repeater digital, 4 unit Radio Rig , 20 unit HT dan 2 buah laptop |
| | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 (Jenis) | 316.796.680 | 100,00% | 211.563.975 | 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -pembayaran tagihan telpon dan listrik<br>- Penyediaan alat dan bahan kebersihan<br>- Pembayaran honorarium JKK, JKM non PNS dan jasa administrasi keuangan |
| | | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 4 (Jenis) | 383.536.336 | 100,00% | 152.749.928 | 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Pemeliharaan Kendaraan dinas dan kendaraan jabatan<br>- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br>- Pemeliharaan Gedung kantor |

### 3.1.1 Capaian Atas Kreview / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.1.1.1** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Sasaran: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)** | **85 (angka)** | **87,04 (Angka)** | **102,4 (%)** |
| **I** | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) |
| | | | Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) |
| | | | Persentase Satlinmas yang Aktif | 50 (%) | 26,87 (%) | 53,74 (%) |
| | | 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase penanganan gangguan trantibum | 100 (%) | 100 (%) | 100% |
| | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / Kota | 100 (%) | 100 (%) | 100% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 4 (Dokumen) | 4 (Dokumen) | 100,00% |
| | | 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 (Dokumen) | 2 (Dokumen) | 100,00% |
| | | 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 200 (Orang) | 23 (Orang) | 11,5% |
| | | 4. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan & Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | 12 (laporan) | 12 (laporan) | 100,00% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Penindakan atas Gangguan Ketentraman & Ketertiban Umum Berdasarkan Perda & Perkada melalui Penertiban & Penanganan Unjuk Rasa & Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan | 4 (Laporan) | 4 (Laporan) | 100,00 % |
| | | 6. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% |
| | | 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada | 165 (Kegiatan) | 169 (Kegiatan) | 102,4% |
| | | 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 (Laporan) | 2 (Laporan) | 100,00% |
| | | 2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP | 2 (Laporan) | 2 (Laporan) | 100,00% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% |
| | | 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 1 (Kegiatan) | 1 (Kegiatan) | 100,00% |
| | | 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% |
| **B** | **Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran** | | **Persentase Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi *Response time*** | **80 (%)** | **83.33 (%)** | **104,16%** |
| **II** | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Waktu tanggap (*Response time* ) penanganan kebakaran (menit) | 15 (Menit) | 11,26 (Menit) | 133,21% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran | 100 (%) | 100 (%) | 100,00% |
| | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 (%) | 100 (%) | 100,00% |
| | | 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% |
| | | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 28 (Unit) | 28 (Unit) | 100,00% |
| | | 3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 46 (Orang) | 46 (Orang) | 100,00% |
| **C** | **Sasaran: Meningkatnya** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 89,31 (Angka) | 89,12 (Angka) | 99,79% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan** | | | | | |
| **III** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai AKIP Perangkat Daerah** | **81,9 (Poin)** | **82,65 (Poin)** | **100,92%** |
| | | **1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja** | **9 (Dokumen)** | **9 (Dokumen)** | **100,00%** |
| | | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 (Dokumen) | 6 (Dokumen) | 100,00 % |
| | | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 (Dokumen) | 3 (Dokumen) | 100,00 % |
| | | **2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun** | 9 (Jenis) | 9 (Jenis) | 100,00% |
| | | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | **91 (Orang)** | **107 (Orang)** | **117,58%** |
| | | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9 (Dokumen) | 9 (Dokumen) | 100,00% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% |
| | | 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semseteran SKPD | 18 (Laporan) | 18 (Laporan) | 100,00% |
| | | 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 (Dokumen) | 4 (Dokumen) | 100,00% |
| | | **3) Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian** | **2 (Jenis)** | **1 (Jenis)** | **50,00%** |
| | | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 123 (Paket) | 1 (Paket) | 0,81% |
| | | **3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum** | **6 (Jenis)** | **6 (Jenis)** | **100,00%** |
| | | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% |
| | | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% |
| | | 4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% |
| | | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 (Dokumen) | 1 (Dokumen) | 100,00% |
| | | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 (Laporan) | 25 (Laporan) | 100,00% |
| | | **4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan** | **4 (Jenis)** | **4 (Jenis)** | **100,00%** |
| | | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 (Unit) | 32 (Unit) | 100,00% |
| | | **5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4 (Jenis)** | **4 (Jenis)** | **100,00%** |
| | | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang Disediakan | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% |
| | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% |
| | | **6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **4 (Jenis)** | **4 (Jenis)** | **100,00%** |
| | | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 43 (Unit) | 54 (Unit) | 125,58% |
| | | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 (Unit) | 11 (Unit) | 100,00% |
| | | 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 (Unit) | 4 (Unit) | 100,00% |

Dalam tabel 3.1.1.1 di atas terlihat bahwa dalam level capaian indikator kinerja sasaran pada perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, realisasi kinerja dari sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) sebesar 87,04 dari target 85 yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,4% (tercapai). IPKKU merupakan pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan pedoman pengukuran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 341/7620/BAK tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hasil Pengukuran IPKKU Kabupaten Tuban sebesar 87,04 tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

IPKKU diukur melalui 3 dimensi, yaitu:

a. Dimensi strategi, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:
    1. Subdimensi strategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada dengan 6 (enam) indikator;
    2. Sub dimensi stategi dalam mencapai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan 10 (sepuluh) indikator.
b. Dimensi sumber daya manusia, terdiri dari 2 (dua) subdimensi:
    1. Subdimensi pemberdayaan sumber daya manusia dengan 4 (empat) indikator;
    2. Subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator.
c. Dimensi sistem, terdiri dari 3 (tiga) sub dimensi:

1. Subdimensi sarana prasarana dengan 4 (empat) indikator;
2. Subdimensi perencanaan dan anggaran dengan 4 (empat) indikator;
3. Subdimensi akuntabilitas dengan 7 (tujuh) indikator.

IPKKU Kabupaten Tuban sebesar 87,04 pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat baik. Dari hasil pengukuran perdimensi, dapat diuraikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban telah memiliki strategi yang baik dalam menyelenggarakan penegakan Perda Perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun demikian, masih ada nilai yang rendah dari subdimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga masih diperlukan upaya optimalisasi dalam pemenuhan sub dimensi peningkatan Kapasitas SDM.

Selanjutnya, realisasi sasaran meningkatnya pelayanan penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran dengan indikator persentase kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* tahun 2025 adalah sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan capaian kinerja 104,16 % (tercapai) dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi respon time}}{\text{Jumlah keseluruhan kasus/ kejadian kebakaran}} \times 100\% = \frac{55}{66} \times 100\% = 83.33\%$$

Kasus/kejadian kebakaran tahun 2025 sebanyak 66 kasus terdiri dari 22 kasus kebakaran pemukiman, 1 kasus kebakaran hutan, 1 kasus kebakaran mobil, 6 kasus kebakaran kandang, 15 kasus kebakaran tempat usaha, 8 kasus kebakaran pada lahan kosong dan 13 kasus kebakaran lainnya. Dari 66 kasus/kejadian kebakaran tahun 2025, masih ada 11 kasus/kejadian kebakaran yang belum memenuhi *response time* penanganan kebakaran, salah satu penyebabnya adalah lokasi kejadian yang jaraknya jauh dari jangkauan pos pemadam kebakaran terdekat.

Realisasi sasaran meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah sebesar 89,12 dari target 89,31 dengan tingkat capaian 99,79% (tidak tercapai). IKM sangat dipengaruhi oleh persepsi dan ekspektasi responden penerima layanan. Dari analisa laporan hasil pengukuran IKM dari pihak ketiga, masih diperlukan optimalisasi dalam peningkatan kepuasan masyarakat dari beberapa unsur pelayanan, terutama unsur prioritas yang masuk dalam kuadran 1 dengan hasil gap pengukuran yang masih tinggi.

Sedangkan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada tabel 3.1.1.1 diatas, secara keseluruhan target kinerja sesuai indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan, program secara umum tercapai, baik yang telah memenuhi target kinerja maupun melebihi target kinerja. Namun demikian, ada beberapa indikator yang tidak tercapai, diantaranya indikator persentase Satlinmas yang aktif yang merupakan salah satu indikator kinerja dari program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan realisasi 26,87% dari target 50% sehingga capaian kinerjanya 53,74%. Hal ini disebabkan karena SIMLINMAS (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat) yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk pendataan, pemantauan dan pelaporan kegiatan satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mengalami kendala dan tidak dapat diakses.

Di level sub kegiatan, indikator kinerja yang tidak tercapai adalah sub kegiatan pengadaan pakaian dinas besera atribut dan kelengkapannya yang disebabkan karena adanya pertimbangan efesiensi, dimana pengadaan pakaian dinas tersebut dialokasikan untuk Tenaga Non PNS tapi ada kebijakan mutasi tenaga Non PNS dengan penempatan diluar Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sehingga anggaran tidak direalisasikan.

Pada subkegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dari target 200 orang jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, hanya terealisasi 23 orang. Hal ini disebabkan karena pengiriman pasukan untuk kegiatan Jer Basuki Mawa Beya (JBMB) dan kegiatan HUT Satpol PP tingkat Provinsi Jawa Timur tidak terlaksana dikarenakan karena adanya efesiensi anggaran.

Di samping itu, ada satu sub kegiatan dengan capaian kinerja 100% tapi tidak ada realisasi anggaran, yaitu sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada yang merupakan amanah dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas. Anggaran pada sub kegiatan tersebut dialokasikan sebagai bentuk bantuan kepada warga masyarakat yang terkena dampak pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kabupaten Tuban, tidak ada serapan anggaran karena sampai akhir tahun 2025 tidak ada warga negara yang terdampak dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada. Tidak adanya warga negara yang terdampak dalam penegakan Perda dan Perkada ini menunjukkan bahwa proses penegakan Perda dan Perkada berlangsung secara BERSAHABAT (Berwibawa, Santun, Humanis, Beretika dan Tegas) dengan tidak mengedepankan sikap represif. Dengan demikian, meskipun tidak ada realisasi anggaran, target kinerja dalam pemenuhan SPM dalam melayani warga masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada tetap terpenuhi 100%.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 3.1.2.1** Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (Satuan) | Target Tahun | | | Realisasi Tahun | | | Capaian Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Tujuan: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis | Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) (Indeks) | n/a | n/a | 7,01 | n/a | n/a | 7,01 | n/a | n/a | 100% |
| 2 | Sasaran: Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | n/a | n/a | 85 | n/a | n/a | 87,04 | n/a | n/a | 102,4% |
| 3 | Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi *Response time* (%) | n/a | n/a | 80 | n/a | 78,64 | 83,33 | n/a | n/a | 104,16 % |
| 4 | Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | n/a | n/a | 89,31 | 87,01 | 88,66 | 89,12 | n/a | n/a | 99,79% |

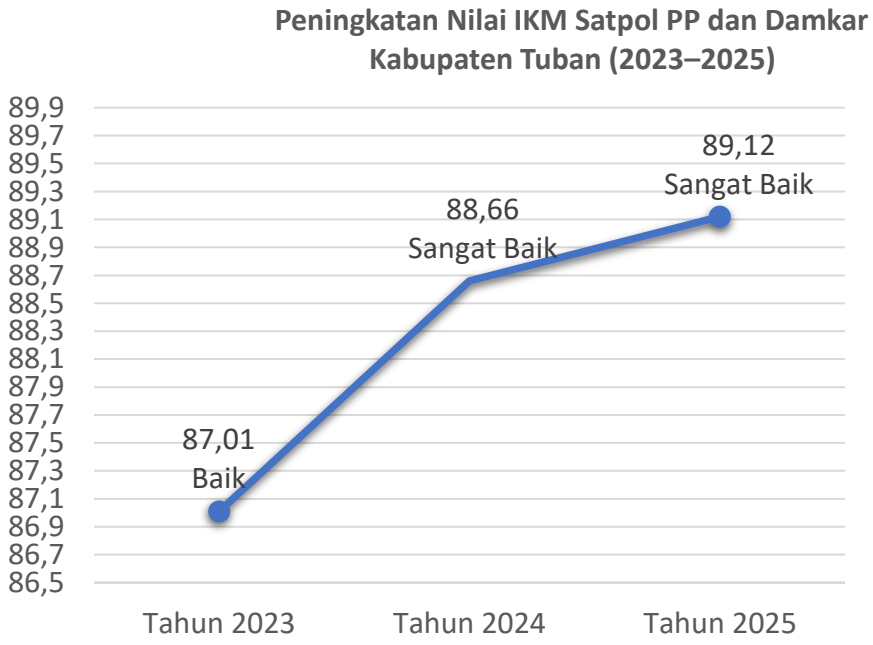
Indikator tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029. Indikator tujuan dan sasaran tersebut berbeda dengan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra tahun 2022-2026. Indikator sasaran yang sebelumnya persentase penurunan pelanggaran perundang-undangan daerah dan penurunan kasus/kejadian kebakaran,

sedangkan pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 berubah menjadi 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu IPKKU, Persentase kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* dan nilai IKM Perangkat Daerah. Karena ketiga indikator sasaran tersebut merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, maka penetapan target yang tersedia baru tahun 2025 dan pada tahun- tahun sebelumnya tidak tersedia. Namun demikian, untuk IKM perangkat daerah sudah diukur oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sudah dilakukan sejak tahun 2023. Demikian juga dengan indikator persentase kasus/kejadian kebakaran, dari data yang tersedia juga bisa diukur capaiannya dari tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.1.2.1 di atas, terlihat bahwa pencapaian realisasi kinerja dari indikator tujuan, yaitu Indeks Harmoni Indonesia dan indikator sararan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum (IPKKU) tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena pengukuran dan penetapan hasil baru dilaksanakan di tahun 2025. Sedangkan realisasi indikator sasaran persentase kasus/kejadian kebakaran tahun 2025 mengalami kenaikan dari 78,64% pada tahun 2024 menjadi 83,33 % pada tahun 2025.

Demikian juga dengan realisasi indikator sasaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, meskipun realisasi pada tahun ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun capaian nilai IKM dari tahun 2023 hingga 2025 terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2023, IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban masih di angka 87,01 dengan predikat baik, pada Tahun 2024 naik menjadi 88,66 dengan predikat sangat baik dan mempertahankan predikat sangat baik dengan nilai IKM sebesar 89,12 pada tahun 2025.

**Gambar 3.1.2.1** Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)




### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

**Tabel 3.1.3.1** Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran (Satuan) | Realisasi tahun 2025 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasaran : Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | 87,04 | 95 | 91,62% |
| 2 | Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi *Response time* (%) | 83,33 | 100 | 83,33% |

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran (Satuan) | Realisasi tahun 2025 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka) | 89,12 | 92,56 | 96,28% |

Dalam tabel 3.1.3.1 dapat dilihat data perbandingan realisasi pada tahun 2025 dengan target akhir yang ada pada renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Dalam data tersebut terdapat tingkat kemajuan pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 91,62%. Selanjutnya tingkat kemajuan pada sasaran meningkatnya pelayanan penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran sebesar 83,33% sedangkan tingkat kemajuan pada sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan sebesar 96,28%.

Tentunya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban akan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam capaian indikator sasaran OPD yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang telah diamanatkan dan terus berusaha agar capaian kinerja berikutnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Organisasi Lain Yang Setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah dengan organisasi lain yang setipe maupun dengan realisasi kinerja

level provinsi dan nasional dimaksudkan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja perangkat daerah dengan level setara dan level di atasnya.

Adapun perbandingan capaian kinerja strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan capaian kinerja stategis organisasi lain yang setipe yang memiliki indikator kinerja yang sama adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi dengan perbandingan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1.4.1** Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

| Indikator Kinerja (Satuan) | Capaian Kinerja | |
|---|---|---|
| | Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |
| Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | 87,04 | 72,25 |
| Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi *Response time* (%) | 83,33 | 45 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka) | 89,12 | n/a |

Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, dimana

realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sebesar 87,04 dengan kategori sangat baik sedangkan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sebesar 72,25 dengan kategori baik. Demikian juga dengan persentase kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time*, realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sebesar 83,33% dari target 80% sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi sebesar 45% dari target 45%. Namun demikian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah, tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi karena karena Kabupaten Ngawi tidak melakukan pengukuran IKM melalui pihak ketiga.

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan indikator kinerja sasaran stategis Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.4.2** Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Propinsi

| Indikator Kinerja (Satuan) | Capaian Kinerja | |
|---|---|---|
| | Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban | Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur |
| Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | 87,04 | 91,86 |
| Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi *Response time* (%) | 83,33 | n/a |

| Indikator Kinerja (Satuan) | Capaian Kinerja | |
|---|---|---|
| | Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban | Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka) | 89,12 | n/a |

Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, dimana realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sebesar 87,04 dengan kategori sangat baik sedangkan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur sebesar 91,86 dengan kategori sangat baik. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur bisa menjadi referensi dan tolak ukur positif untuk meningkatkan capaian kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten untuk indikator IPKKU, terutama dari sub dimensi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM.

Semantara itu, indikator kinerja sasaran jumlah kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* dan nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur sebagai organisasi lain yang setipe level provinsi karena adanya perbedaan sasaran strategis dan formulasi indikator kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Tuban dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 3.1.4.3** Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Perubahan)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | 85 |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi *Response time* (%) | 80 |
| 3. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka) | 89,31 |

Sedangkan indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1.4.4** Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Perubahan)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaraan di Jawa Timur | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka) | 75 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 |
|---|---|---|---|
| | | Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum (%) | 100 |
| | | Proporsi penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 65,95-71 |
| 2. | Meningkatnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur | Persentase Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%) | 90 |

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tercapainya target indikator kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.1.1.1, terutama untuk indikator sasaran strategis meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator Indeks Penyelenggaaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) menjadi bukti konkret dari upaya kolektif yang

melibatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dari seluruh elemen, baik internal antar bidang dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, koordinasi dan kerja sinergis dengan OPD terkait, partisipasi aktif masyarakat serta didukung oleh inovasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan serta perlindungan masyarakat di daerah. Adanya sistem perencaaan dan penganggaran yang baik, mulai dari level RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi dan sistem aduan yang baik juga turut meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mengoptimalkan capaian indikator kinerja. Namun demikian, perencanaan peningkatan kompetensi SDM, program pengembangan kompetensi SDM serta program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS perlu menjadi perhatian dalam upaya lebih mengoptimalkan capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) tersebut. Salah upaya yang dilakukan adalah koordinasi dan kerja sama dalam pengajuan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis ke instansi pengampu pengembangan kompetensi, baik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban maupun ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berupa Regu On Call sebagai Unit Reaksi Cepat (URC) berperan aktif secara cepat dan tanggap dalam hal penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baik yang berasal dari laporan aduan masyarakat maupun gangguan masyarakat yang ditemukan dari kegiatan patroli secara bergiliran dalam 24 jam. Melalui kegiatan patroli, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dapat lebih efektif memantau dan

mengawasi keadaan di berbagai wilayah, memberikan keberlanjutan dalam pemeliharaan ketertiban dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Pada kinerja sasaran meningkatnya pelayanan penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran kasus/kejadian kebakaran, jumlah seluruh kasus kejadian kebakaran yang ditangani selama tahun 2025 sebanyak 66 kasus. Dari 66 kasus/kejadian kebakaran tahun 2025, masih ada 11 kasus/kejadian kebakaran yang belum memenuhi *response time* penanganan kebakaran, salah satu penyebabnya adalah lokasi kejadian yang jaraknya jauh dari jangkauan pos pemadam kebakaran terdekat. Oleh karena itu, diperlukan pembukaan pos pemadam kebakaran baru di beberapa titik rawan secara bertahap. Salah satunya di Kecamatan Bancar untuk pelayanan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang kurang bisa dijangkau oleh Pos pemadam kebakaran Kecamatan Jatirogo dan Pos Pemadam Kebakaran Tuban. Ke depan, beberapa kecamatan yang rawan penanganan kebakaran yang melebihi *response time* seperti Kecamatan Parengan dan Widang patut dipertimbangkan untuk disediakan pos pemadam kebakaran agar target akhir Renstra persentase kasus/ kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* tahun 2029 dan 2030 dapat mencapai 100%.

Dalam sitem pelaporan aduan kaus/kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban menyediakan aplikasi PENDEKAR (Panggilan Cepat dan Darurat Pemadam Kebakaran). Inovasi ”PENDEKAR” sendiri merupakan aplikasi berbasis web dan bisa diakses melalui smartphone merupakan aplikasi yang menyajikan daftar nomor telepon seluruh anggota damkar di pos terdekat, membantu masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran yang terjadi di wilayahnya lebih

mudah dan cepat. Di dalam aplikasi tersebut juga memuat berbagai informasi terkait pencegahan dan penanganan kebakaran serta non kebakaran yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan kepada masyarakat. Upaya sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran yang intensif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam bertujuan untuk pencegahan dan penanganan awal kasus/kejadian kebakaran.

Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran di seluruh wilayah Kecamatan menjadi hal penting yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kebakaran di wilayah sekitarnya. Dengan penanganan yang lebih cepat, diharapkan efek yang merugikan dari kejadian kebakaran dapat diminimalisir.

Realisasi sasaran meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah mengalami kenaikan dari 88,66 pada tahun 2024 menjadi 89,12 pada tahun 2025. Namun demikian, tidak memenuhi target kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 89,31 sehingga tingkat capaian hanya sebesar 99,79%. Indeks Kepuasan Masyarakat ini merupakan salah satu insrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan. IKM sangat dipengaruhi oleh persepsi dan ekspektasi responden penerima layanan. Dari analisa laporan hasil pengukuran IKM dari pihak ketiga pada tahun 2025, masih diperlukan optimalisasi dalam peningkatan kepuasan masyarakat dari beberapa unsur pelayanan, terutama unsur prioritas yang masuk dalam kuadran 1 hasil pengukuran IKM oleh pihak ketiga, yaitu : sistem, mekanisme, prosedur, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan pemenuhan sarana prasarana. Beberapa upaya

yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diantaranya: evaluasi internal secara rutin melalui pengarahan pimpinan terkait pentingnya budaya kerja, integritas dan pelayanan prima sesuai standar pelayanan dan SOP, sosialisasi ke masyarakat penerima layanan terkait sistem, mekanisme dan prosesur pelayanan dan aduan serta memelihara sarana prasarana secara rutin dan secara bertahap memenuhi kebetuhan.

Untuk indikator kinerja dari program penunjang, tercapainya nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan koordinasi dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah melalui peran aktif dan kerja sama seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.

Dari analisa capaian, keberhasilan dan kendala diatas, beberapa hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengemban amanah sebagai institusi dalam penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat belum didukung SDM yang cukup, baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitas;
2. Kurang meratanya sosialisasi/penyuluhan tentang perundang-undangan daerah terutama terkait perijinan dan penyelenggaraan usaha dengan sasaran para pelaku usaha;
3. Kegiatan pengawasan penegakan Perda dan Perkada masih belum memberikan intervensi yang signifikan dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Semakin bertambahnya Ruang Terbuka Publik menambah potensi pelanggaran Perda dan Perkada, mulai dari maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masalah sosial lainnya yang mempengaruhi ketertiban ruang publik;
5. Belum optimalnya penanganan PKL dan PMKS pasca penertiban, sehingga memunculkan pelanggaran berulang;
6. Masih belum optimalnya peran serta Satlinmas dalam meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya;
7. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pelayanan pemadaman kebakaran;
8. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat / pemilik usaha terkait hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran;
9. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan kebakaran.

Dalam rangka penyempurnaan kinerja ke depan, beberapa hal yang dapat dilaksanakan sebagai alternatif solusi atas hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis maupun diklat secara luring maupun daring melalui anggaran BKPSDM dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;

2. Pemerataan sosialisasi/penyuluhan tentang perundang-undangan daerah terutama terkait perijinan dan penyelenggaraan usaha dengan sasasan para pelaku usaha;
3. Mengoptimalkan kegiatan penegakan Perda dan Perkada terutama Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan kerja sama yang baik dengan OPD pengampun (BPKPAD) melalui inventarisasi data, pengawasan bersama dan operasi penertiban gabungan
4. Koordinasi dan sinergi dengan OPD dengan mengoptimalkan pengamanan Ruang Terbuka Publik untuk mencegah naiknya potensi pelanggaran Perda dan Perkada, baik yang berasal dari Pedagang Kaki Lima (PKL), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masyarakat umum untuk ketertiban ruang publik yang lebih baik;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi terkait tindak lanjut penanganan pasca penertiban;
6. Meningkatkan peran serta Satlinmas dalam meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya melalui sosialisasi dan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas Satlinmas;
7. Pemenuhan sarana prasarana dan mengoptimalkan pemenuhan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pelayanan pemadaman kebakaran;
8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat/pemilik usaha terkait hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui sosialisasi serta melaksanakan inspeksi proteksi kebakaran minimal bagi pelaku usaha dan perkantoran;
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan kebakaran.

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan guna meminimalisir kemungkinan sumber daya yang terbuang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam penguatan efisiensi sumber daya adalah untuk mengurangi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program/kegiatan, memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunyai sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma, meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal serta guna mencapai sebuah hasil atau tujuan sasaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Capaian yang melebihi target menandakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dan tindakan preventif, sedangkan tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik

**Tabel 3.1.6.1** Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | 85 | 87,04 | 102,4 (%) | 89,36% | 13,04% |
| I | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 89,36% | 10,64% |
| | | Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan | 100 (%) | 100 (%) | 100 (%) | 89,36% | 10,64% |
| | | Persentase Satlinmas yang Aktif | 50 (%) | 26,87 (%) | 53,74 (%) | 89,36% | -35,62% |
| | 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase penanganan gangguan trantibum | 100 (%) | 100 (%) | 100% | 90,06% | 9,94% |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / Kota | 100 (%) | 100 (%) | 100% | 90,06% | 9,94% |

| No | Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 4 (Dokumen) | 4 (Dokumen) | 100,00% | 77,17% | 32,83% |
| | 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 (Dokumen) | 1 (Dokumen) | 100,00% | 97,93% | 2,07% |
| | 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 200 (Orang) | 23 (Orang) | 11,50% | 43,83% | -32,33% |
| | 4. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan & Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% | 91,50% | 8,50% |
| | 5. Penindakan atas Gangguan Ketentraman & Ketertiban Umum Berdasarkan Perda & Perkada melalui Penertiban & Penanganan Unjuk Rasa & Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 4 (Laporan) | 4 (Laporan) | 100,00% | 97,12% | 2,88% |
| | 6. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% | 0% | 100,00% |
| | **2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada** | **165 (Kegiatan)** | **169 (Kegiatan)** | **102,42%** | **83,99%** | **18,43%** |
| | 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 (Laporan) | 2 (Laporan) | 100,00% | 74,87% | 25,13% |

| No | Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP | 2 (Laporan) | 2 (Laporan) | 100,00% | 84,04% | 15,96% |
| | 3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% | 97,80% | 2,20% |
| | **3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **1 (Kegiatan)** | **1 (Kegiatan)** | **100,00%** | **64,75%** | **35,25%** |
| | 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% | 64,75% | 35,25% |
| **B** | **Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran** | **Persentase Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi *Response time*** | **80 (%)** | **83.33 (%)** | **104,16%** | **99,38%** | **4,78%** |
| **II** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** | **Waktu tanggap (*Response time* ) penanganan kebakaran (menit)** | **15 (Menit)** | **11,26 (Menit)** | **133,21%** | **90,36%** | **42,85%** |
| | **1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran** | **100 (%)** | **100 (%)** | **100,00%** | **90,36%** | **9,64%** |
| | | **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **100 (%)** | **100 (%)** | **100,00%** | **90,36%** | **9,64%** |
| | 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% | 94,35% | 5.65% |
| | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 28 (Unit) | 28 (Unit) | 100,00% | 85,23% | 14,77% |

| No | Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 46 (Orang) | 46 (Orang) | 100,00% | 64,81% | 35,19% |
| **C** | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah** | **89,31** | **89,12** | **99,79%** | **87,58%** | **12,21%** |
| **III** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai AKIP Perangkat Daerah** | **81,9 (Poin)** | **82,65 (Poin)** | **100,92%** | **87,58%** | **13,34%** |
| | **1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja** | **9 (Dokumen)** | **9 (Dokumen)** | **100,00%** | **75,09%** | **14,91%** |
| | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 (Dokumen) | 6 (Dokumen) | 100 % | 89,57% | 10,43% |
| | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 (Dokumen) | 3 (Dokumen) | 100 % | 49,61% | 50,39 % |
| | **2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun** | **9 (Jenis)** | **9 (Jenis)** | **144,44%** | **87,73%** | **56,71%** |
| | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 91 (Orang) | 107 (Orang) | 117,58% | 87,67% | 29,91% |
| | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9 (Dokumen) | 9 (Dokumen) | 100,00% | 94,61% | 5,39% |
| | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% | 94,42% | 5,58% |
| | 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semseteran SKPD | 18 (Laporan) | 18 (Laporan) | 100,00% | 99,51% | 0,49% |
| | 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 (Dokumen) | 4 (Dokumen) | 100,00% | 99,97% | 0,03% |

| No | Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian** | **2 (Jenis)** | **1 (Jenis)** | **50,00%** | **1,20%** | **48,80%** |
| | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 123 (Paket) | 1 (Paket) | 0.81% | 1,20% | -0,39% |
| | **4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum** | **6 (Jenis)** | **6 (Jenis)** | **100,00%** | **92,71%** | **7,29%** |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% | 84,80% | 15,20% |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% | 80,96% | 19,04% |
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 1 (Paket) | 1 (Paket) | 100,00% | 99,53% | 0,47% |
| | 4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 (Paket) | 3 (Paket) | 100,00% | 98,59% | 1,41% |
| | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 (Dokumen) | 1 (Dokumen) | 100,00% | 97,81% | 2,19% |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 (Laporan) | 25 (Laporan) | 125,00% | 65,90% | 59,1% |
| | **5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah** | **4 (Jenis)** | **4 (Jenis)** | **100,00%** | **96,18%** | **3,82%** |
| | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 (Unit) | 32 (Unit) | 100,00% | 96,18% | 3,82% |
| | **6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang** | **4 (Jenis)** | **4 (Jenis)** | **100,00%** | **88,07%** | **11,93%** |
| | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang Disediakan | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% | 95,29% | 4,71% |
| | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 (Laporan) | 1 (Laporan) | 100,00% | 75,33% | 24,67% |
| | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 (Laporan) | 12 (Laporan) | 100,00% | 86,02% | 13,98% |

| No | Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **4 (Jenis)** | **4 (Jenis)** | **100,00%** | **95,51%** | **4,49%** |
| | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 43 (Unit) | 54 (Unit) | 100,00% | 97,15% | 2,85% |
| | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 (Unit) | 11 (Unit) | 100,00% | 76,34% | 23,66% |
| | 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 4 (Unit) | 4 (Unit) | 100,00% | 94,54% | 5,46% |

Dari tabel 3.1.6.1 diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada level sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

   Indikator Kinerja: Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

   Penjelasan:

   - Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dengan target 85 dan realisasi kinerja mencapai 87,04 menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat baik.
   - Capaian Kinerja: dengan capaian kinerja sebesar 102,4% menandakan keberhasilan dalam efektivitas strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target.

- Penyerapan Anggaran: tingkat penyerapan anggaran sebesar 89,36% menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Program Pendukung : Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikator Kinerja :

- Persentase jenis pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang ditegakkan;
- Persentase pelanggaran trantibum yang terselesaikan
- Persentase Satlinmas yang aktif

Penjelasan :

- Capaian indikator Persentase jenis pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang ditegakkan sebesar 100% dan realisasi anggaran 89,36% dengan tingkat efesiensi 10,64%.
- Capaian indikator persentase pelanggaran trantibum yang terselesaikan sebesar 100% dan realisasi anggaran 89,36% dengan tingkat efesiensi 10,64%.
- Capaian Persentase Satlinmas yang aktif sebesar 53,74% dan realisasi anggaran 89,36% dengan tingkat efesiensi -35,62%.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran

   Indikator Kinerja : Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Memenuhi *Response time*

   Penjelasan:

   - Capaian indikator persentase kasus/ kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* sebesar 104,16% dan realisasi anggaran sebesar 99,38% sehingga tingkat efesiensi sebesar 4,78%.
   - Capaian Kinerja: dengan capaian kinerja sebesar 102,4% menandakan keberhasilan dalam efektivitas strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target.

- Penyerapan Anggaran: tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,38% menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Program Pendukung : Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator Kinerja : Waktu tanggap (*Response time* ) penanganan kebakaran.

Penjelasan :

Capaian kinerja Waktu tanggap (rensponse time) penanganan kebakaran 133,21% dan realisasi anggaran 90,36% dengan tingkat efesiensi 42,85%

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan

   Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

   Penjelasan:

   - Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah sebesar 99,79% dan realisasi anggaran sebesar 90,36% sehingga tingkat efesiensi sebesar 12,21%.
   - Capaian Kinerja: dengan capaian kinerja sebesar 99,79% menandakan bahwa diperlukan evaluasi kinerja dan perlunya perubahan strategi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar target ke depan bisa tercapai.
   - Penyerapan Anggaran: tingkat penyerapan anggaran sebesar 87,58% menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

   Program Pendukung : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Penjelasan :

Capaian kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 82,65 dan realisasi anggaran 87,58% dengan tingkat efesiensi 13,34%.

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didukung oleh Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama pada sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan; penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten Kota. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, terutama pada sub kegiatan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Program yang mendukung dalam capaian sasaran meningkatnya pelayanan penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran dengan indikator kinerja jumlah kasus/ kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* adalah

program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan didukung oleh kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota, terutama dari sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

Pada Tahun 2025, kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran serta pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan kebakaran telah dilaksanakan dengan anggaran yang terdapat pada sub kegiatan sebagaimana tersebut di atas dengan alokasi anggaran yang terbatas. Kebanyakan kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan maupun kelompok masyarakat. Melalui PAPBD 2025, telah dilaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran di Kecamatan dengan total relawan kebakaran yang terbentuk sebanyak 200 orang, masih kurang 14 Kecamatan lagi yang belum dilakukan pembentukan dan pelatihan peningkatan kapasitas relawan kebakaran.

**Tabel 3.1.7.1** Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

| Sasaran | Indikator | Program Unggulan | Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/inovasi |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum | Dukungan Anggaran dalam kegiatan penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/ Perkada, peningkatan dan pemberdayaan Satlinmas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Memenuhi *Response time* | Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dukungan anggaran dan pemenuhan sarana prasarana dan kebutuhan operasional kegiatan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, pembentukan dan pemberdayaan relawan kebakaran, serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota<br>Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum<br>Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dukungan anggaran dan kegiatan serta dukungan akuntabilitas sistem dalam melaksanakan pelayanan publik, baik di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun perlindungan masyarakat serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. |

## 3.2 Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 19.355.290.129,00 yang bersumber dari APBD dan DBHCHT melalui 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.069.208.327,00 dan persentase realisasi anggaran sebesar 88,19%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.1** Realisasi Anggaran

| No. | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **13.227.082.841** | **11.584.923.929** | **87,58** |

| No. | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **121.516.307** | **91.246.778** | **75,09** |
| 1. | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 77.480.307 | 69.399.778 | 89,57 |
| 2. | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44..036.000 | 21.847.000 | 49,61 |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11.793.036.680** | **10.346.071.603** | **87,73** |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.783.036.680 | 10.266.772.603 | 87,67 |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 50.100.000 | 47.400.000 | 94,61 |
| 3. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.107.500 | 2.934.000 | 94,42 |
| 4. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 23.786.000 | 23.669.500 | 99,51 |
| 5. | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5.297.000 | 5.295.500 | 99,97 |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **81.399.550** | **976.000** | **1,20** |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 81.399.550 | 976.000 | 1,20 |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **265.592.013** | **246.225.639** | **92,71** |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.989.273 | 4.230.722 | 84,80 |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.728.740 | 28.926.778 | 80,96 |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 163.369.000 | 162.597.500 | 99,53 |
| 4. | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.068.000 | 25.700.504 | 98,59 |
| 5. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4.437.000 | 4.340.000 | 97,81 |
| 6. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31.000.000 | 20.430.135 | 65,90 |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **265.205.275** | **255.077.780** | **96.18** |
| 1. | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 265.205.275 | 255.077.780 | 96.18 |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **316.796.680** | **279.006.942** | **88,07** |

| No. | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 80.580.000 | 76.787.671 | 95,29 |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.123.000 | 6.872.643 | 75,33 |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 227.093.680 | 195.346.628 | 86,02 |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **383.536.336** | **366.319.187** | **95,51** |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Jabatan | 261.550.461 | 254.099.349 | 97,15 |
| 2. | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.060.000 | 13023838 | 76,34 |
| 3. | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangungan Lainnya | 104.925.875 | 99.196.000 | 94,54 |
| **B.** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.301.279.378** | **4.737.051.398** | **89,36** |
| | **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **4.705.931.751** | **4.328.364.342** | **90,06** |
| 1. | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota | 3.110.122 | 2.400.000 | 77,17 |
| 2. | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 151.357.784 | 148.221.900 | 97,93 |
| 3. | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 190.719.505 | 83.582.872 | 43,83 |
| 4. | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 4.023.227.340 | 342.010.370 | 91,50 |
| 5. | Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasakan Perda dan Perkada Melalui | 332.517.000 | 322.942.600 | 97,12 |

| No. | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | |
| 6. | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 5.000.000 | 0 | 00.00 |
| | **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **588.236.770** | **494.083.000** | **83,99** |
| 1. | Sub Kegiatan Sosialiasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 105.594.300 | 79.056.500 | 74,87 |
| 2. | Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 414.221.080 | 348.112.500 | 84,04 |
| 3. | Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 68.421.390 | 66.914.000 | 97,80 |
| | **Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **7.110.857** | **4.604.056** | **64,75** |
| 1. | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 7.110.857 | 4.604.056 | 64,75 |
| **C.** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **826.927.910** | **747.233.000** | **90,36** |
| | **Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **826.927.910** | **747.233.000** | **90,36** |
| 1. | Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 549.088.915 | 518.051.590 | 94,35 |
| 2. | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 37.305.470 | 24.179.350 | 64,81 |
| 3. | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 240.533.525 | 205.002.060 | 85,23 |
| **JUMLAH** | | **19.355.290.129** | **17.069.208.327** | **88,19** |

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Pengukuran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang efektif agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai landasan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dengan RPJMD dan Renstra periode sebelumnya sehingga perencanaan program kegiatan serta penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Tuban berlandaskan pada Renstra tahun 2021–2026 pada tahapan awal dan menyesuaikan dengan penetapan indikator kinerja baru berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 dan menetapkannya dalam Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Ditinjau dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi ke-1 yaitu membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupaya menciptakan

tata kehidupan yang harmonis, tertib, dan tentram sehingga akan membantu dalam mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing, dan berbasis lingkungan sebagaimana visi dari Pemerintah Kabupaten Tuban.

Sedangkan dari uraian Misi, tujuan dan sasaran misi berdasarkan RPJMD 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mendukung pencapaian misi 3, yaitu: mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Dengan tujuan mewujudkan sumber daya manusia unggul dan sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, tujuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dengan sasaran strategis meningkatnya ketetraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), meningkatnya pelayanan penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran dengan indikator persentase kasus/kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* dan sarasan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan capaian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU sebesar 87,04 dari target 85 dengan capaian kinerja 102,4% dan realisasi anggaran 89,36% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 13,04%;
2. Persentase kasus/ kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* sebesar 83,33% dari target 80% dengan capaian kinerja 104,16% dan realisasi anggaran 99,38% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 4,78%;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah sebesar 89,12 dari target yang ditetapkan sebesar 89,31 dengan capaian kinerja 99,79% dan realisasi anggaran sebesar 87,58% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 12,21%.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain :

1. Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengemban amanah sebagai institusi dalam penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat belum didukung SDM yang cukup, baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitas;
2. Kurang meratanya sosialisasi/penyuluhan tentang perundang-undangan daerah terutama terkait perijinan dan penyelenggaraan usaha dengan sasaran para pelaku usaha;
3. Kegiatan pengawasan penegakan Perda dan Perkada masih belum memberikan intervensi yang signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Semakin bertambahnya Ruang Terbuka Publik menambah potensi pelanggaran Perda dan Perkada, mulai dari maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masalah sosial lainnya yang mempengaruhi ketertiban ruang publik;
5. Belum optimalnya penanganan PKL dan PMKS pasca penertiban, sehingga memunculkan pelanggaran berulang;
6. Masih belum optimalnya peran serta Satlinmas dalam meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya;
7. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pelayanan pemadaman kebakaran;
8. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat/pemilik usaha terkait hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran;
9. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pembentukan dan

peningkatan kapasitas relawan kebakaran.

## 4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam rangka penyempurnaan kinerja ke depan, beberapa hal yang dapat dilaksanakan sebagai alternatif solusi atas hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis maupun diklat secara luring maupun daring melalui anggaran BKPSDM dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerataan sosialisasi/penyuluhan tentang perundang-undangan daerah terutama terkait perijinan dan penyelenggaraan usaha dengan sasasan para pelaku usaha;
3. Mengoptimalkan kegiatan penegakan Perda dan Perkada terutama Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan kerja sama yang baik dengan OPD pengampun (BPKPAD) melalui inventarisasi data, pengawasan bersama dan operasi penertiban gabungan
4. Koordinasi dan sinergi dengan OPD dengan mengoptimalkan pengamanan Ruang Terbuka Publik untuk mencegah naiknya potensi pelanggaran Perda dan Perkada, baik yang berasal dari Pedagang Kaki Lima (PKL), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masyarakat umum untuk ketertiban ruang publik yang lebih baik;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi terkait tindak lanjut penanganan pasca penertiban;
6. Meningkatkan peran serta Satlinmas dalam meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya melalui sosialisasi dan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas Satlinmas;

7. Pemenuhan sarana prasarana dan mengoptimalkan pemenuhan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pelayanan pemadaman kebakaran;
8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat/pemilik usaha terkait hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui sosialisasi serta melaksanakan inspeksi proteksi kebakaran minimal bagi pelaku usaha dan perkantoran;
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan kebakaran.

Dengan upaya tindak lanjut melalui beberapa alternatif solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban di masa mendatang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja merupakan wujud dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, semoga dapat memberikan kontribusi sebagai alat pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pendorong upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tuban, Januari 2026
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaraan
Kabupaten Tuban

**Siswanto, S.H., M.M.**
Pembina Tk. I
NIP. 19700412 199101 1 001

# LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jalan RA. Kartini No. 2 Tuban - Jatim (62311), Telepon (0356) 321003 - 321016
Laman : https://satpolpp-damkar.tubankab.go.id , Pos-el : sekretariat.satpolpptuban@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.45/136 /KPTS/414.104.1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI
DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TUBAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, maka perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Kepala Satuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;

    Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 16)
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Menerima dan menginventarisir laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban;
2. Mengadakan evaluasi atas laporan yang telah diterima untuk mengetahui tingkat pelaksanaan masing-masing kegiatan, baik yang sudah dikerjakan, sedang dalam proses penyelesaian maupun yang belum dikerjakan termasuk kendala/hambatan yang dihadapi serta upaya/solusi pemecahan masalah yang dihadapi;
3. Mengadakan Pemantauan/Monitoring pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan laporan pengendalian dan evaluasi (dalev) bulanan/tribulan/tahunan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban;
5. Menyiapkan bahan laporan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban perihal realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan serta laporan pengendalian dan evaluasi (dalev) bulanan/tribulan/tahunan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tuban

**Drs. Gunadi, MM.**
Pembina Utama Muda
Nip. 19700412 199101 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 188.45/136 /KPTS/414.104.1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN

**DAFTAR TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN**

| No | JABATAN DALAM TIM<br>NAMA/NIP | | JABATAN ORGANIK |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | | *3* |
| 1. | Penanggung Jawab | | Kasatpol PP dan Damkar |
| 2. | Ketua | | Sekretaris Satpol PP dan Damkar |
| 3. | Wakil Ketua | | Kasubag Program dan Pelaporan |
| 4. | Anggota | Nama :<br>Rizki Prasetyo Utomo Toha<br>NIP. 19930701 202321 1 028 | Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan |
| 5. | Anggota | Nama :<br>Okky Dwi Priyanto<br>NIP. - | Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan |

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tuban

**Drs. Gunadi, MM.**
Pembina Utama Muda
Nip. 19700412 199101 1 001

| | | |
|---|---|---|
| **KABUPATEN TUBAN**<br>**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** | Nomor SOP | 067/1421/414.104.1/2023 |
| | Tanggal Pembuatan | 07 Maret 2022 |
| | Tanggal Revisi | 26 September 2023 |
| | Tanggal Efektif | 26 September 2023 |
| | Disahkan Oleh | KEPALA<br>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN<br>KABUPATEN TUBAN<br><br>Drs. GUNADI, MM<br>19700412 199101 1 001 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Nama SOP | **PENGUMPULAN DATA KINERJA** |

**DEFINISI**

Salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
7. Perbub Tuban No. 187 tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami Sistem Perencanaan
2. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
3. Menguasai Komputer

**KETERKAITAN**

1. PEMBUATAN DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI
2. ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR
3. PENGUKURAN KINERJA

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer dan ATK
2. Dokumen Pegawai

**PERINGATAN**

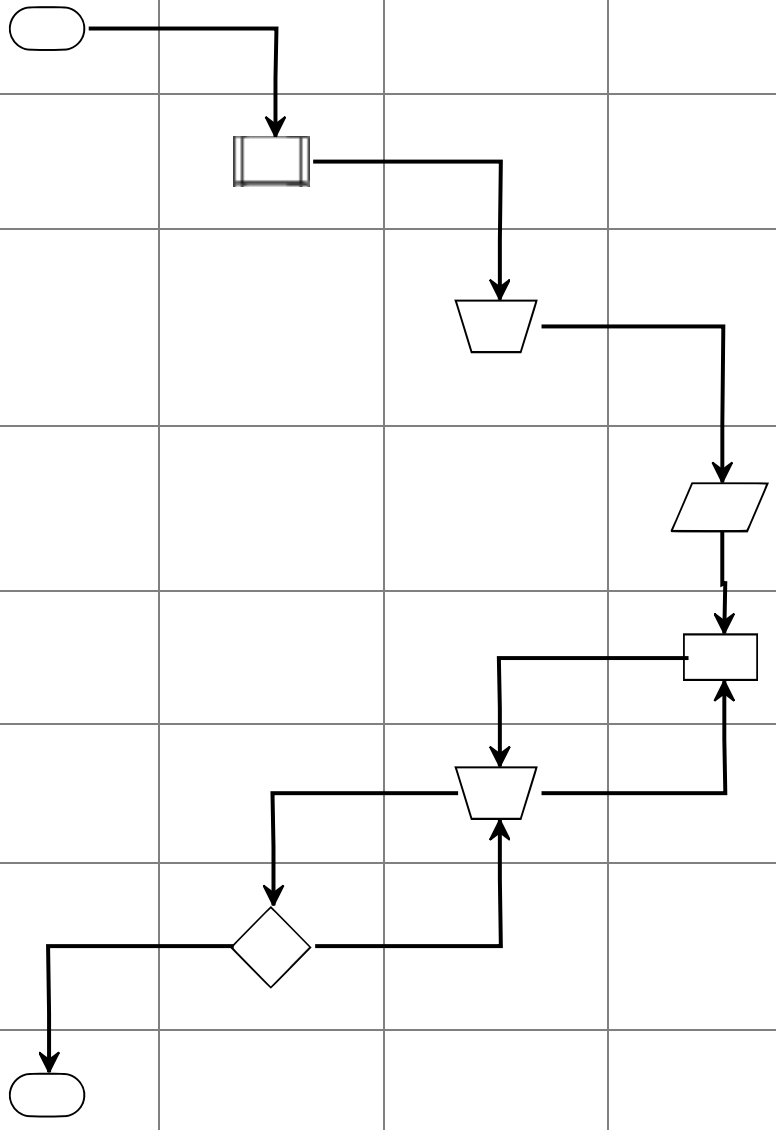
1. Apabila tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak Berjalan dengan optimal

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

# SOP: PENGUMPULAN DATA KINERJA

| No | Kegiatan | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KASATPOLPP DAN DAMKAR | SEKRETARIS | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | STAF | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menugaskan Sekretaris untuk mengumpulkan data kinerja | | | | | Instruksi | 10 Menit | Disposisi Kasat | |
| 2 | Sekretaris Menugaskan Kepala Sub Bagian Program dan Laporan untuk membuat format pengumpulan data kinerja | | | | | Instruksi | 10 Menit | Disposisi Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Program dan Laporan membuat format pengumpulan data kinerja | | | | | Disposisi Sekretaris | 10 Menit | Konsep Format Pengumpulan Data Kinerja | Data dari Bid. Teknis |
| 4 | Mengumpulkan data dari semua eselon dan mengolah data tersebut | | | | | Data, Renstra, DPA | 16 Jam | format data kinerja | Data dari Bid. Teknis |
| 5 | Setelah Format pengumpulan data selesai dibuat, lalu diajukan ke Kepalas Sub Bagian Program dan Laporan | | | | | Data Kinerja yang telah terkumpul | 5 Jam | Draft Data Kinerja | |
| 6 | Mengoreksi data kinerja yang terkumpul, bila data kinerja terdapat kesalahan maka akan dilakukan verifikasi dengan bidang terkait | | | | | Draft Data Kinerja | 60 Menit | Draft Hasil Koreksi | |
| 7 | Mengoreksi data kinerja yang terkumpul dan menyerahkan kepada Kepala Satuan | | | | | Draft Hasil Koreksi | 15 Menit | Draft Hasil Koreksi | |
| 8 | Menyetujui dan menandatangani | | | | | Draft Hasil Koreksi | 10 Menit | Data Kinerja | Data Kinerja diarsipkan dan dikirim ke Instansi Terkait |

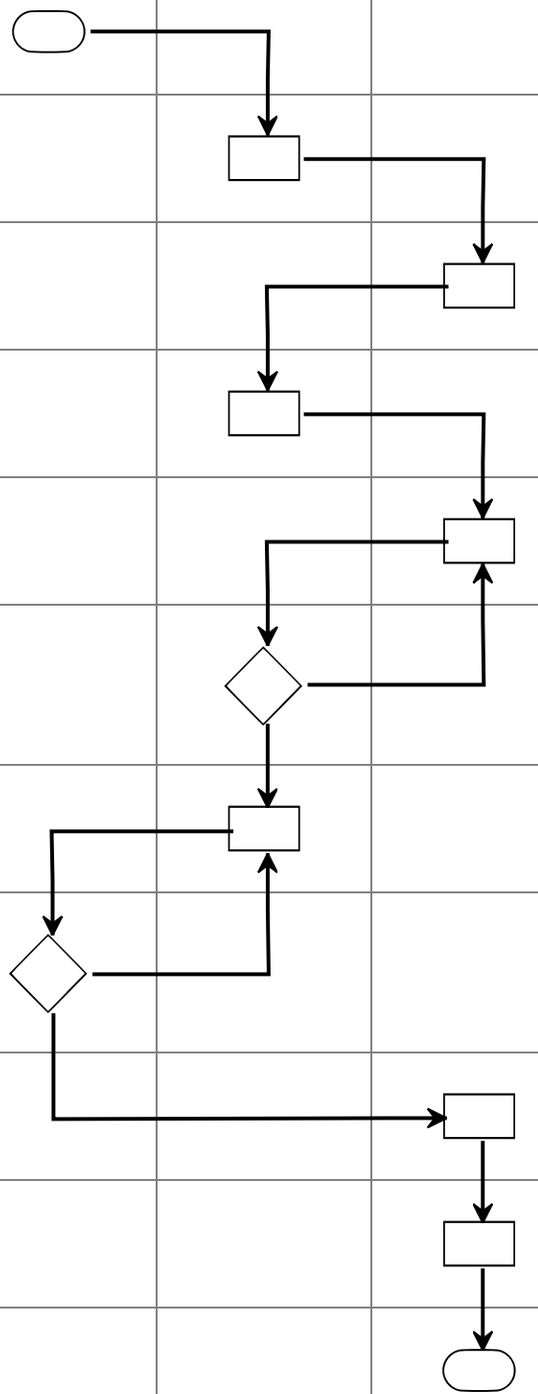


| | | |
|---|---|---|
| **KABUPATEN TUBAN**<br>**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** | Nomor SOP | 067/1421/414.104.1/2023 |
| | Tanggal Pembuatan | 23 Maret 2022 |
| | Tanggal Revisi | 26 September 2023 |
| | Tanggal Efektif | 26 September 2023 |
| | Disahkan Oleh | KEPALA<br>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN<br>KABUPATEN TUBAN<br><br>Drs. GUNADI, MM<br>19700412 199101 1 001 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Nama SOP | **PENGUKURAN KINERJA** |
| **DEFINISI** | | |

| **DASAR HUKUM** | **KUALIFIKASI PELAKSANA** |
|---|---|
| 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriintahan Daerah<br>2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)<br>3. Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br>4. Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan<br>5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 187 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban | 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait<br>2. Memahami sasaran dan capaian program<br>3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Inspektorat<br>4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA OPD |
| **KETERKAITAN** | **PERALATAN/PERLENGKAPAN** |
| 1. PENYUSUNAN RENSTRA<br>2. PENGUMPULAN DATA KINERJA<br>3. PENGELOLAAN SURAT MASUK | 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP<br>2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program<br>3. Alat tulis kantor, Komputer/Laptop dan Printer |
| **PERINGATAN** | **PENCATATAN DAN PENDATAAN** |
| 1. Apabila Pengukuran Kinerja tidak dilakukan sesuai SOP maka tidak terselesaikan dengan baik dan benar serta kegiatan pelaporan akan terhambat | 1. Terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy |

# SOP: PENGUKURAN KINERJA

| No | Kegiatan | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kasat | Sekretaris | Tim Sakip | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja | | | | Lembar disposisi | 15 Menit | disposisi Pimpinan | |
| 2 | Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat | | | | Form Pengukuran Kinerja | 60 Menit | Draf Pengukuran Kinerja | |
| 3 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat | | | | Form Pengukuran Kinerja | 25 Menit | Draf masukan dan arahan | |
| 4 | Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat | | | | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | 120 Menit | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 5 | Tim Sakip Menghimpun dan memvalidasi data kinerja | | | | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | 240 Menit | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 6 | Menyampaikan data kinerja kepada Sekretaris | | | | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | 40 Menit | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 7 | Sekretaris menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kepada Kasat untuk meminta persetujuan. | | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 25 Menit | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 8 | Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh Kasat | | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 10 Menit | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 9 | Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat | | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 15 Menit | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 10 | Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja. | | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 25 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 11 | Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja. | | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 10 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |



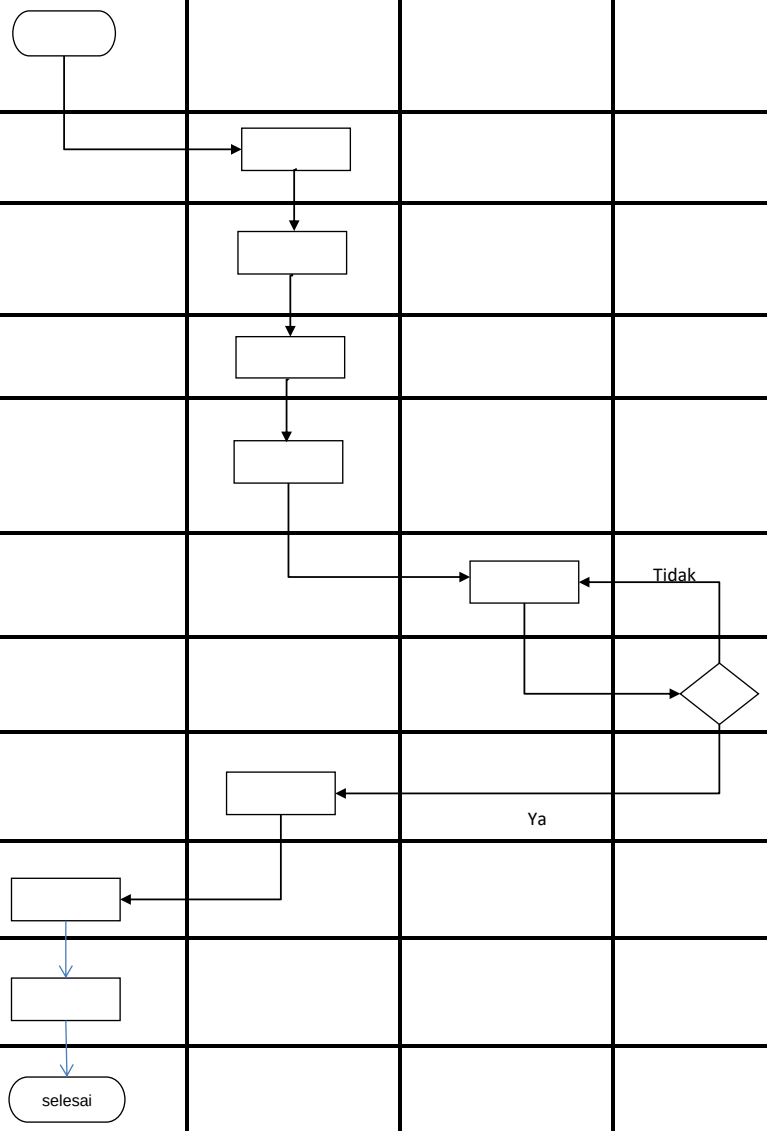
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
**DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN**

| | |
|---|---|
| **NOMOR SOP** | 067/389/414.104.1/2022 |
| **TGL.** | 25 Maret 2022 |
| **TGL. REVISI** | - |
| **TGL. EFEKTIF** | 25 Maret 2022 |
| **DISAHKAN OLEH** | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA<br>DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN<br><br>**Drs. GUNADI, MM**<br>NIP. 19700412 199101 1 001 |
| **NAMA SOP** | **PENYUSUNAN LAKIP/LKPJ/LPPD** |

| **DASAR HUKUM** | **KUALIFIKASI PELAKSANA** |
|---|---|
| 1. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah<br>2 Peraturan Bupati Tuban Nomor 187 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban | 1. Memahami kebijakan mengenai LAKIP<br>2. Memiliki pemahaman tentang LAKIP<br>3. Memiliki kemampuan menganalisa |
| **KETERKAITAN** | **PERALATAN PERLENGKAPAN** |
| 1. Renstra SKPD<br>2. Renja SKPD<br>3. DPA<br>4. CALK | 1. Pedoman penyusunan LAKIP<br>2. Profil kepegawaian. Data kepegawaian, DPA, CALK (laporan akhir tahun)<br>3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya |
| **PERINGATAN** | **PENCATATAN DAN PENDATAAN** |
| LAKIP/LKPJ/LPPD harus diselesaikan setiap akhir tahun | Buku dokumentasi LAKIP/LKPJ/LPPD |

**SOP : Penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD**

| NO | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Staf | Kasubag | Sekretaris | Kasat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mengumpulkan Data untuk penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD | | | | | Peraturan Perundang-Undangan yang terkait | 1 Minggu | Bahan Penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD | |
| 2 | Menyusun konsep LAKIP/LKPJ/LPPD | | | | | Bahan penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD | 3 Hari | Konsep LAKIP/LKPJ/LPPD | |
| 3 | Evaluasi LAKIP/LKPJ/LPPD periode lalu | | | | | Konsep LAKIP/LKPJ/LPPD | 3 jam | Catatan mengenai evaluasi | |
| 4 | Menyusun Draft LAKIP/LKPJ/LPPD | | | | | Konsep dan catatan mengenai LAKIP/LKPJ/LPPD | 2 Hari | Draft LAKIP/LKPJ/LPPD | |
| 5 | Mengajukan Draft LAKIP/LKPJ/LPPD kepada Sekretaris | | | | | Draft LAKIP/LKPJ/LPPD | 15 menit | Bukti pengajuan | |
| 6 | Mengajukan Draft LAKIP/LKPJ/LPPD kepada Kasat | | | | Tidak | Draft LAKIP/LKPJ/LPPD | 15 menit | Bukti Pengajuan | |
| 7 | Memeriksa draft LAKIP/LKPJ/LPPD. Jika setuju, ditandatangani dan diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki | | | | | Dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | 15 menit | Dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | |
| 8 | Menyerahkan kepada staf untuk digandakan | | | Ya | | Dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | 35 menit | Dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | |
| 9 | Menggandakan dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | | | | | Kelengkapan dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | 1 jam | Dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD yang digandakan | |
| 10 | Mengirim dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD kepada Bappeda | | | | | Dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD yang telah digandakan | 1 Hari | Bukti pengiriman dokumen | |
| 11 | Mengagendakan bukti pengiriman dan mengarsipkan dokumen LAKIP/LKPJ/LPPD | selesai | | | | Bukti Pengiriman | 10 menit | Dokumentasi bukti pengiriman | |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Drs. Gunadi, M.M. |
| NIK | : | 3523161204700005 |
| NIP | : | 197004121991011001 |
| Jabatan | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Aditya Halindra Faridzky, SE |
| Jabatan | : | Bupati Tuban |

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Tuban, 17 Januari 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Bupati Tuban | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **Aditya Halindra Faridzky, SE** | **Drs. Gunadi, M.M.** |
| | Pembina Utama Muda |
| | NIP. 197004121991011001 |

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**KABUPATEN TUBAN**

| Sasaran/Indikator | Target |
|---|---|
| 1. Tingkat Penurunan kasus/kejadian kebakaran | |
| - Persentase Penurunan Tingkat Kasus/Kejadian Kebakaran | 5 % |
| 2. Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah | |
| - Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah | 3 % |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 15.686.394.145 | DAU |
| 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.327.088.210 | DAU/ DBHCHT |
| 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 874.741.910 | DAU |
| **JUMLAH** | **21.888.224.265** | |

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,
Bupati Tuban



**Aditya Halindra Faridzky, SE**

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



**Drs. Gunadi, M.M.**
Pembina Utama Muda
NIP. 197004121991011001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWANTO, S.H., M.M.
NIK : 3523150303690008
NIP : 19690303 199003 1 007
Jabatan : Plt. KEPALA SATUAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE
Jabatan : BUPATI TUBAN
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Tuban, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

**ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE**

**SISWANTO, S.H., M.M.**
Pembina
NIP. 19690303 199003 1 007

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**KABUPATEN TUBAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | 85 |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran | Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time | 80 |
| 3. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 89,31 |

| | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp. 5.301.279.378 | PAPBD/DBHCHT |
| 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. 826.927.910 | PAPBD |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 13.227.082.841 | PAPBD |
| | **J U M L A H** | **Rp. 19.355.290.129** | |

Tuban, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

**ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE**

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

**SISWANTO, S.H., M.M.**
Pembina
NIP. 19690303 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311, Telp. (0356) 321003/321016
Website: https://satpolpp-damkar.tubankab.go.id Email: satpolppdamkarkabtuban@gmail.com

Tuban, 2 Januari 2026

Nomor : 100.1.7/ 3 /414.104.1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **U N D A N G A N**

Kepada
Yth. Pejabat Struktural dan JF Penyetaraan
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban
Di -
**T U B A N**

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026, maka perlu untuk melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi, dan perencanaan kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada::

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Senin |
| Tanggal | : | 5 Januari 2026 |
| Pukul | : | 08.00 WIB s/d selesai |
| Tempat | : | Ruang Rapat Lantai II Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban |
| Acara | : | 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025<br>2. Perencanaan Kinerja Tahun 2026 |

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tuban

**SISWANTO., S.H., M.M.**
Pembina
NIP. 19690303 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311, Telp. (0356) 321003/321016
Website: https://satpolpp-damkar.tubankab.go.id Email: satpolppdamkarkabtuban@gmail.com

# DATA HADIR RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA 2025 DAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2026

**Hari/Tanggal : Senin, 5 Januari 2026**

**Jam : 08.00 WIB s/d selesai**

**Tempat : Ruang Rapat Lantai II Satpol PP Damkar**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | [illegible] | KASATPOL PP DAN DAMKAR | 1 |
| 2 | Deny Susilo H | SEKRETARIS SATPOL PP DAN DAMKAR | |
| 3 | PARSONO | KABID PENYELENGGARAAN TRANTIBUM | 3 |
| 4 | Sutaji | KABID SDA DAN LINMAS | 4 |
| 5 | [illegible] | KABID PPUD | 5 |
| 6 | Sutaji | KABID DAMKAR | 6 |
| 7 | NUR RIZAL ADI.S | KASUBBAG KEUANGAN | 7 |
| 8 | Eka.w | KASUBBAG UMPEG | 8 |
| 9 | Lia Khasanah | KASUBBAG PROLAP | 9 |
| 10 | PARSONO | KASI KERJASAMA | 10 |
| 11 | Agus Suganto | KASI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | 11 |
| 12 | SUDARTO | KASI PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP DAN SATLINMAS | 12 |
| 13 | Anna Widiyati | KASI PEMBINAAN PPNS DAN JF LAINNYA | 13 |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Marduki | JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 14 |
| 15 | [illegible] | KASI PENGAWASAN, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN | 15 |
| 16 | Totok A. F | KASI SOSIALISASI DAN PENYEDIAAN LAYANAN | 16 |
| 17 | Gagut H | KASI OPERASI PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 17 |
| 18 | Hadi Supri | KASI PEMBINAAN APARATUR DAN INSPEKSI PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN | 18 |
| 19 | Zainal Mafid | JF ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 19 |

plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TUBAN,

**SISWANTO, SH., MM.**
Pembina
NIP. 19690303 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jalan Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311, Telepon ( 0356 ) 321003
Laman : https://satpolpp-damkar.tubankab.co.id Pos-el:sekretariat.satpolpptuban@gmail.com

**BERITA ACARA**
**PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA**
**PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
**KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025**
**Nomor : 100.1.7/ 09 /414.104.1/2026**

Pada Hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di ruang rapat lantai 2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan hasil sebagai berikut:

| No | Tujuan/ Sasaran / Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tujuan OPD: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis** | **Indeks Harmoni Indonesia (IHal)** | **Indeks** | **7,01** | **7,01** |
| | **Sasaran OPD: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)** | **Angka** | **85** | **87,04** |
| A. | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan | % | 100 | 100 |
| | | Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan | % | 100 | 100 |
| | | Persentase Satlinmas yang Aktif | % | 50 | 26,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan gangguan trantibum | % | 100 | 100 |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / Kota | % | 100 | 100 |
| 1. | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot | Dokumen | 4 | 4 |
| 2. | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 1 | 1 |
| 3. | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 0rang | 200 | 23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | Laporan | 12 | 12 |
| 5. | Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasakan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan | Laporan | 4 | 4 |
| 6. | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani | Laporan | 1 | 1 |
| | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada | Kegiatan | 165 | 169 |
| 1. | Sub Kegiatan Sosialiasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | 12 | 12 |
| 3. | Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP | Laporan | 2 | 2 |
| | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota | Kegiatan | 1 | 1 |
| 1. | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Laporan | 1 | 1 |
| | **Sasaran OPD : Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran** | **Persentase Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi *Response time*** | **%** | **80** | **83,33** |
| C. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Waktu Tanggap (*Response time*) Penanganan Kebakaran | Menit | 15 | 11,26 |
| | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya | Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran | % | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 |
| 1. | Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 |
| 2. | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Orang | 46 | 46 |
| 3. | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Unit | 28 | 28 |
| | **Sasaran: OPD Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah** | **Angka** | **89,31** | **89,12** |
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | Poin | 81.90 | 82,65 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun | Dokumen | 9 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah | Dokumen | 6 | 6 |
| 2. | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun | Dokumen | 3 | 3 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun | Jenis | 9 | 9 |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan | Orang | 91 | 107 |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 9 | 9 |
| 3. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 |
| 4. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 18 |
| 5. | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah jenis Layanan Kepegawaian | Jenis | 2 | 1 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 123 | 1 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum | Jenis | 6 | 6 |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 |
| 4. | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 3 |
| 5. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 1 |
| 6. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 20 | 25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah | Jenis | 4 | 4 |
| 1. | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 32 | 32 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 4 | 4 |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1 |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jenis | 4 | 4 |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 43 | 54 |
| 2. | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 11 | 11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangungan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 4 |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hadir dalam Rapat Pembahasan Capaian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | : | Siswanto, S.H., M.M.<br>NIP. 19690303 199003 1 007 | 1 ..... |
| 2. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban | | Deny Susilo H., S.STP, MM<br>NIP. 19800507 199810 1 001 | 2 ..... |
| 3. | Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | : | Eko Dadang Sudarwoko, S.H.<br>NIP. 19810219 201201 1 002 | 3 ..... |
| 4. | Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat | : | Sutaji, S.STP.<br>NIP. 19800108 199912 1 001 | 4 ..... |
| 5. | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah | : | Siswanto, S.H., M.M.<br>NIP. 19690303 199003 1 007 | 5 ..... |
| 6. | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran | : | Sutaji, S.STP.<br>NIP. 19800108 199912 1 001 | 6 ..... |
| 7. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | : | Eka Wahyuningsih, S.Sos.<br>NIP. 19780125 200212 2 008 | 7 ..... |
| 8. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | : | Lia Khasanah, S.Si.<br>NIP. 19810525 200501 2 015 | 8 ..... |

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
**REPUBLIK INDONESIA**

19 Januari 2026

Nomor : 300.5.6/e.70/BAK
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Hasil IPKKU Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pemutakhiran data Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) yang akan digunakan sebagai bahan pendukung penyusunan kebijakan serta instrumen pengukuran dan penilaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, bersama ini disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota hal sebagai berikut:

1. Dasar:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
   b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah; dan
   c. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor: 300.5.6/e.1165/BAK tanggal 13 Agustus 2025 hal Pengisian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1, hasil pengukuran terhadap pengisian kuesioner IPKKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
   a. Bahwa dari total sebanyak 552 daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang telah melakukan pengisian kuesioner IPKKU berjumlah 447 daerah dengan rincian 31 Provinsi, 332 Kabupaten, 84 Kota, dan terdapat 105 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pengisian. Adapun rincian kategori hasil penilaian IPKKU 2025 adalah sebagai berikut:
      1) 59 daerah atau 11% berada pada kategori Sangat Baik;
      2) 178 daerah atau 32% berada pada kategori Baik;
      3) 129 daerah atau 23% berada pada kategori Cukup Baik;
      4) 186 daerah atau 34% berada pada kategori Kurang Baik; dan
      5) Tidak terdapat daerah yang berada pada kategori Buruk.
   b. Hasil penilaian IPKKU Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar bagi Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk mengoordinasikan penilaian dimaksud kepada masing-masing Kasatpol PP dan unsur yang membidangi perencanaan dan penganggaran di daerah dalam memberikan dukungan pengalokasian anggaran untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
   c. Hasil penilaian IPKKU Tahun 2025 sebagaimana terlampir merupakan gambaran umum kinerja Satpol PP di daerah yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Hal-hal teknis lain berkaitan dengan hasil pengukuran IPKKU Tahun 2025 dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat, melalui Sdr. Iqbal Prakoso (082351052395) atau Sdri. Diftania (085716383226).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan



Safrizal ZA

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
4. Kasatpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Dirjen Bina Adwil
Nomor : 300.5.6/e.70/BAK
Tanggal : 19 Januari 2026

# REKAPITULASI NILAI INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| **Provinsi Aceh** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Aceh | 76,28 | 94,08 | 90,14 | 35,56 | 75,00 | 89,95 | 46,93 | 88,15 | 62,85 | 75,46 | 71,79 | Baik |
| 2 | Kabupaten Aceh Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Aceh Tenggara | 51,64 | 90,14 | 100,00 | 79,91 | 100,00 | 66,85 | 62,32 | 77,32 | 89,95 | 74,00 | 82,48 | Sangat Baik |
| 4 | Kabupaten Aceh Timur | 45,72 | 41,95 | 45,08 | 40,00 | 50,14 | 70,14 | 51,57 | 43,20 | 42,54 | 60,49 | 48,27 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Aceh Tengah | 54,50 | 65,24 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 61,66 | 33,33 | 33,33 | 38,94 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Aceh Barat | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Aceh Besar | 49,90 | 89,46 | 68,64 | 33,33 | 33,33 | 80,00 | 61,58 | 76,29 | 50,99 | 63,73 | 59,97 | Cukup Baik |
| 8 | Kabupaten Pidie | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Aceh Utara | 59,18 | 55,54 | 90,07 | 40,00 | 80,00 | 69,94 | 74,18 | 56,75 | 65,04 | 73,51 | 66,04 | Baik |
| 10 | Kabupaten Simeulue | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 11 | Kabupaten Aceh Singkil | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 12 | Kabupaten Bireuen | 40,00 | 37,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 51,53 | 38,22 | 33,33 | 37,88 | 35,72 | Kurang Baik |
| 13 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 15 | Kabupaten Aceh Jaya | 42,95 | 47,93 | 60,00 | 35,52 | 33,33 | 54,97 | 34,31 | 46,27 | 47,76 | 44,39 | 46,42 | Cukup Baik |
| 16 | Kabupaten Nagan Raya | 47,97 | 42,76 | 36,69 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 44,49 | 35,01 | 33,33 | 36,36 | Kurang Baik |
| 17 | Kabupaten Aceh Tamiang | 45,96 | 80,04 | 40,00 | 37,81 | 85,04 | 65,02 | 45,83 | 68,69 | 38,90 | 65,23 | 53,01 | Cukup Baik |
| 18 | Kabupaten Bener Meriah | 53,23 | 58,01 | 33,33 | 33,33 | 35,01 | 38,34 | 37,19 | 56,42 | 33,33 | 37,22 | 39,11 | Kurang Baik |
| 19 | Kabupaten Pidie Jaya | 38,15 | 35,31 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 34,29 | 36,26 | 33,33 | 33,57 | 33,99 | Kurang Baik |
| 20 | Kota Banda Aceh | 51,74 | 91,47 | 83,78 | 33,33 | 83,92 | 100,00 | 43,08 | 78,24 | 58,55 | 81,75 | 69,69 | Baik |
| 21 | Kota Sabang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 22 | Kota Lhokseumawe | 71,23 | 73,92 | 80,00 | 59,73 | 53,57 | 48,42 | 45,89 | 73,02 | 69,87 | 49,07 | 64,00 | Baik |
| 23 | Kota Langsa | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 24 | Kota Subulussalam | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sumatera Utara | 50,76 | 64,05 | 66,85 | 35,52 | 83,07 | 68,01 | 62,32 | 59,62 | 51,19 | 70,35 | 58,84 | Cukup Baik |
| 2 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 42,19 | 60,64 | 33,33 | 33,33 | 50,12 | 33,33 | 33,33 | 54,50 | 33,33 | 37,53 | 38,83 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Tapanuli Utara | 60,44 | 61,48 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 61,14 | 33,33 | 33,33 | 38,84 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 4 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 37,18 | 38,70 | 56,99 | 35,57 | 40,08 | 69,94 | 40,11 | 38,20 | 46,28 | 55,01 | 47,41 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Nias | 41,24 | 50,82 | 60,00 | 37,81 | 60,00 | 59,96 | 43,06 | 47,63 | 48,90 | 55,75 | 50,79 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Langkat | 78,57 | 51,79 | 67,13 | 33,33 | 50,12 | 51,63 | 43,08 | 60,71 | 50,23 | 49,12 | 51,96 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Karo | 60,33 | 50,38 | 73,72 | 57,90 | 65,08 | 100,00 | 51,68 | 53,69 | 65,81 | 79,19 | 67,59 | Baik |
| 8 | Kabupaten Deli Serdang | 79,04 | 85,28 | 83,78 | 71,38 | 100,00 | 64,80 | 73,95 | 83,21 | 77,58 | 75,89 | 78,16 | Baik |
| 9 | Kabupaten Simalungun | 60,18 | 55,79 | 100,00 | 46,70 | 74,96 | 100,00 | 76,88 | 57,25 | 73,35 | 87,96 | 74,72 | Baik |
| 10 | Kabupaten Asahan | 52,56 | 59,50 | 64,87 | 40,00 | 75,00 | 85,07 | 49,09 | 57,19 | 52,43 | 73,56 | 59,97 | Cukup Baik |
| 11 | Kabupaten Labuhanbatu | 37,13 | 64,65 | 100,00 | 33,33 | 65,25 | 89,94 | 35,27 | 55,48 | 66,67 | 70,10 | 65,52 | Baik |
| 12 | Kabupaten Dairi | 54,54 | 45,40 | 100,00 | 37,81 | 55,20 | 74,85 | 64,57 | 48,44 | 68,90 | 67,37 | 64,37 | Baik |
| 13 | Kabupaten Toba | 56,51 | 82,89 | 56,83 | 33,33 | 45,08 | 84,91 | 63,45 | 74,10 | 45,08 | 69,59 | 58,47 | Cukup Baik |
| 14 | Kabupaten Mandailing Natal | 49,90 | 44,67 | 100,00 | 40,00 | 33,33 | 94,97 | 65,05 | 46,41 | 70,00 | 72,08 | 65,98 | Baik |
| 15 | Kabupaten Nias Selatan | 76,08 | 62,93 | 68,64 | 44,49 | 48,51 | 69,94 | 53,83 | 67,31 | 56,57 | 60,55 | 59,94 | Cukup Baik |
| 16 | Kabupaten Pakpak Bharat | 40,68 | 38,67 | 46,85 | 35,57 | 40,10 | 35,01 | 33,33 | 39,34 | 41,21 | 35,86 | 39,17 | Kurang Baik |
| 17 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 65,83 | 76,78 | 60,00 | 37,81 | 38,32 | 40,00 | 43,94 | 73,13 | 48,90 | 40,57 | 51,10 | Cukup Baik |
| 18 | Kabupaten Samosir | 73,55 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 46,72 | 33,33 | 33,33 | 35,98 | Kurang Baik |
| 19 | Kabupaten Serdang Bedagai | 59,28 | 66,26 | 40,00 | 35,57 | 38,39 | 74,92 | 43,91 | 63,93 | 37,79 | 58,04 | 49,28 | Cukup Baik |
| 20 | Kabupaten Batu Bara | 61,15 | 73,43 | 56,83 | 33,33 | 45,18 | 74,98 | 64,26 | 69,34 | 45,08 | 64,85 | 56,05 | Cukup Baik |
| 21 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 79,91 | 72,01 | 85,06 | 60,00 | 65,06 | 89,95 | 74,05 | 74,64 | 72,53 | 79,75 | 75,20 | Baik |
| 22 | Kabupaten Padang Lawas | 48,83 | 57,17 | 60,00 | 33,33 | 73,05 | 89,86 | 44,46 | 54,39 | 46,67 | 74,31 | 56,82 | Cukup Baik |
| 23 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 75,13 | 76,51 | 40,08 | 33,33 | 40,05 | 60,00 | 41,03 | 76,05 | 36,70 | 50,27 | 48,73 | Cukup Baik |
| 24 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 68,02 | 65,83 | 100,00 | 44,53 | 78,88 | 84,91 | 51,67 | 66,56 | 72,27 | 75,09 | 72,02 | Baik |
| 25 | Kabupaten Nias Utara | 49,60 | 68,05 | 68,64 | 33,33 | 33,33 | 53,05 | 40,11 | 61,91 | 50,99 | 44,89 | 51,25 | Cukup Baik |
| 26 | Kabupaten Nias Barat | 35,29 | 37,33 | 33,33 | 33,33 | 36,70 | 35,02 | 33,33 | 36,65 | 33,33 | 35,02 | 34,51 | Kurang Baik |
| 27 | Kota Medan | 70,90 | 80,45 | 100,00 | 78,08 | 70,08 | 70,06 | 42,86 | 77,27 | 89,04 | 63,27 | 78,67 | Baik |
| 28 | Kota Pematangsiantar | 78,30 | 85,22 | 83,78 | 33,33 | 66,27 | 84,91 | 52,64 | 82,92 | 58,55 | 72,18 | 67,63 | Baik |
| 29 | Kota Sibolga | 55,51 | 48,29 | 35,02 | 33,33 | 46,78 | 43,22 | 33,33 | 50,70 | 34,17 | 41,64 | 39,77 | Kurang Baik |
| 30 | Kota Tanjungbalai | 72,63 | 81,59 | 33,33 | 33,33 | 73,49 | 54,97 | 56,75 | 78,61 | 33,33 | 60,04 | 50,63 | Cukup Baik |
| 31 | Kota Binjai | 66,10 | 77,16 | 38,38 | 33,33 | 60,30 | 43,43 | 36,22 | 73,47 | 35,85 | 45,84 | 46,42 | Cukup Baik |
| 32 | Kota Tebing Tinggi | 40,28 | 78,43 | 80,00 | 33,33 | 46,86 | 74,97 | 47,90 | 65,72 | 56,67 | 61,17 | 59,87 | Cukup Baik |
| 33 | Kota Padangsidimpuan | 58,28 | 79,91 | 53,53 | 50,92 | 80,00 | 94,97 | 71,02 | 72,70 | 52,22 | 85,24 | 66,58 | Baik |
| 34 | Kota Gunungsitoli | 60,23 | 44,01 | 35,02 | 33,33 | 33,33 | 40,04 | 39,17 | 49,41 | 34,18 | 38,15 | 38,43 | Kurang Baik |
| **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sumatera Barat | 62,95 | 91,51 | 75,01 | 60,09 | 69,92 | 84,91 | 91,20 | 82,00 | 67,55 | 82,73 | 75,15 | Baik |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Solok | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 68,98 | 91,51 | 65,08 | 66,73 | 90,35 | 78,24 | 68,15 | 84,01 | 65,90 | 78,75 | 73,49 | Baik |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 68,98 | 66,43 | 56,99 | 40,00 | 55,11 | 40,00 | 43,07 | 67,28 | 48,50 | 44,55 | 50,98 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Agam | 59,26 | 72,20 | 44,99 | 46,58 | 49,90 | 94,97 | 47,91 | 67,89 | 45,79 | 71,94 | 58,32 | Cukup Baik |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 59,86 | 52,07 | 80,00 | 66,82 | 75,18 | 69,94 | 62,34 | 54,66 | 73,41 | 69,35 | 68,43 | Baik |
| 12 | Kabupaten Solok Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 13 | Kabupaten Pasaman Barat | 63,06 | 76,13 | 80,08 | 80,27 | 90,35 | 84,91 | 77,10 | 71,78 | 80,18 | 84,32 | 79,80 | Baik |
| 14 | Kota Padang | 79,11 | 85,19 | 70,07 | 66,85 | 84,89 | 84,91 | 82,53 | 83,17 | 68,46 | 84,31 | 76,32 | Baik |
| 15 | Kota Solok | 50,86 | 79,08 | 33,33 | 55,75 | 33,33 | 51,56 | 47,37 | 69,68 | 44,54 | 45,95 | 49,96 | Cukup Baik |
| 16 | Kota Sawahlunto | 48,81 | 67,72 | 53,34 | 35,52 | 43,14 | 58,42 | 42,08 | 61,42 | 44,43 | 50,52 | 49,69 | Cukup Baik |
| 17 | Kota Padang Panjang | 62,20 | 60,45 | 56,99 | 35,52 | 56,90 | 40,00 | 42,07 | 61,03 | 46,26 | 44,74 | 48,71 | Cukup Baik |
| 18 | Kota Bukittinggi | 81,95 | 79,19 | 51,75 | 80,27 | 78,31 | 84,91 | 71,53 | 80,11 | 66,01 | 79,91 | 73,14 | Baik |
| 19 | Kota Payakumbuh | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 20 | Kota Pariaman | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Riau** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Riau | 42,03 | 42,11 | 100,00 | 46,73 | 85,04 | 74,92 | 52,64 | 42,09 | 73,36 | 71,88 | 66,71 | Baik |
| 2 | Kabupaten Kampar | 54,61 | 44,07 | 100,00 | 40,00 | 69,92 | 69,94 | 68,35 | 47,58 | 70,00 | 69,54 | 65,42 | Baik |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hulu | 91,43 | 73,93 | 68,64 | 53,27 | 65,31 | 84,91 | 66,86 | 79,76 | 60,96 | 75,50 | 69,22 | Baik |
| 4 | Kabupaten Bengkalis | 53,72 | 72,87 | 90,27 | 35,52 | 75,11 | 84,91 | 68,09 | 66,49 | 62,89 | 78,26 | 68,40 | Baik |
| 5 | Kabupaten Indragiri Hilir | 74,16 | 79,96 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 84,91 | 73,95 | 78,03 | 90,00 | 85,94 | 86,36 | Sangat Baik |
| 6 | Kabupaten Pelalawan | 79,02 | 53,38 | 68,64 | 46,70 | 48,55 | 65,02 | 46,91 | 61,92 | 57,67 | 56,38 | 58,11 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Rokan Hulu | 82,68 | 37,40 | 100,00 | 46,70 | 84,89 | 84,91 | 64,27 | 52,48 | 73,35 | 79,74 | 71,21 | Baik |
| 8 | Kabupaten Rokan Hilir | 79,78 | 77,67 | 55,13 | 60,00 | 38,31 | 40,00 | 49,81 | 78,37 | 57,57 | 42,03 | 56,84 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Siak | 59,43 | 68,18 | 83,78 | 40,00 | 33,33 | 33,33 | 40,16 | 65,26 | 61,89 | 35,04 | 54,18 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Kuantan Singingi | 59,36 | 86,05 | 68,79 | 60,09 | 85,31 | 84,91 | 73,95 | 77,17 | 64,44 | 82,27 | 72,52 | Baik |
| 11 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 42,01 | 46,01 | 95,13 | 37,81 | 33,33 | 59,96 | 62,34 | 44,68 | 66,47 | 53,90 | 58,23 | Cukup Baik |
| 12 | Kota Pekanbaru | 70,29 | 77,48 | 33,33 | 42,10 | 33,33 | 66,85 | 43,08 | 75,09 | 37,72 | 52,53 | 49,74 | Cukup Baik |
| 13 | Kota Dumai | 70,85 | 68,72 | 85,20 | 64,22 | 85,04 | 89,90 | 59,37 | 69,43 | 74,71 | 81,05 | 75,65 | Baik |
| **Provinsi Jambi** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Jambi | 59,49 | 91,51 | 80,00 | 40,00 | 53,28 | 54,97 | 50,74 | 80,85 | 60,00 | 53,49 | 62,10 | Baik |
| 2 | Kabupaten Kerinci | 39,03 | 50,33 | 33,33 | 33,33 | 35,01 | 33,33 | 34,29 | 46,57 | 33,33 | 33,99 | 36,16 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Merangin | 60,33 | 51,11 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 39,88 | 36,76 | 54,18 | 33,33 | 37,47 | 38,75 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Sarolangun | 46,96 | 52,60 | 35,02 | 33,33 | 41,46 | 43,43 | 35,27 | 50,72 | 34,17 | 40,90 | 39,55 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Batanghari | 77,26 | 76,18 | 68,64 | 78,08 | 83,21 | 94,97 | 73,95 | 76,54 | 73,36 | 86,77 | 78,17 | Baik |
| 6 | Kabupaten Muaro Jambi | 53,72 | 66,65 | 73,72 | 35,57 | 40,10 | 83,23 | 38,13 | 62,35 | 54,65 | 61,17 | 58,21 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 67,51 | 86,23 | 66,85 | 42,30 | 58,07 | 58,30 | 43,08 | 79,99 | 54,57 | 54,44 | 59,57 | Cukup Baik |
| 8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 64,88 | 61,72 | 60,00 | 37,77 | 41,78 | 54,97 | 46,84 | 62,77 | 48,88 | 49,64 | 51,87 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Bungo | 50,74 | 94,05 | 33,33 | 33,33 | 79,77 | 94,97 | 85,82 | 79,63 | 33,33 | 88,88 | 59,83 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Tebo | 72,85 | 77,15 | 89,86 | 33,33 | 43,39 | 84,91 | 33,33 | 75,72 | 61,60 | 61,63 | 64,40 | Baik |
| 11 | Kota Jambi | 85,01 | 75,90 | 70,07 | 57,98 | 83,21 | 84,91 | 72,17 | 78,94 | 64,03 | 81,30 | 72,37 | Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 12 | Kota Sungai Penuh | 61,67 | 85,38 | 33,33 | 33,33 | 38,39 | 74,85 | 62,34 | 77,49 | 33,33 | 62,61 | 51,21 | Cukup Baik |
| **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sumatera Selatan | 45,85 | 38,06 | 53,51 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 40,65 | 43,42 | 33,33 | 39,72 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 54,64 | 61,40 | 70,06 | 51,23 | 65,06 | 75,09 | 54,53 | 59,15 | 60,64 | 67,44 | 62,47 | Baik |
| 3 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 33,33 | 45,41 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 41,39 | 33,33 | 33,33 | 34,93 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Muara Enim | 68,60 | 82,27 | 80,00 | 46,73 | 94,92 | 84,91 | 73,95 | 77,72 | 63,36 | 84,67 | 72,85 | Baik |
| 5 | Kabupaten Lahat | 68,98 | 71,96 | 50,20 | 55,75 | 46,79 | 73,24 | 37,23 | 70,96 | 52,98 | 57,63 | 57,99 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Musi Rawas | 80,03 | 78,32 | 80,00 | 59,88 | 90,35 | 89,94 | 94,18 | 78,89 | 69,94 | 91,10 | 78,31 | Baik |
| 7 | Kabupaten Musi Banyuasin | 84,82 | 73,66 | 83,78 | 40,00 | 94,96 | 94,97 | 77,38 | 77,38 | 61,89 | 90,57 | 73,90 | Baik |
| 8 | Kabupaten Banyuasin | 82,87 | 86,33 | 80,00 | 78,08 | 44,82 | 75,01 | 39,14 | 85,18 | 79,04 | 58,50 | 73,85 | Baik |
| 9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 45,74 | 45,46 | 33,33 | 33,33 | 56,99 | 46,48 | 37,23 | 45,55 | 33,33 | 46,79 | 39,95 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 43,12 | 55,56 | 66,90 | 35,57 | 65,12 | 84,91 | 37,23 | 51,42 | 51,24 | 68,04 | 56,52 | Cukup Baik |
| 11 | Kabupaten Ogan Ilir | 59,21 | 78,29 | 85,19 | 53,42 | 75,00 | 64,99 | 60,03 | 71,94 | 69,31 | 66,25 | 68,87 | Baik |
| 12 | Kabupaten Empat Lawang | 48,66 | 60,00 | 60,00 | 73,30 | 74,92 | 74,97 | 68,35 | 56,22 | 66,65 | 73,30 | 66,66 | Baik |
| 13 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 49,74 | 82,19 | 63,58 | 37,77 | 46,85 | 68,01 | 49,84 | 71,39 | 50,67 | 58,18 | 57,12 | Cukup Baik |
| 14 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 68,98 | 85,04 | 46,85 | 33,33 | 85,04 | 69,94 | 60,30 | 79,69 | 40,09 | 71,30 | 57,67 | Cukup Baik |
| 15 | Kota Palembang | 60,94 | 61,38 | 38,38 | 40,00 | 53,55 | 74,77 | 42,05 | 61,23 | 39,19 | 61,28 | 50,45 | Cukup Baik |
| 16 | Kota Pagar Alam | 44,87 | 43,22 | 33,33 | 35,57 | 33,33 | 35,02 | 34,30 | 43,77 | 34,45 | 34,42 | 36,29 | Kurang Baik |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 60,37 | 69,25 | 60,00 | 42,30 | 65,02 | 74,82 | 62,90 | 66,30 | 51,15 | 69,39 | 59,84 | Cukup Baik |
| 18 | Kota. Prabumulih | 58,96 | 59,46 | 36,69 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 59,29 | 35,01 | 33,33 | 39,29 | Kurang Baik |
| **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Provinsi Bengkulu** | 64,22 | 86,33 | 58,52 | 40,00 | 60,17 | 84,91 | 44,83 | 78,97 | 49,26 | 68,70 | 61,21 | Baik |
| 2 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 48,72 | 58,80 | 74,94 | 64,65 | 90,35 | 84,91 | 68,63 | 55,44 | 69,80 | 82,20 | 70,82 | Baik |
| 3 | Kabupaten Rejang Lebong | 88,64 | 62,17 | 33,33 | 64,65 | 41,45 | 50,02 | 34,31 | 70,99 | 48,99 | 43,95 | 51,77 | Cukup Baik |
| 4 | Kabupaten Bengkulu Utara | 61,78 | 43,37 | 60,00 | 37,77 | 38,39 | 49,98 | 50,74 | 49,50 | 48,88 | 47,27 | 48,50 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Kaur | 45,55 | 43,43 | 68,64 | 33,33 | 46,86 | 58,11 | 42,97 | 44,14 | 50,99 | 51,51 | 49,80 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Seluma | 51,30 | 46,16 | 33,33 | 35,57 | 33,33 | 51,62 | 37,23 | 47,87 | 34,45 | 43,45 | 39,92 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Mukomuko | 53,40 | 61,61 | 33,33 | 33,33 | 36,70 | 34,97 | 37,18 | 58,88 | 33,33 | 35,95 | 39,21 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Lebong | 39,05 | 60,44 | 74,94 | 33,33 | 79,83 | 74,85 | 61,58 | 53,32 | 54,13 | 72,78 | 59,79 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Kepahiang | 59,22 | 59,71 | 54,98 | 35,56 | 53,43 | 48,21 | 46,80 | 59,54 | 45,27 | 49,16 | 49,31 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 46,61 | 37,35 | 33,33 | 44,49 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 40,43 | 38,91 | 33,33 | 37,47 | Kurang Baik |
| 11 | Kota Bengkulu | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Lampung** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Lampung | 69,91 | 72,32 | 100,00 | 53,30 | 100,00 | 84,91 | 72,00 | 71,52 | 76,65 | 85,45 | 78,38 | Baik |
| 2 | Kabupaten Lampung Selatan | 64,16 | 85,72 | 100,00 | 46,73 | 84,89 | 84,91 | 82,53 | 78,54 | 73,36 | 84,31 | 77,80 | Baik |
| 3 | Kabupaten Lampung Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 4 | Kabupaten Lampung Utara | 60,26 | 38,67 | 33,33 | 35,52 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 45,86 | 34,43 | 33,33 | 36,35 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Lampung Barat | 40,14 | 56,56 | 83,78 | 33,33 | 56,97 | 79,84 | 51,70 | 51,09 | 58,55 | 67,09 | 59,74 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Tulang Bawang | 50,77 | 44,07 | 80,00 | 40,00 | 69,88 | 74,97 | 40,16 | 46,30 | 60,00 | 64,99 | 58,85 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Tanggamus | 52,61 | 59,44 | 85,08 | 51,23 | 64,82 | 74,97 | 62,34 | 57,16 | 68,15 | 69,28 | 66,33 | Baik |
| 8 | Kabupaten Lampung Timur | 53,48 | 80,97 | 53,51 | 40,00 | 43,39 | 84,91 | 55,48 | 71,82 | 46,76 | 67,17 | 58,09 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Way Kanan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Pesawaran | 43,10 | 52,90 | 100,00 | 35,57 | 84,89 | 100,00 | 64,27 | 49,64 | 67,79 | 87,29 | 70,28 | Baik |
| 11 | Kabupaten Pringsewu | 75,23 | 87,47 | 100,00 | 73,42 | 70,12 | 84,91 | 77,42 | 83,39 | 86,71 | 79,34 | 83,76 | Sangat Baik |
| 12 | Kabupaten Mesuji | 64,17 | 75,94 | 100,00 | 60,18 | 83,21 | 89,94 | 94,18 | 72,02 | 80,09 | 89,31 | 81,37 | Sangat Baik |
| 13 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 14 | Kabupaten Pesisir Barat | 60,18 | 62,03 | 69,86 | 60,00 | 46,51 | 80,00 | 64,78 | 61,42 | 64,93 | 67,82 | 65,14 | Baik |
| 15 | Kota Bandar Lampung | 73,48 | 85,71 | 83,78 | 37,77 | 33,33 | 39,88 | 33,33 | 81,64 | 60,77 | 36,61 | 57,36 | Cukup Baik |
| 16 | Kota Metro | 51,52 | 39,34 | 33,33 | 33,33 | 36,63 | 36,66 | 35,15 | 43,40 | 33,33 | 36,27 | 36,24 | Kurang Baik |
| **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 77,11 | 92,16 | 90,07 | 79,88 | 80,00 | 100,00 | 80,18 | 87,15 | 84,98 | 90,05 | 86,99 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Bangka | 72,62 | 75,55 | 38,38 | 33,33 | 38,39 | 84,91 | 52,57 | 74,57 | 35,85 | 65,19 | 52,67 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Belitung | 63,96 | 68,84 | 84,87 | 51,23 | 50,12 | 84,91 | 73,83 | 67,22 | 68,05 | 73,44 | 69,57 | Baik |
| 4 | Kabupaten Bangka Selatan | 76,37 | 95,90 | 70,27 | 73,54 | 65,06 | 51,86 | 61,38 | 89,40 | 71,90 | 57,54 | 70,89 | Baik |
| 5 | Kabupaten Bangka Tengah | 68,98 | 73,01 | 83,78 | 77,58 | 83,92 | 83,11 | 81,80 | 71,67 | 80,68 | 82,98 | 79,61 | Baik |
| 6 | Kabupaten Bangka Barat | 47,72 | 47,06 | 36,65 | 37,81 | 38,39 | 40,00 | 34,31 | 47,28 | 37,23 | 38,17 | 39,51 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Belitung Timur | 83,16 | 73,89 | 75,15 | 60,18 | 75,24 | 74,77 | 82,53 | 76,98 | 67,66 | 76,83 | 72,37 | Baik |
| 8 | Kota Pangkal Pinang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kepulauan Riau | 76,06 | 86,17 | 100,00 | 40,00 | 84,89 | 89,94 | 100,00 | 82,80 | 70,00 | 91,19 | 79,15 | Baik |
| 2 | Kabupaten Bintan | 74,50 | 67,26 | 100,00 | 66,85 | 68,81 | 84,91 | 82,53 | 69,67 | 83,42 | 80,29 | 79,72 | Baik |
| 3 | Kabupaten Karimun | 47,76 | 60,14 | 89,86 | 33,33 | 55,11 | 54,96 | 72,97 | 56,02 | 61,60 | 59,50 | 59,84 | Cukup Baik |
| 4 | Kabupaten Natuna | 50,81 | 67,28 | 100,00 | 40,00 | 84,89 | 68,28 | 53,73 | 61,79 | 70,00 | 68,79 | 68,00 | Baik |
| 5 | Kabupaten Lingga | 73,58 | 83,81 | 70,07 | 64,65 | 100,00 | 74,90 | 82,53 | 80,40 | 67,36 | 83,08 | 74,85 | Baik |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 53,73 | 79,50 | 46,85 | 44,34 | 33,33 | 69,98 | 40,16 | 70,92 | 45,60 | 53,36 | 53,03 | Cukup Baik |
| 7 | Kota Batam | 80,00 | 85,42 | 74,94 | 86,70 | 90,35 | 100,00 | 91,35 | 83,61 | 80,82 | 95,42 | 85,93 | Sangat Baik |
| 8 | Kota Tanjung Pinang | 55,05 | 41,27 | 33,33 | 33,33 | 45,04 | 49,90 | 39,13 | 45,86 | 33,33 | 45,99 | 39,76 | Kurang Baik |
| **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | 88,64 | 88,28 | 85,06 | 86,85 | 85,04 | 79,88 | 85,82 | 88,40 | 85,95 | 82,66 | 85,41 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Adm Kepulauan Seribu | 58,10 | 54,55 | 33,33 | 37,77 | 38,32 | 33,33 | 34,29 | 55,74 | 35,55 | 34,82 | 39,32 | Kurang Baik |
| 3 | Kota Adm Jakarta Pusat | 77,87 | 86,76 | 33,33 | 33,33 | 94,94 | 80,00 | 81,80 | 83,80 | 33,33 | 84,18 | 59,19 | Cukup Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 4 | Kota Adm Jakarta Utara | 77,40 | 75,24 | 70,12 | 66,87 | 79,81 | 100,00 | 82,53 | 75,96 | 68,50 | 90,58 | 76,87 | Baik |
| 5 | Kota Adm Jakarta Barat | 80,75 | 80,02 | 33,33 | 73,42 | 51,87 | 58,05 | 36,23 | 80,27 | 53,38 | 51,05 | 57,98 | Cukup Baik |
| 6 | Kota Adm Jakarta Selatan | 50,82 | 45,24 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 34,97 | 33,33 | 47,10 | 33,33 | 34,15 | 36,31 | Kurang Baik |
| 7 | Kota Adm Jakarta Timur | 60,18 | 74,18 | 65,06 | 66,58 | 70,08 | 70,06 | 65,29 | 69,52 | 65,82 | 68,87 | 67,50 | Baik |
| **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Jawa Barat | 87,70 | 84,77 | 94,94 | 51,07 | 90,35 | 84,91 | 43,08 | 85,75 | 73,00 | 75,81 | 76,40 | Baik |
| 2 | Kabupaten Bogor | 88,64 | 92,16 | 100,00 | 80,27 | 100,00 | 84,91 | 100,00 | 90,98 | 90,13 | 92,45 | 91,03 | Sangat Baik |
| 3 | Kabupaten Sukabumi | 82,23 | 41,43 | 80,00 | 37,81 | 83,21 | 84,91 | 73,95 | 55,01 | 58,90 | 81,74 | 65,26 | Baik |
| 4 | Kabupaten Cianjur | 78,57 | 97,97 | 74,92 | 40,00 | 60,02 | 65,02 | 74,52 | 91,51 | 57,46 | 66,15 | 66,91 | Baik |
| 5 | Kabupaten Bandung | 88,64 | 97,97 | 100,00 | 55,75 | 100,00 | 84,91 | 76,88 | 94,86 | 77,88 | 86,67 | 83,98 | Sangat Baik |
| 6 | Kabupaten Garut | 71,58 | 65,96 | 75,13 | 53,42 | 65,06 | 74,85 | 71,64 | 67,83 | 64,28 | 71,60 | 67,27 | Baik |
| 7 | Kabupaten Tasikmalaya | 68,49 | 52,96 | 100,00 | 37,81 | 40,00 | 84,91 | 73,95 | 58,13 | 68,90 | 70,94 | 67,41 | Baik |
| 8 | Kabupaten Ciamis | 59,40 | 56,50 | 100,00 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 72,97 | 57,47 | 66,67 | 93,24 | 73,14 | Baik |
| 9 | Kabupaten Kuningan | 80,17 | 45,31 | 40,10 | 33,33 | 33,33 | 94,97 | 57,33 | 56,92 | 36,72 | 70,15 | 51,15 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Cirebon | 76,87 | 86,23 | 80,00 | 57,98 | 69,92 | 69,94 | 68,35 | 83,11 | 68,99 | 69,54 | 71,96 | Baik |
| 11 | Kabupaten Majalengka | 69,43 | 79,08 | 90,07 | 93,30 | 69,95 | 68,52 | 53,65 | 75,86 | 91,69 | 65,16 | 80,28 | Sangat Baik |
| 12 | Kabupaten Sumedang | 71,16 | 57,95 | 100,00 | 40,00 | 51,94 | 84,91 | 44,06 | 62,35 | 70,00 | 66,45 | 67,38 | Baik |
| 13 | Kabupaten Indramayu | 54,59 | 92,16 | 90,06 | 60,12 | 64,82 | 89,98 | 80,00 | 79,65 | 75,09 | 81,20 | 77,90 | Baik |
| 14 | Kabupaten Subang | 87,70 | 91,51 | 100,00 | 40,00 | 83,21 | 84,91 | 82,53 | 90,24 | 70,00 | 83,89 | 78,34 | Baik |
| 15 | Kabupaten Purwakarta | 69,91 | 92,16 | 90,07 | 60,18 | 84,89 | 84,91 | 73,95 | 84,75 | 75,12 | 82,16 | 79,23 | Baik |
| 16 | Kabupaten Karawang | 69,08 | 91,51 | 83,78 | 60,09 | 100,00 | 63,54 | 68,17 | 84,04 | 71,93 | 73,81 | 74,92 | Baik |
| 17 | Kabupaten Bekasi | 74,94 | 87,61 | 95,13 | 80,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,39 | 87,70 | 100,00 | 90,69 | Sangat Baik |
| 18 | Kabupaten Bandung Barat | 51,54 | 43,44 | 85,20 | 60,00 | 65,08 | 95,01 | 68,71 | 46,14 | 72,60 | 80,95 | 69,97 | Baik |
| 19 | Kabupaten Pangandaran | 48,56 | 62,99 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 34,29 | 58,18 | 33,33 | 33,57 | 38,33 | Kurang Baik |
| 20 | Kota Bogor | 71,46 | 74,07 | 94,94 | 100,00 | 100,00 | 74,93 | 79,87 | 73,20 | 97,47 | 82,43 | 87,97 | Sangat Baik |
| 21 | Kota Sukabumi | 60,45 | 76,57 | 83,78 | 33,33 | 80,23 | 84,91 | 79,96 | 71,20 | 58,55 | 82,50 | 68,53 | Baik |
| 22 | Kota Bandung | 74,09 | 79,95 | 79,93 | 93,42 | 100,00 | 95,09 | 100,00 | 78,00 | 86,68 | 97,54 | 88,35 | Sangat Baik |
| 23 | Kota Cirebon | 67,98 | 85,97 | 83,78 | 57,50 | 100,00 | 68,28 | 72,98 | 79,98 | 70,64 | 77,39 | 74,59 | Baik |
| 24 | Kota Bekasi | 57,16 | 78,48 | 100,00 | 40,00 | 100,00 | 94,97 | 97,07 | 71,38 | 70,00 | 96,75 | 78,62 | Baik |
| 25 | Kota Depok | 71,79 | 92,16 | 100,00 | 46,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,37 | 73,36 | 100,00 | 84,05 | Sangat Baik |
| 26 | Kota Cimahi | 53,36 | 64,04 | 74,94 | 80,00 | 70,12 | 80,00 | 88,66 | 60,48 | 77,47 | 79,69 | 74,80 | Baik |
| 27 | Kota Tasikmalaya | 55,10 | 69,80 | 60,00 | 37,81 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 64,91 | 48,90 | 83,33 | 62,81 | Baik |
| 28 | Kota Banjar | 71,65 | 92,16 | 85,06 | 60,18 | 100,00 | 84,91 | 74,46 | 85,33 | 72,62 | 86,07 | 79,33 | Baik |
| **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Jawa Tengah | 85,79 | 97,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82,53 | 93,91 | 100,00 | 95,63 | 97,43 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Cilacap | 67,94 | 60,10 | 80,14 | 78,08 | 80,19 | 94,93 | 72,98 | 62,71 | 79,11 | 85,76 | 77,94 | Baik |
| 3 | Kabupaten Banyumas | 82,87 | 92,16 | 90,07 | 80,27 | 80,28 | 89,94 | 91,55 | 89,06 | 85,17 | 87,92 | 86,80 | Sangat Baik |
| 4 | Kabupaten Purbalingga | 63,04 | 94,01 | 90,07 | 46,58 | 83,92 | 89,94 | 80,63 | 83,70 | 68,32 | 86,11 | 76,92 | Baik |
| 5 | Kabupaten Banj arnegara | 83,16 | 73,97 | 94,94 | 73,25 | 100,00 | 84,91 | 100,00 | 77,03 | 84,09 | 92,45 | 85,30 | Sangat Baik |
| 6 | Kabupaten Kebumen | 88,45 | 92,06 | 60,00 | 78,08 | 43,38 | 50,06 | 63,30 | 90,86 | 69,04 | 51,70 | 67,95 | Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 7 | Kabupaten Purworejo | 73,14 | 67,18 | 33,33 | 35,52 | 56,90 | 70,06 | 44,93 | 69,17 | 34,43 | 60,49 | 49,44 | Cukup Baik |
| 8 | Kabupaten Wonosobo | 88,64 | 92,16 | 70,07 | 53,42 | 100,00 | 84,91 | 73,95 | 90,98 | 61,75 | 85,94 | 75,08 | Baik |
| 9 | Kabupaten Magelang | 74,41 | 44,07 | 85,08 | 40,00 | 65,10 | 75,01 | 82,58 | 54,17 | 62,54 | 74,42 | 64,59 | Baik |
| 10 | Kabupaten Boyolali | 70,67 | 91,78 | 38,33 | 42,30 | 100,00 | 100,00 | 71,87 | 84,75 | 40,32 | 92,97 | 65,54 | Baik |
| 11 | Kabupaten Klaten | 63,13 | 86,09 | 84,87 | 53,30 | 74,96 | 89,94 | 85,65 | 78,45 | 69,08 | 85,12 | 75,94 | Baik |
| 12 | Kabupaten Sukoharjo | 87,70 | 80,74 | 74,94 | 60,03 | 94,94 | 100,00 | 83,20 | 83,06 | 67,48 | 94,54 | 79,01 | Baik |
| 13 | Kabupaten Wonogiri | 69,91 | 92,16 | 80,00 | 33,33 | 75,13 | 90,02 | 89,08 | 84,75 | 56,67 | 86,06 | 71,40 | Baik |
| 14 | Kabupaten Karanganyar | 51,73 | 44,59 | 68,64 | 35,57 | 69,92 | 74,92 | 62,32 | 46,97 | 52,11 | 70,52 | 56,84 | Cukup Baik |
| 15 | Kabupaten Sragen | 59,14 | 61,57 | 83,78 | 49,02 | 84,89 | 84,91 | 71,99 | 60,76 | 66,40 | 81,67 | 70,05 | Baik |
| 16 | Kabupaten Grobogan | 56,54 | 77,68 | 80,00 | 57,98 | 65,02 | 69,78 | 48,80 | 70,64 | 68,99 | 63,35 | 67,56 | Baik |
| 17 | Kabupaten Blora | 60,33 | 92,16 | 83,35 | 37,81 | 100,00 | 100,00 | 82,53 | 81,56 | 60,58 | 95,63 | 75,67 | Baik |
| 18 | Kabupaten Rembang | 45,96 | 92,16 | 83,78 | 35,52 | 84,89 | 100,00 | 43,08 | 76,77 | 59,65 | 81,99 | 70,01 | Baik |
| 19 | Kabupaten Pati | 68,98 | 74,59 | 100,00 | 33,33 | 63,64 | 64,80 | 37,23 | 72,72 | 66,67 | 57,62 | 65,04 | Baik |
| 20 | Kabupaten Kudus | 79,04 | 96,02 | 100,00 | 57,94 | 100,00 | 94,97 | 73,95 | 90,37 | 78,97 | 90,97 | 84,97 | Sangat Baik |
| 21 | Kabupaten Jepara | 51,54 | 60,00 | 60,00 | 33,33 | 53,57 | 79,96 | 62,93 | 57,18 | 46,67 | 69,10 | 55,75 | Cukup Baik |
| 22 | Kabupaten Demak | 59,49 | 78,43 | 100,00 | 37,81 | 80,28 | 100,00 | 82,53 | 72,12 | 68,90 | 90,70 | 76,34 | Baik |
| 23 | Kabupaten Semarang | 78,09 | 61,01 | 100,00 | 57,94 | 100,00 | 89,94 | 74,81 | 66,70 | 78,97 | 88,67 | 79,57 | Baik |
| 24 | Kabupaten Temanggung | 68,98 | 85,01 | 33,33 | 33,33 | 68,24 | 73,56 | 74,06 | 79,68 | 33,33 | 72,36 | 54,68 | Cukup Baik |
| 25 | Kabupaten Kendal | 54,47 | 70,25 | 80,00 | 46,73 | 69,92 | 69,94 | 62,34 | 64,99 | 63,36 | 68,04 | 65,14 | Baik |
| 26 | Kabupaten Batang | 71,17 | 82,05 | 58,24 | 55,75 | 53,28 | 53,29 | 44,93 | 78,43 | 57,00 | 51,20 | 59,43 | Cukup Baik |
| 27 | Kabupaten Pekalongan | 70,85 | 76,26 | 33,33 | 33,33 | 70,08 | 89,95 | 53,59 | 74,46 | 33,33 | 75,89 | 54,75 | Cukup Baik |
| 28 | Kabupaten Pemalang | 76,86 | 88,17 | 73,62 | 53,27 | 65,06 | 38,36 | 41,90 | 84,40 | 63,45 | 45,92 | 62,13 | Baik |
| 29 | Kabupaten Tegal | 46,92 | 69,92 | 53,51 | 33,33 | 55,11 | 80,11 | 62,32 | 62,26 | 43,42 | 69,41 | 55,26 | Cukup Baik |
| 30 | Kabupaten Brebes | 79,51 | 92,16 | 94,94 | 40,00 | 84,89 | 100,00 | 82,53 | 87,94 | 67,47 | 91,85 | 79,13 | Baik |
| 31 | Kota Magelang | 87,43 | 93,84 | 78,71 | 64,52 | 45,06 | 73,09 | 82,53 | 91,71 | 71,62 | 68,44 | 74,61 | Baik |
| 32 | Kota Surakarta | 97,02 | 97,97 | 100,00 | 93,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,65 | 96,65 | 100,00 | 97,89 | Sangat Baik |
| 33 | Kota Salatiga | 56,98 | 95,90 | 83,78 | 33,33 | 100,00 | 84,91 | 73,75 | 82,94 | 58,55 | 85,89 | 71,91 | Baik |
| 34 | Kota Semarang | 74,41 | 84,19 | 33,33 | 40,00 | 65,27 | 89,94 | 85,65 | 80,93 | 36,67 | 82,70 | 59,79 | Cukup Baik |
| 35 | Kota Pekalongan | 87,43 | 97,97 | 94,94 | 80,27 | 67,06 | 84,91 | 82,53 | 94,46 | 87,60 | 79,85 | 86,54 | Sangat Baik |
| 36 | Kota Tegal | 68,89 | 82,38 | 80,00 | 53,42 | 85,04 | 85,03 | 61,38 | 77,89 | 66,71 | 79,12 | 72,80 | Baik |
| **Provinsi D.I. Yogyakarta** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi D.I. Yogyakarta | 85,98 | 84,28 | 84,95 | 80,27 | 79,98 | 100,00 | 100,00 | 84,84 | 82,61 | 94,99 | 86,92 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 79,94 | 69,89 | 94,94 | 66,58 | 85,06 | 100,00 | 82,53 | 73,23 | 80,76 | 91,90 | 82,74 | Sangat Baik |
| 3 | Kabupaten Bantul | 91,61 | 60,66 | 94,94 | 40,00 | 84,89 | 84,91 | 91,41 | 70,97 | 67,47 | 86,53 | 74,11 | Baik |
| 4 | Kabupaten Gunungkidul | 70,61 | 83,50 | 90,14 | 100,00 | 79,96 | 84,91 | 82,53 | 79,21 | 95,07 | 83,08 | 88,19 | Sangat Baik |
| 5 | Kabupaten Sleman | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 6 | Kota Yogyakarta | 79,94 | 77,40 | 94,94 | 60,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,24 | 77,56 | 100,00 | 84,70 | Sangat Baik |
| **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Jawa Timur | 97,02 | 97,97 | 95,13 | 73,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,65 | 84,34 | 100,00 | 91,86 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Pacitan | 60,17 | 61,34 | 53,51 | 40,00 | 65,10 | 89,90 | 62,39 | 60,95 | 46,76 | 76,82 | 58,95 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Ponorogo | 81,84 | 90,20 | 69,99 | 71,38 | 85,04 | 80,00 | 80,35 | 87,41 | 70,68 | 81,35 | 77,32 | Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 4 | Kabupaten Trenggalek | 75,50 | 83,61 | 90,07 | 60,09 | 74,69 | 84,91 | 62,37 | 80,91 | 75,08 | 76,72 | 76,75 | Baik |
| 5 | Kabupaten Tulungagung | 81,73 | 86,28 | 95,13 | 51,26 | 85,04 | 79,84 | 74,58 | 84,77 | 73,20 | 79,82 | 77,55 | Baik |
| 6 | Kabupaten Blitar | 97,02 | 97,97 | 94,94 | 66,82 | 94,92 | 89,94 | 100,00 | 97,65 | 80,88 | 93,70 | 88,20 | Sangat Baik |
| 7 | Kabupaten Kediri | 97,02 | 97,97 | 94,94 | 93,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,65 | 94,18 | 100,00 | 96,68 | Sangat Baik |
| 8 | Kabupaten Malang | 69,43 | 46,61 | 70,14 | 46,73 | 43,40 | 69,94 | 62,34 | 54,21 | 58,43 | 61,40 | 58,52 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Lumajang | 67,90 | 97,97 | 95,13 | 80,27 | 94,96 | 84,91 | 100,00 | 87,95 | 87,70 | 91,19 | 88,84 | Sangat Baik |
| 10 | Kabupaten Jember | 91,16 | 97,97 | 69,99 | 53,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,70 | 61,65 | 100,00 | 80,35 | Sangat Baik |
| 11 | Kabupaten Banyuwangi | 71,63 | 74,29 | 84,77 | 60,09 | 69,71 | 100,00 | 82,53 | 73,41 | 72,43 | 88,06 | 77,50 | Baik |
| 12 | Kabupaten Bondowoso | 68,98 | 49,35 | 70,07 | 51,20 | 100,00 | 84,91 | 91,35 | 55,89 | 60,64 | 90,29 | 68,95 | Baik |
| 13 | Kabupaten Situbondo | 87,43 | 93,84 | 90,01 | 60,18 | 100,00 | 100,00 | 91,19 | 91,71 | 75,09 | 97,80 | 85,47 | Sangat Baik |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | 54,37 | 67,48 | 85,20 | 37,81 | 75,45 | 84,91 | 71,04 | 63,12 | 61,51 | 79,08 | 67,31 | Baik |
| 15 | Kabupaten Pasuruan | 82,88 | 85,97 | 80,00 | 66,87 | 85,04 | 84,91 | 59,95 | 84,94 | 73,44 | 78,70 | 77,36 | Baik |
| 16 | Kabupaten Sidoarjo | 97,02 | 97,97 | 80,00 | 40,00 | 85,04 | 85,03 | 80,00 | 97,65 | 60,00 | 83,78 | 74,87 | Baik |
| 17 | Kabupaten Mojokerto | 72,71 | 94,09 | 74,94 | 57,90 | 100,00 | 84,91 | 82,53 | 86,97 | 66,42 | 88,09 | 77,25 | Baik |
| 18 | Kabupaten Jombang | 76,06 | 88,17 | 66,20 | 53,42 | 100,00 | 84,91 | 91,35 | 84,14 | 59,81 | 90,29 | 74,14 | Baik |
| 19 | Kabupaten Nganjuk | 88,64 | 92,16 | 64,87 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 73,95 | 90,98 | 62,43 | 93,49 | 77,78 | Baik |
| 20 | Kabupaten Madiun | 59,18 | 54,09 | 75,13 | 53,30 | 89,92 | 74,97 | 61,90 | 55,79 | 64,22 | 75,44 | 66,05 | Baik |
| 21 | Kabupaten Magetan | 85,66 | 82,36 | 90,07 | 64,65 | 89,92 | 84,91 | 82,53 | 83,46 | 77,36 | 85,57 | 81,13 | Sangat Baik |
| 22 | Kabupaten Ngawi | 87,43 | 88,03 | 80,00 | 44,45 | 90,12 | 80,00 | 62,34 | 87,83 | 62,23 | 78,12 | 72,25 | Baik |
| 23 | Kabupaten Bojonegoro | 97,02 | 97,97 | 90,14 | 66,87 | 100,00 | 100,00 | 88,70 | 97,65 | 78,51 | 97,17 | 88,12 | Sangat Baik |
| 24 | Kabupaten Tuban | 84,45 | 97,97 | 95,01 | 60,09 | 100,00 | 100,00 | 91,41 | 93,46 | 77,55 | 97,85 | 87,04 | Sangat Baik |
| 25 | Kabupaten Lamongan | 52,72 | 88,26 | 100,00 | 35,56 | 84,89 | 84,91 | 85,47 | 76,43 | 67,78 | 85,04 | 74,88 | Baik |
| 26 | Kabupaten Gresik | 71,69 | 58,16 | 80,00 | 40,00 | 74,96 | 64,87 | 64,52 | 62,67 | 60,00 | 67,31 | 62,81 | Baik |
| 27 | Kabupaten Bangkalan | 67,81 | 65,10 | 83,78 | 46,73 | 100,00 | 84,91 | 59,42 | 66,00 | 65,25 | 82,31 | 70,72 | Baik |
| 28 | Kabupaten Sampang | 49,90 | 45,37 | 75,01 | 33,33 | 56,13 | 68,01 | 79,63 | 46,88 | 54,17 | 67,95 | 57,02 | Cukup Baik |
| 29 | Kabupaten Pamekasan | 74,21 | 90,12 | 80,00 | 37,81 | 84,89 | 79,84 | 40,00 | 84,82 | 58,90 | 71,14 | 67,85 | Baik |
| 30 | Kabupaten Sumenep | 94,23 | 92,12 | 75,13 | 60,18 | 75,20 | 100,00 | 82,53 | 92,82 | 67,66 | 89,43 | 79,43 | Baik |
| 31 | Kota Kediri | 69,91 | 97,97 | 83,78 | 80,27 | 100,00 | 89,94 | 82,53 | 88,62 | 82,02 | 90,60 | 86,01 | Sangat Baik |
| 32 | Kota Blitar | 60,42 | 92,16 | 100,00 | 66,87 | 60,30 | 84,91 | 82,53 | 81,59 | 83,44 | 78,16 | 81,43 | Sangat Baik |
| 33 | Kota Malang | 97,02 | 97,97 | 90,07 | 73,45 | 100,00 | 100,00 | 97,42 | 97,65 | 81,76 | 99,36 | 90,40 | Sangat Baik |
| 34 | Kota Probolinggo | 97,02 | 97,97 | 80,00 | 100,00 | 85,04 | 85,03 | 77,12 | 97,65 | 90,00 | 83,05 | 89,35 | Sangat Baik |
| 35 | Kota Pasuruan | 58,62 | 63,26 | 36,65 | 42,10 | 55,11 | 53,40 | 43,00 | 61,71 | 39,37 | 51,23 | 47,50 | Cukup Baik |
| 36 | Kota Mojokerto | 52,94 | 61,43 | 33,33 | 57,90 | 41,46 | 66,85 | 44,06 | 58,61 | 45,61 | 54,80 | 51,05 | Cukup Baik |
| 37 | Kota Madiun | 87,89 | 93,95 | 80,00 | 66,70 | 80,00 | 80,00 | 74,18 | 91,94 | 73,35 | 78,54 | 78,65 | Baik |
| 38 | Kota Surabaya | 97,02 | 97,97 | 83,78 | 77,67 | 100,00 | 90,17 | 62,32 | 97,65 | 80,73 | 85,67 | 85,62 | Sangat Baik |
| 39 | Kota Batu | 59,25 | 48,79 | 33,33 | 33,33 | 56,94 | 33,33 | 37,23 | 52,27 | 33,33 | 40,21 | 39,23 | Kurang Baik |
| **Provinsi Banten** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Banten | 60,33 | 48,54 | 68,64 | 40,00 | 43,39 | 50,05 | 44,03 | 52,46 | 54,32 | 46,88 | 51,63 | Cukup Baik |
| 2 | Kabupaten Pandeglang | 44,08 | 55,84 | 68,64 | 44,49 | 73,78 | 58,30 | 54,59 | 51,93 | 56,57 | 61,24 | 57,11 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Lebak | 69,91 | 92,16 | 90,07 | 35,56 | 84,89 | 84,91 | 82,53 | 84,75 | 62,82 | 84,31 | 73,87 | Baik |
| 4 | Kabupaten Tangerang | 85,65 | 82,23 | 90,01 | 86,85 | 94,94 | 89,94 | 94,18 | 83,37 | 88,43 | 92,25 | 88,62 | Sangat Baik |
| 5 | Kabupaten Serang | 57,45 | 72,60 | 75,13 | 37,76 | 83,92 | 84,91 | 72,01 | 67,56 | 56,45 | 81,44 | 66,44 | Baik |
| 6 | Kota Tangerang | 97,02 | 94,09 | 94,94 | 86,85 | 100,00 | 100,00 | 91,25 | 95,07 | 90,89 | 97,81 | 93,88 | Sangat Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 7 | Kota Cilegon | 68,49 | 66,41 | 53,51 | 35,57 | 70,14 | 53,20 | 40,16 | 67,10 | 44,54 | 54,17 | 52,01 | Cukup Baik |
| 8 | Kota Serang | 78,11 | 91,51 | 80,00 | 40,00 | 69,92 | 74,85 | 65,78 | 87,05 | 60,00 | 71,35 | 68,90 | Baik |
| 9 | Kota Tangerang Selatan | 64,14 | 64,97 | 94,94 | 80,27 | 53,28 | 84,91 | 73,95 | 64,69 | 87,60 | 74,26 | 78,90 | Baik |
| **Provinsi Bali** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Bali | 45,03 | 36,01 | 100,00 | 60,00 | 89,92 | 84,91 | 72,17 | 39,01 | 80,00 | 82,98 | 72,81 | Baik |
| 2 | Kabupaten Jembrana | 73,74 | 80,23 | 85,20 | 86,85 | 75,41 | 100,00 | 79,66 | 78,07 | 86,03 | 88,77 | 85,31 | Sangat Baik |
| 3 | Kabupaten Tabanan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Badung | 88,35 | 68,08 | 84,93 | 60,00 | 94,94 | 89,94 | 85,47 | 74,83 | 72,47 | 90,07 | 78,43 | Baik |
| 5 | Kabupaten Gianyar | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Klungkung | 63,25 | 42,73 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 37,23 | 49,56 | 33,33 | 34,31 | 36,85 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Bangli | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Karangasem | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Buleleng | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 10 | Kota Denpasar | 85,82 | 96,00 | 90,07 | 86,70 | 100,00 | 84,91 | 82,53 | 92,61 | 88,38 | 88,09 | 89,13 | Sangat Baik |
| **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 81,84 | 94,09 | 100,00 | 53,42 | 84,89 | 84,91 | 100,00 | 90,01 | 76,71 | 88,67 | 83,08 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Lombok Barat | 67,85 | 65,35 | 68,64 | 37,77 | 70,18 | 74,85 | 44,98 | 66,18 | 53,20 | 66,22 | 59,83 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Lombok Tengah | 68,98 | 73,25 | 60,00 | 40,00 | 49,90 | 79,92 | 82,53 | 71,83 | 50,00 | 73,07 | 61,52 | Baik |
| 4 | Kabupaten Lombok Timur | 37,30 | 36,04 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 36,46 | 33,33 | 33,33 | 33,95 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Sumbawa | 70,50 | 92,16 | 73,79 | 80,27 | 58,65 | 59,87 | 42,07 | 84,95 | 77,03 | 55,12 | 71,76 | Baik |
| 6 | Kabupaten Dompu | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Bima | 43,03 | 54,03 | 34,95 | 35,57 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 50,37 | 35,26 | 33,33 | 37,65 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Sumbawa Barat | 66,93 | 75,09 | 40,00 | 40,00 | 84,89 | 84,91 | 64,27 | 72,38 | 40,00 | 79,74 | 58,81 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Lombok Utara | 82,61 | 83,94 | 33,33 | 37,81 | 75,15 | 79,96 | 33,33 | 83,49 | 35,57 | 67,10 | 54,90 | Cukup Baik |
| 10 | Kota Mataram | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 11 | Kota Bima | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 67,97 | 65,66 | 100,00 | 40,00 | 84,89 | 89,94 | 82,80 | 66,43 | 70,00 | 86,89 | 74,56 | Baik |
| 2 | Kabupaten Kupang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 40,99 | 67,54 | 80,00 | 44,53 | 50,14 | 64,95 | 47,82 | 58,70 | 62,27 | 56,96 | 59,91 | Cukup Baik |
| 4 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Belu | 78,95 | 77,17 | 43,18 | 37,81 | 43,47 | 48,32 | 34,31 | 77,76 | 40,49 | 43,60 | 48,84 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Alor | 39,21 | 41,38 | 33,33 | 33,33 | 35,01 | 43,22 | 36,23 | 40,66 | 33,33 | 39,42 | 36,68 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Flores Timur | 58,28 | 61,36 | 58,59 | 40,00 | 40,10 | 54,97 | 50,74 | 60,33 | 49,29 | 50,20 | 51,76 | Cukup Baik |
| 8 | Kabupaten Sikka | 50,68 | 60,36 | 53,51 | 53,42 | 46,82 | 54,97 | 50,74 | 57,14 | 53,47 | 51,88 | 53,70 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Ende | 82,09 | 69,66 | 33,33 | 33,33 | 56,99 | 74,97 | 60,52 | 73,80 | 33,33 | 66,86 | 51,80 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Ngada | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 11 | Kabupaten Manggarai | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 12 | Kabupaten Sumba Timur | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 13 | Kabupaten Sumba Barat | 60,40 | 47,30 | 83,78 | 46,70 | 68,81 | 89,94 | 54,63 | 51,66 | 65,24 | 75,83 | 65,85 | Baik |
| 14 | Kabupaten Lembata | 59,36 | 85,33 | 75,13 | 60,09 | 84,89 | 84,91 | 76,90 | 76,68 | 67,61 | 82,90 | 74,18 | Baik |
| 15 | Kabupaten Rote Ndao | 43,73 | 41,63 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 50,10 | 33,33 | 42,33 | 33,33 | 41,72 | 37,73 | Kurang Baik |
| 16 | Kabupaten Manggarai Barat | 69,08 | 91,51 | 33,33 | 37,76 | 84,89 | 94,97 | 48,46 | 84,04 | 35,54 | 80,82 | 59,27 | Cukup Baik |
| 17 | Kabupaten Nagekeo | 59,58 | 68,41 | 83,78 | 33,33 | 84,89 | 84,91 | 64,19 | 65,47 | 58,55 | 79,72 | 66,53 | Baik |
| 18 | Kabupaten Sumba Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 19 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 56,61 | 74,77 | 53,51 | 35,57 | 53,28 | 50,10 | 41,06 | 68,72 | 44,54 | 48,64 | 50,61 | Cukup Baik |
| 20 | Kabupaten Manggarai Timur | 45,18 | 59,94 | 83,78 | 40,00 | 40,00 | 38,31 | 33,33 | 55,03 | 61,89 | 37,49 | 52,92 | Cukup Baik |
| 21 | Kabupaten Sabu Raijua | 50,42 | 55,80 | 83,13 | 33,33 | 84,89 | 94,97 | 64,19 | 54,01 | 58,23 | 84,75 | 65,67 | Baik |
| 22 | Kabupaten Malaka | 58,22 | 69,52 | 68,64 | 51,23 | 65,04 | 64,87 | 80,34 | 65,75 | 59,94 | 68,78 | 63,85 | Baik |
| 23 | Kota Kupang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kalimantan Barat | 81,73 | 97,97 | 100,00 | 40,00 | 84,89 | 84,91 | 82,53 | 92,56 | 70,00 | 84,31 | 78,93 | Baik |
| 2 | Kabupaten Sambas | 68,98 | 73,55 | 85,20 | 60,12 | 40,00 | 40,00 | 38,18 | 72,03 | 72,66 | 39,54 | 62,20 | Baik |
| 3 | Kabupaten Mempawah | 91,54 | 94,01 | 90,07 | 66,55 | 85,04 | 80,00 | 59,42 | 93,19 | 78,31 | 76,11 | 80,57 | Sangat Baik |
| 4 | Kabupaten Sanggau | 82,80 | 85,97 | 80,00 | 73,57 | 74,98 | 84,91 | 91,41 | 84,91 | 76,79 | 84,05 | 80,66 | Sangat Baik |
| 5 | Kabupaten Ketapang | 58,42 | 55,47 | 78,71 | 44,34 | 33,33 | 69,94 | 60,71 | 56,45 | 61,53 | 58,48 | 59,57 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Sintang | 64,87 | 59,45 | 35,02 | 35,57 | 35,02 | 33,33 | 33,33 | 61,25 | 35,30 | 33,75 | 39,95 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Kapuas Hulu | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Bengkayang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Landak | 52,68 | 51,42 | 61,91 | 33,33 | 54,94 | 79,92 | 56,57 | 51,84 | 47,62 | 67,84 | 54,76 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Sekadau | 49,63 | 60,87 | 60,00 | 53,45 | 35,02 | 54,97 | 47,83 | 57,13 | 56,73 | 48,20 | 54,14 | Cukup Baik |
| 11 | Kabupaten Melawi | 91,16 | 81,54 | 39,99 | 48,68 | 50,12 | 50,10 | 33,33 | 84,74 | 44,33 | 45,91 | 52,83 | Cukup Baik |
| 12 | Kabupaten Kayong Utara | 61,26 | 76,59 | 80,00 | 35,57 | 78,15 | 84,91 | 75,84 | 71,48 | 57,79 | 80,95 | 67,73 | Baik |
| 13 | Kabupaten Kubu Raya | 88,64 | 77,41 | 89,86 | 60,09 | 67,06 | 100,00 | 90,21 | 81,14 | 74,98 | 89,32 | 80,67 | Sangat Baik |
| 14 | Kota Pontianak | 76,08 | 97,97 | 100,00 | 78,08 | 100,00 | 100,00 | 88,35 | 90,68 | 89,04 | 97,09 | 91,87 | Sangat Baik |
| 15 | Kota Singkawang | 56,16 | 47,38 | 54,94 | 40,00 | 49,88 | 54,93 | 49,68 | 50,31 | 47,47 | 52,36 | 49,56 | Cukup Baik |
| **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kalimantan Tengah | 76,42 | 62,02 | 65,06 | 66,82 | 80,00 | 69,94 | 80,00 | 66,82 | 65,94 | 74,97 | 68,93 | Baik |
| 2 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 68,98 | 85,55 | 94,94 | 60,18 | 84,89 | 100,00 | 73,96 | 80,03 | 77,56 | 89,71 | 81,84 | Sangat Baik |
| 4 | Kabupaten Kapuas | 73,48 | 66,40 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 60,40 | 68,76 | 80,00 | 75,10 | 76,25 | Baik |
| 5 | Kabupaten Barito Selatan | 41,24 | 49,28 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 41,56 | 33,33 | 46,60 | 33,33 | 37,45 | 37,24 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Barito Utara | 58,37 | 91,51 | 83,78 | 60,03 | 90,12 | 100,00 | 73,95 | 80,48 | 71,90 | 91,02 | 79,56 | Baik |
| 7 | Kabupaten Katingan | 82,72 | 76,13 | 75,34 | 80,27 | 89,92 | 100,00 | 91,59 | 78,33 | 77,81 | 95,38 | 83,39 | Sangat Baik |
| 8 | Kabupaten Seruyan | 56,51 | 85,33 | 75,13 | 37,81 | 78,88 | 89,94 | 51,75 | 75,73 | 56,47 | 77,63 | 66,88 | Baik |
| 9 | Kabupaten Sukamara | 59,13 | 64,08 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 62,43 | 33,33 | 33,33 | 39,09 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Lamandau | 45,94 | 54,69 | 33,33 | 33,33 | 41,74 | 41,66 | 44,93 | 51,77 | 33,33 | 42,50 | 39,84 | Kurang Baik |
| 11 | Kabupaten Gunung Mas | 49,65 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 38,77 | 33,33 | 33,33 | 34,41 | Kurang Baik |
| 12 | Kabupaten Pulang Pisau | 48,81 | 51,46 | 33,33 | 35,52 | 33,33 | 39,88 | 33,33 | 50,58 | 34,43 | 36,61 | 38,30 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 13 | Kabupaten Murung Raya | 53,65 | 43,42 | 80,00 | 44,53 | 83,92 | 89,94 | 62,25 | 46,83 | 62,27 | 81,51 | 65,21 | Baik |
| 14 | Kabupaten Barito Timur | 76,44 | 97,97 | 60,00 | 46,70 | 75,45 | 74,98 | 54,13 | 90,80 | 53,35 | 69,88 | 65,92 | Baik |
| 15 | Kota Palangkaraya | 88,64 | 85,97 | 80,00 | 66,85 | 85,04 | 74,85 | 76,86 | 86,86 | 73,42 | 77,90 | 77,48 | Baik |
| **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kalimantan Selatan | 76,92 | 84,27 | 94,94 | 40,00 | 65,08 | 94,97 | 85,59 | 81,82 | 67,47 | 85,15 | 75,83 | Baik |
| 2 | Kabupaten Tanah Laut | 56,28 | 63,54 | 33,33 | 35,52 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 61,12 | 34,43 | 33,33 | 39,37 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Kotabaru | 42,98 | 89,75 | 38,38 | 40,00 | 55,11 | 38,31 | 35,26 | 74,17 | 39,19 | 41,75 | 46,91 | Cukup Baik |
| 4 | Kabupaten Banjar | 69,78 | 75,64 | 70,07 | 40,00 | 84,89 | 84,91 | 82,53 | 73,69 | 55,04 | 84,31 | 67,86 | Baik |
| 5 | Kabupaten Barito Kuala | 41,09 | 60,08 | 74,94 | 33,33 | 80,00 | 69,94 | 70,33 | 53,76 | 54,13 | 72,55 | 59,81 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Tapin | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 74,34 | 80,38 | 100,00 | 86,85 | 90,14 | 100,00 | 88,35 | 78,37 | 93,42 | 94,62 | 90,82 | Sangat Baik |
| 8 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 69,91 | 82,09 | 100,00 | 37,76 | 100,00 | 84,91 | 97,07 | 78,03 | 68,88 | 91,72 | 77,82 | Baik |
| 10 | Kabupaten Tabalong | 60,37 | 77,41 | 83,78 | 60,18 | 70,37 | 84,91 | 51,78 | 71,73 | 71,98 | 72,99 | 72,25 | Baik |
| 11 | Kabupaten Tanah Bumbu | 78,30 | 91,09 | 90,07 | 40,00 | 100,00 | 84,91 | 73,95 | 86,83 | 65,04 | 85,94 | 75,87 | Baik |
| 12 | Kabupaten Balangan | 54,61 | 81,39 | 100,00 | 66,85 | 80,02 | 84,91 | 82,53 | 72,48 | 83,42 | 83,09 | 81,15 | Sangat Baik |
| 13 | Kota Banjarmasin | 97,02 | 87,89 | 68,64 | 35,52 | 46,51 | 79,84 | 70,18 | 90,93 | 52,08 | 69,09 | 65,08 | Baik |
| 14 | Kota Banjarbaru | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kalimantan Timur | 65,10 | 51,85 | 95,01 | 60,18 | 84,89 | 84,91 | 42,95 | 56,26 | 77,59 | 74,41 | 72,38 | Baik |
| 2 | Kabupaten Paser | 72,81 | 79,51 | 100,00 | 66,46 | 69,92 | 79,80 | 79,82 | 77,28 | 83,23 | 77,34 | 80,21 | Sangat Baik |
| 3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 88,64 | 74,56 | 83,78 | 40,00 | 95,18 | 84,91 | 82,53 | 79,25 | 61,89 | 86,88 | 73,12 | Baik |
| 4 | Kabupaten Berau | 80,06 | 77,86 | 68,64 | 37,81 | 33,33 | 89,90 | 75,84 | 78,59 | 53,22 | 72,24 | 64,18 | Baik |
| 5 | Kabupaten Kutai Barat | 54,31 | 41,79 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 68,28 | 33,33 | 45,96 | 33,33 | 50,81 | 41,28 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Kutai Timur | 40,28 | 46,01 | 68,56 | 46,70 | 73,56 | 74,93 | 38,18 | 44,11 | 57,63 | 65,40 | 57,38 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 60,14 | 61,32 | 74,99 | 37,81 | 100,00 | 100,00 | 88,42 | 60,93 | 56,40 | 97,10 | 70,00 | Baik |
| 8 | Kabupaten Mahakam Ulu | 39,20 | 44,83 | 33,33 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 37,08 | 42,95 | 36,67 | 39,27 | 38,72 | Kurang Baik |
| 9 | Kota Balikpapan | 85,72 | 82,08 | 80,00 | 86,58 | 94,94 | 100,00 | 82,53 | 83,29 | 83,29 | 94,37 | 86,75 | Sangat Baik |
| 10 | Kota Samarinda | 94,23 | 75,67 | 89,86 | 78,08 | 94,94 | 100,00 | 88,51 | 81,85 | 83,97 | 95,86 | 87,26 | Sangat Baik |
| 11 | Kota Bontang | 87,43 | 91,78 | 90,07 | 73,45 | 100,00 | 84,91 | 88,30 | 90,33 | 81,76 | 89,53 | 85,88 | Sangat Baik |
| **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Kalimantan Utara | 49,86 | 80,38 | 95,13 | 57,98 | 90,10 | 74,92 | 69,14 | 70,22 | 76,56 | 77,27 | 75,53 | Baik |
| 2 | Kabupaten Bulungan | 53,48 | 38,01 | 74,94 | 64,65 | 65,08 | 94,97 | 33,33 | 43,16 | 69,80 | 72,09 | 65,24 | Baik |
| 3 | Kabupaten Malinau | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Nunukan | 68,98 | 82,21 | 75,15 | 40,00 | 50,16 | 84,91 | 64,76 | 77,80 | 57,57 | 71,18 | 65,83 | Baik |
| 5 | Kabupaten Tana Tidung | 67,85 | 59,39 | 40,00 | 40,00 | 51,87 | 64,95 | 54,63 | 62,20 | 40,00 | 59,10 | 50,36 | Cukup Baik |
| 6 | Kota Tarakan | 75,11 | 43,22 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 53,84 | 33,33 | 33,33 | 37,39 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sulawesi Utara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 46,05 | 63,55 | 68,64 | 40,00 | 60,04 | 69,94 | 68,22 | 57,72 | 54,32 | 67,03 | 58,96 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Minahasa | 49,87 | 74,30 | 60,00 | 35,52 | 40,10 | 33,33 | 33,33 | 66,17 | 47,76 | 35,02 | 47,43 | Cukup Baik |
| 4 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 60,42 | 90,10 | 46,76 | 48,96 | 35,02 | 84,83 | 43,08 | 80,21 | 47,86 | 61,94 | 58,66 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 37,13 | 39,42 | 33,33 | 40,00 | 38,31 | 53,20 | 36,25 | 38,66 | 36,67 | 45,24 | 39,73 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Minahasa Selatan | 38,12 | 47,42 | 41,79 | 33,33 | 38,32 | 43,25 | 37,23 | 44,32 | 37,56 | 40,51 | 39,82 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Minahasa Utara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 35,25 | 38,10 | 46,76 | 33,33 | 53,47 | 59,88 | 49,78 | 37,15 | 40,05 | 55,75 | 44,37 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro | 35,28 | 36,68 | 36,71 | 33,33 | 35,02 | 49,90 | 42,98 | 36,21 | 35,02 | 44,45 | 38,20 | Kurang Baik |
| 11 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 12 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 13 | Kota Manado | 57,32 | 37,38 | 33,33 | 33,33 | 36,70 | 50,06 | 33,33 | 44,02 | 33,33 | 42,54 | 38,32 | Kurang Baik |
| 14 | Kota Bitung | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 15 | Kota Tomohon | 47,97 | 54,21 | 84,82 | 37,77 | 51,82 | 60,03 | 38,17 | 52,13 | 61,29 | 52,51 | 56,74 | Cukup Baik |
| 16 | Kota Kotamobagu | 81,75 | 71,11 | 53,51 | 35,52 | 36,63 | 58,04 | 40,16 | 74,65 | 44,52 | 48,22 | 51,64 | Cukup Baik |
| **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sulawesi Tengah | 72,62 | 84,28 | 85,40 | 37,77 | 50,08 | 36,65 | 38,06 | 80,39 | 61,58 | 40,36 | 58,68 | Cukup Baik |
| 2 | Kabupaten Banggai | 52,66 | 53,46 | 33,33 | 33,33 | 35,01 | 46,59 | 37,20 | 53,19 | 33,33 | 41,35 | 39,76 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Poso | 68,98 | 91,51 | 64,87 | 33,33 | 51,87 | 89,94 | 41,08 | 84,01 | 49,10 | 68,21 | 61,97 | Baik |
| 4 | Kabupaten Donggala | 42,92 | 60,98 | 33,33 | 49,02 | 33,33 | 100,00 | 33,33 | 54,97 | 41,18 | 66,67 | 51,86 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Toli-Toli | 55,56 | 49,37 | 33,33 | 35,52 | 65,10 | 59,88 | 47,84 | 51,43 | 34,43 | 58,18 | 45,20 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Buol | 45,96 | 83,02 | 40,10 | 33,33 | 54,96 | 65,03 | 41,99 | 70,68 | 36,72 | 56,75 | 49,69 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Morowali | 67,09 | 75,48 | 65,08 | 66,70 | 60,02 | 84,91 | 72,78 | 72,69 | 65,89 | 75,65 | 70,28 | Baik |
| 8 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 76,54 | 82,21 | 46,57 | 57,49 | 33,33 | 64,87 | 59,72 | 80,32 | 52,03 | 55,70 | 58,78 | Cukup Baik |
| 9 | Kabupaten Parigi Moutong | 53,53 | 57,41 | 38,38 | 37,77 | 33,33 | 65,10 | 39,16 | 56,12 | 38,07 | 50,67 | 45,58 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Tojo Una Una | 68,81 | 81,79 | 78,71 | 35,56 | 84,89 | 84,91 | 57,59 | 77,47 | 57,14 | 78,07 | 67,70 | Baik |
| 11 | Kabupaten Sigi | 49,90 | 59,49 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 44,05 | 56,30 | 33,33 | 36,01 | 38,71 | Kurang Baik |
| 12 | Kabupaten Banggai Laut | 67,09 | 56,85 | 58,57 | 57,80 | 85,10 | 50,22 | 33,33 | 60,26 | 58,18 | 54,72 | 57,51 | Cukup Baik |
| 13 | Kabupaten Morowali Utara | 84,72 | 75,75 | 83,78 | 33,33 | 83,14 | 89,94 | 47,96 | 78,74 | 58,55 | 77,74 | 68,54 | Baik |
| 14 | Kota Palu | 87,70 | 91,51 | 53,25 | 78,08 | 53,50 | 80,12 | 59,51 | 90,24 | 65,66 | 68,31 | 71,36 | Baik |

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sulawesi Selatan | 97,02 | 97,97 | 90,06 | 73,54 | 90,10 | 100,00 | 91,41 | 97,65 | 81,80 | 95,38 | 89,17 | Sangat Baik |
| 2 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 64,84 | 71,47 | 60,00 | 35,52 | 53,50 | 54,97 | 35,27 | 69,26 | 47,76 | 49,68 | 52,62 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Bulukumba | 70,53 | 60,96 | 83,13 | 40,00 | 43,39 | 84,91 | 43,99 | 64,14 | 61,56 | 64,30 | 62,93 | Baik |
| 4 | Kabupaten Bantaeng | 68,98 | 81,78 | 56,83 | 33,33 | 50,12 | 89,90 | 43,08 | 77,52 | 45,08 | 68,25 | 58,73 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Jeneponto | 47,00 | 41,39 | 50,26 | 37,77 | 41,71 | 54,97 | 43,03 | 43,26 | 44,01 | 48,67 | 45,32 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Takalar | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Gowa | 69,36 | 70,98 | 100,00 | 40,00 | 58,69 | 100,00 | 63,30 | 70,44 | 70,00 | 80,50 | 73,36 | Baik |
| 8 | Kabupaten Sinjai | 61,21 | 60,05 | 85,06 | 40,00 | 80,00 | 79,99 | 76,80 | 60,44 | 62,53 | 79,20 | 67,32 | Baik |
| 9 | Kabupaten Bone | 37,30 | 77,81 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 64,32 | 33,33 | 33,33 | 39,47 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Maros | 56,88 | 82,69 | 56,99 | 35,57 | 61,45 | 84,91 | 44,93 | 74,10 | 46,28 | 69,05 | 58,89 | Cukup Baik |
| 11 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 65,76 | 81,60 | 74,94 | 40,00 | 95,18 | 89,94 | 37,23 | 76,32 | 57,47 | 78,07 | 67,63 | Baik |
| 12 | Kabupaten Barru | 77,29 | 74,18 | 100,00 | 66,85 | 84,89 | 94,97 | 89,11 | 75,21 | 83,42 | 90,98 | 84,16 | Sangat Baik |
| 13 | Kabupaten Soppeng | 47,78 | 46,91 | 48,38 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 47,20 | 40,86 | 33,33 | 39,76 | Kurang Baik |
| 14 | Kabupaten Wajo | 87,70 | 81,39 | 100,00 | 44,53 | 48,51 | 84,91 | 92,27 | 83,49 | 72,27 | 77,65 | 76,17 | Baik |
| 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 68,98 | 73,11 | 50,26 | 33,33 | 50,12 | 83,38 | 43,08 | 71,74 | 41,79 | 64,99 | 54,96 | Cukup Baik |
| 16 | Kabupaten Pinrang | 54,50 | 85,57 | 80,00 | 33,33 | 85,04 | 69,94 | 62,34 | 75,22 | 56,67 | 71,81 | 65,07 | Baik |
| 17 | Kabupaten Enrekang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 18 | Kabupaten Luwu | 53,48 | 68,13 | 60,00 | 40,00 | 65,04 | 65,03 | 71,65 | 63,25 | 50,00 | 66,69 | 57,83 | Cukup Baik |
| 19 | Kabupaten Tana Toraja | 69,08 | 91,51 | 36,71 | 33,33 | 78,86 | 100,00 | 49,83 | 84,04 | 35,02 | 82,17 | 59,44 | Cukup Baik |
| 20 | Kabupaten Luwu Utara | 52,56 | 52,24 | 83,78 | 33,33 | 62,07 | 63,50 | 43,08 | 52,35 | 58,55 | 58,04 | 57,16 | Cukup Baik |
| 21 | Kabupaten Luwu Timur | 63,21 | 92,16 | 100,00 | 53,45 | 100,00 | 100,00 | 88,35 | 82,52 | 76,73 | 97,09 | 84,23 | Sangat Baik |
| 22 | Kabupaten Toraja Utara | 64,14 | 88,20 | 94,94 | 51,23 | 100,00 | 100,00 | 82,53 | 80,19 | 73,08 | 95,63 | 81,53 | Sangat Baik |
| 23 | Kota Makassar | 70,64 | 76,45 | 100,00 | 46,73 | 60,30 | 84,91 | 55,63 | 74,52 | 73,36 | 71,44 | 72,99 | Baik |
| 24 | Kota Parepare | 45,96 | 44,07 | 60,00 | 40,00 | 54,96 | 64,87 | 50,74 | 44,70 | 50,00 | 58,86 | 51,71 | Cukup Baik |
| 25 | Kota Palopo | 68,98 | 87,48 | 100,00 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 64,39 | 81,32 | 66,67 | 91,10 | 77,19 | Baik |
| **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 88,64 | 89,44 | 45,14 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 62,60 | 89,17 | 39,24 | 40,65 | 49,56 | Cukup Baik |
| 2 | Kabupaten Kolaka | 53,63 | 54,03 | 40,00 | 40,00 | 53,43 | 69,70 | 46,88 | 53,90 | 40,00 | 59,93 | 48,97 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Konawe | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Muna | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Buton | 46,83 | 73,75 | 60,00 | 42,26 | 60,00 | 74,93 | 53,67 | 64,78 | 51,13 | 65,88 | 58,44 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Konawe Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Bombana | 66,00 | 80,38 | 78,71 | 40,00 | 67,13 | 84,91 | 57,57 | 75,59 | 59,36 | 73,63 | 67,02 | Baik |
| 8 | Kabupaten Wakatobi | 49,90 | 63,72 | 33,33 | 33,33 | 50,19 | 33,33 | 33,33 | 59,11 | 33,33 | 37,55 | 39,75 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Kolaka Utara | 49,90 | 78,82 | 68,64 | 35,57 | 68,24 | 63,21 | 63,42 | 69,19 | 52,11 | 64,52 | 59,36 | Cukup Baik |
| 10 | Kabupaten Konawe Utara | 59,49 | 68,07 | 83,78 | 46,73 | 83,21 | 100,00 | 33,33 | 65,21 | 65,25 | 79,13 | 69,57 | Baik |
| 11 | Kabupaten Buton Utara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 12 | Kabupaten Kolaka Timur | 41,96 | 65,86 | 100,00 | 37,81 | 75,45 | 89,94 | 65,34 | 57,90 | 68,90 | 80,17 | 70,24 | Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| 13 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 39,09 | 78,33 | 33,33 | 33,33 | 35,01 | 33,33 | 33,33 | 65,26 | 33,33 | 33,75 | 39,78 | Kurang Baik |
| 14 | Kabupaten Muna Barat | 49,90 | 52,75 | 66,90 | 35,52 | 33,33 | 94,97 | 33,33 | 51,80 | 51,21 | 64,15 | 55,37 | Cukup Baik |
| 15 | Kabupaten Buton Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 16 | Kabupaten Buton Selatan | 53,38 | 60,00 | 60,00 | 51,23 | 74,94 | 64,95 | 71,12 | 57,79 | 55,62 | 68,99 | 60,22 | Baik |
| 17 | Kota Kendari | 64,25 | 47,35 | 58,57 | 37,77 | 53,28 | 51,90 | 60,97 | 52,98 | 48,17 | 54,51 | 51,10 | Cukup Baik |
| 18 | Kota Bau Bau | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Gorontalo | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Gorontalo | 40,28 | 52,28 | 67,13 | 57,94 | 33,33 | 34,97 | 33,33 | 48,28 | 62,54 | 34,15 | 50,86 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Boalemo | 65,83 | 88,09 | 80,00 | 33,33 | 69,67 | 100,00 | 82,53 | 80,68 | 56,67 | 88,05 | 71,21 | Baik |
| 4 | Kabupaten Bone Bolango | 62,47 | 78,44 | 33,33 | 35,57 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 73,12 | 34,45 | 33,33 | 41,76 | Cukup Baik |
| 5 | Kabupaten Pahuwato | 33,33 | 41,56 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 38,82 | 33,33 | 33,33 | 34,42 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Gorontalo Utara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kota Gorontalo | 90,68 | 81,66 | 80,00 | 35,57 | 51,94 | 68,01 | 80,70 | 84,66 | 57,79 | 67,17 | 66,04 | Baik |
| **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Sulawesi Barat | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Pasangkayu | 54,67 | 77,62 | 80,02 | 53,30 | 84,89 | 84,91 | 81,80 | 69,98 | 66,66 | 84,12 | 72,77 | Baik |
| 3 | Kabupaten Mamuju | 62,47 | 76,30 | 33,33 | 35,57 | 56,44 | 83,62 | 40,16 | 71,69 | 34,45 | 65,96 | 51,66 | Cukup Baik |
| 4 | Kabupaten Mamasa | 34,29 | 33,98 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 34,08 | 33,33 | 33,33 | 33,48 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Polewali Mandar | 74,23 | 51,46 | 78,78 | 37,81 | 50,26 | 84,91 | 62,32 | 59,04 | 58,29 | 70,60 | 62,28 | Baik |
| 6 | Kabupaten Majene | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Mamuju Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Maluku** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Maluku | 53,63 | 71,96 | 63,58 | 33,33 | 70,33 | 73,31 | 65,99 | 65,85 | 48,46 | 70,74 | 58,85 | Cukup Baik |
| 2 | Kabupaten Maluku Tengah | 70,39 | 62,25 | 68,64 | 44,45 | 63,71 | 53,20 | 43,24 | 64,96 | 56,55 | 53,34 | 57,21 | Cukup Baik |
| 3 | Kabupaten Maluku Tenggara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 41,98 | 37,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 35,01 | 34,29 | 38,88 | 33,33 | 34,41 | 34,77 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Buru | 60,25 | 76,39 | 45,14 | 42,30 | 65,02 | 84,87 | 64,19 | 71,02 | 43,72 | 74,74 | 58,80 | Cukup Baik |
| 6 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 53,72 | 68,84 | 33,33 | 33,33 | 83,21 | 79,96 | 33,33 | 63,81 | 33,33 | 69,12 | 50,53 | Cukup Baik |
| 7 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Kepulauan Aru | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 10 | Kabupaten Buru Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 11 | Kota Ambon | 60,18 | 46,09 | 33,33 | 33,33 | 46,51 | 33,33 | 58,57 | 50,78 | 33,33 | 42,93 | 39,78 | Kurang Baik |
| 12 | Kota Tual | 40,00 | 40,00 | 33,33 | 40,00 | 45,08 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 36,67 | 41,27 | 38,76 | Kurang Baik |

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Maluku Utara | 43,16 | 53,22 | 44,87 | 37,81 | 83,21 | 51,63 | 33,33 | 49,87 | 41,34 | 54,95 | 47,27 | Cukup Baik |
| 2 | Kabupaten Halmahera Barat | 44,88 | 55,61 | 33,33 | 33,33 | 36,71 | 40,00 | 34,31 | 52,04 | 33,33 | 37,75 | 38,41 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Halmahera Tengah | 34,29 | 46,91 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 40,09 | 33,33 | 42,71 | 33,33 | 36,71 | 36,24 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Halmahera Utara | 47,76 | 73,90 | 64,99 | 40,00 | 70,41 | 84,91 | 37,10 | 65,20 | 52,50 | 69,33 | 60,26 | Baik |
| 5 | Kabupaten Halmahera Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Sula | 46,78 | 50,79 | 38,38 | 35,57 | 38,32 | 40,00 | 33,33 | 49,46 | 36,97 | 37,91 | 39,74 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Halmahera Timur | 41,96 | 47,42 | 33,33 | 44,49 | 33,33 | 39,88 | 33,33 | 45,60 | 38,91 | 36,61 | 39,52 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Pulau Morotai | 58,02 | 44,83 | 33,33 | 33,33 | 40,05 | 48,38 | 33,33 | 49,23 | 33,33 | 42,53 | 39,35 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Pulau Taliabu | 33,33 | 38,76 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 34,31 | 36,95 | 33,33 | 33,57 | 34,12 | Kurang Baik |
| 10 | Kota Ternate | 60,43 | 67,51 | 74,94 | 40,00 | 68,24 | 69,94 | 37,23 | 65,15 | 57,47 | 61,34 | 60,20 | Baik |
| 11 | Kota Tidore Kepulauan | 33,33 | 40,09 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 37,84 | 33,33 | 33,33 | 34,22 | Kurang Baik |
| **Provinsi Papua** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Papua | 33,33 | 72,61 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 59,53 | 33,33 | 33,33 | 38,52 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Jayapura | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Biak Numfor | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Sarmi | 40,08 | 34,01 | 33,33 | 44,53 | 35,02 | 33,33 | 33,33 | 36,03 | 38,93 | 33,75 | 36,74 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Keerom | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Waropen | 34,32 | 35,30 | 33,33 | 35,56 | 35,01 | 45,03 | 43,12 | 34,98 | 34,45 | 42,05 | 36,92 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Supiori | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Mamberamo Raya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 10 | Kota Jayapura | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Papua Barat | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Manokwari | 38,17 | 49,41 | 33,33 | 33,33 | 41,74 | 54,93 | 33,33 | 45,66 | 33,33 | 46,23 | 39,80 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Fak Fak | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Teluk Bintuni | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Teluk Wondama | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Kaimana | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Manokwari Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Pegunungan Arfak | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| **Provinsi Papua Selatan** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Papua Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Merauke | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Boven Digoel | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Mappi | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Asmat | 44,85 | 42,62 | 33,33 | 40,00 | 45,04 | 43,40 | 33,33 | 43,37 | 36,67 | 41,29 | 39,44 | Kurang Baik |
| **Provinsi Papua Tengah** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Papua Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Nabire | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Puncak Jaya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Paniai | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Mimika | 66,63 | 78,32 | 41,49 | 66,82 | 85,04 | 69,94 | 44,83 | 74,43 | 54,15 | 67,43 | 62,31 | Baik |
| 6 | Kabupaten Puncak | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Dogiyai | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Intan Jaya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Deiyai | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| **Provinsi Papua Pegunungan** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Papua Pegunungan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Jayawijaya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Yahukimo | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Tolikara | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Mamberamo Tengah | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 7 | Kabupaten Yalimo | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 9 | Kabupaten Nduga | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |

| No | Wilayah | Subdimensi | | | | | | | Dimensi | | | IPKKU | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Strategi | | SDM | | Sistem | | | | | | | |
| | | Penegakkan Perda | Penyelenggaraan Trantibum | Pemberdayaan SDM | Peningkatan Kapasitas SDM | Sarana dan Prasarana | Perencanaan dan Anggaran | Akuntabilitas | Strategi | SDM | Sistem | | |
| **Provinsi Papua Barat Daya** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Papua Barat Daya | 42,08 | 60,00 | 33,33 | 33,33 | 36,63 | 41,57 | 41,88 | 54,03 | 33,33 | 40,41 | 39,64 | Kurang Baik |
| 2 | Kabupaten Sorong | 42,15 | 38,08 | 33,33 | 42,10 | 40,05 | 33,33 | 43,86 | 39,44 | 37,72 | 37,64 | 38,03 | Kurang Baik |
| 3 | Kabupaten Sorong Selatan | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 4 | Kabupaten Raja Ampat | 45,09 | 39,41 | 40,00 | 33,33 | 33,33 | 54,97 | 34,31 | 41,30 | 36,67 | 44,39 | 39,99 | Kurang Baik |
| 5 | Kabupaten Tambrauw | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Kurang Baik |
| 6 | Kabupaten Maybrat | 44,09 | 46,12 | 33,33 | 37,81 | 36,63 | 49,98 | 33,33 | 45,45 | 35,57 | 42,48 | 39,68 | Kurang Baik |
| 7 | Kota Sorong | 34,29 | 40,67 | 33,33 | 35,52 | 53,28 | 54,97 | 34,30 | 38,55 | 34,43 | 49,38 | 39,91 | Kurang Baik |

Keterangan:
Daerah yang ditandai dengan baris berwarna kuning merupakan daerah yang tidak melakukan pengisian IPKKU Tahun 2025 dan diberikan nilai afirmasi sebesar 33,33.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan

Safrizal ZA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**DATA KEJADIAN KEBAKARAN PEMUKIMAN TAHUN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TUBAN**

Sampai dengan Tanggal 23 February 2026

| NO | HARI/ TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | | LAPORAN DITERIMA (WIB) | MENUJU LOKASI (WIB) | TIBA DILOKASI (WIB) | WAKTU TEMPUH (DALAM MENIT) | JENIS KEBAKARAN | DUGAAN PENYEBAB KEBAKARAN | DATA PELAPOR | | | | TAKSIRAN KERUGIAN (Rp) | KRONOLOGI KEJADIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KECAMATAN | DESA/KEL | | | | | | | NAMA | ALAMAT | | | | |
| | | | | | | | | | | | RT | RW | DUSUN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 1 | 08 January 2025 | Parengan | Parangbatu | 06:00 | 06:00 | 06:15 | 15 menit | Tempat Usaha | Kelalaian | Agustina Sumiati | | | | 10.000.000 | |
| 2 | 30 January 2025 | Plumpang | Kepohagung | 08:43 | 08:45 | 08:55 | 12 menit | Tempat Usaha | Kelalaian | Okta Andika Priyangga | 03 | 02 | Dsn. Kunir | -+ 15 juta | Pos Rengel Menerima Laporan Dari Bapak Okta Andika Priyangga Bahwa Ada Kebakaran Di Tempat Kerjanya (Tumpukan Serbuk Kayu Untuk Membakar Batu/Jubong) |
| 3 | 09 February 2025 | Tuban | Mondokan | 09:46 | 09:47 | 09:55 | 9 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Siti Nik Iswati Dan Rahmad Jumawan | 02 | 03 | Mondokan | Rp. 15.000.000,.00 | Kronologi Kejadian Pada Saat Pemilik (Abdus Syukur Keluar Rumah Untuk Bersih Bersih Makam Di Tileng Kec. Merakurak, Muncul Kepulan Asap Di Ruang Tengah (Kamar). Anak Nya Yang Bertempat Tinggal Di Belakang Rumah Mengetahui Kejadian Tersebut Dan Mencoba Untuk Mencari Tahu Sumber Asap. Kemudian Sumber Berada Di Ruang Kamar Yang Terkunci, Kemudian Setelah Di Dobrak Area Kasur Sudah Terbakar, Pelapor (Anaknya Bpk.Abdus Syukur) Mencoba Memadamkan Dengan Aliran Selang Desel Sawah. Sembari Menghubungi Tim Damkar Yang Berada Di Mako Tuban. |
| 4 | 12 February 2025 | Plumpang | Kepohagung | 12:41 | 12:43 | 12:51 | 10 menit | Tempat Usaha | Oknum yang tidak bertanggungjawab/Masih dalam penyelidikan | Okta Andik Priyangga | 03 | 012 | Jalan Raya Plumpang | 2 juta | Api Berasal Dari Tumpukan Serbuk Yang Menempel Di Tungku Pembakaran |
| 5 | 17 February 2025 | Semanding | Gedongombo | 09:50 | 09:52 | 10:02 | 12 menit | Lahan Kosong | Oknum yang tidak bertanggungjawab/Masih dalam penyelidikan | Wahyudi | 03 | 09 | Kiring | Nihil | Setelah Pelapor Keluar Untuk Mengecek Barang Dan Lahan Sekitar Di Temukan Kepulan Asap Di Area Tebing Di Depan Gudang, Warga Setempat Dan Pihak Karyawan Udang Mencoba Untuk Memadamkan Dengan Alat Seadanya Tapi Api Tak Kunjung Padam Dan Terkena Hempasan Angin Sehingga Merembet. Kemudian Pihak Pelapor Melaporkan Kejadian Tersebut Ke Tim Damkar Mako Tuban. |
| 6 | 20 February 2025 | Semanding | Gedongombo | 15:09 | 15:11 | 15:17 | 8 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Alfrida Sharon | 02 | 06 | Kel Kebonsari | -/+ 10.000.000 | Diduga Api Berasal Dari Konsleting Kabel Yg Berada Dikamar Mandi , Terjadi Percikan Api Dan Sempat Ada Bunyi Ledakan. Api Langsung Membesar Dan Membakar Warung , Penghuni Warung Langsung Menghubungi Petugas Damkar Dan Tim Langsung Datang Melakukkan Pemadaman Dan Pembasahan. |
| 7 | 26 February 2025 | Palang | Gesikharjo | 11:32 | 11:35 | 11:42 | 10 menit | Pemukiman | Bediang/sisa pembakaran | Ibu Surati | 01 | 02 | Dusun Rembes | Nihil | |
| 8 | 04 March 2025 | Merakurak | Tuwiri Kulon | 17:18 | 17:18 | 17:28 | 10 menit | Pemukiman | Kelalaian | Tarnoji | 004 | 006 | Tegalmojo | Rp. 30.000.000,.00 | Kronologi Sebelum Kejadian, Pelapor Setelah Memasak Di Tungku Kemudian Di Tinggal Ke Sawah. Selang Beberapa Saat Merembet Ke Area Sekitar. Setelah Pemadaman Selesai Tim Melakukan Mitigasi Dan Pengecekan Area Sebelum Meninggalkan Lokasi, Sambil Menghimbau Agar Kejadian Serupa Tidak Terjadi Di Kemudian Hari. |
| 9 | 15 March 2025 | Palang | Cendoro | 10:56 | 10:57 | 11:04 | 8 menit | Pemukiman | LPG | Ilham Fatqul Safiq | 06 | 05 | Cendoro Selatan | 10.000.000,.00 | Kronologi Sebelum Kejadian, Pada Saat Sedang Memasak Di Dapur Pemilik Rumah Sedang Mengisi Pertalite Eceran Dari Jirigen Ke Botol Kecil Untuk Di Jual Eceran. Namun Selang Beberapa Saat Tiba Tiba Api Menyambar Dari Uap Bensin Ke Nyala Kompor Pada Radius -/+2M. Setelahnya Warga Setempat Bahu Membahu Memadamkan Dengan Peralatan Seadanya Sambil Menunggu Tim Damkar Mako Tuban Datang. Api Berhasil Di Padamkan Dan Tidak Sampai Merembet Setelah Tim Datang. Setelah Pemadaman Selesai Tim Melakukan Mitigasi Dan Pengecekan Area Sebelum Meninggalkan Lokasi, Sambil Menghimbau Agar Kejadian Serupa Tidak Terjadi Di Kemudian Hari. |
| 10 | 15 March 2025 | Tambakboyo | Glondonggede | 22:22 | 22:25 | 22:42 | 20 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Alaudin Nur Rosyid | 004 | 001 | Glondong | -/+ Rp. 5 000.000,.00 | Pada Saat Warga Sekitar Lewat Di Sekitar Pasar Muncul Percikan Api Dari Instalasi Listrik Dan Menyambar 2 Kios Yang Ahirnya Membakar 2 Kios Tersebut. Dan Warga Setempat Menghubungi Damkar Sbi Karena Terdekat Disusul Tim Mako Damkar Tuban Ke Lokasi. Api Bisa Di Padam Kan 1 Jam Setelah Tim Datang. |
| 11 | 17 March 2025 | Grabagan | Gesikan | 01:45 | 01:46 | 02:00 | 15 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Ita Fatmawati | 02 | 06 | Gesikan | Rp. 60.000.000,- | Pada Pukul 01.45 Tim Piket Pemadam Kebakaran Dari Warga Bahwa Ada Kebakaran Rumah Di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Kemudian Tim Piket Pos Rengel Dibantu Tim Piket Mako Mendatangi Lokasi Dan Melakukan Pemadaman Dilanjutkan Pembasahan, Kebakaran Diduga Disebabkan Kongsleting Listrik. Dokumen Lain Terlampir. |
| 12 | 18 March 2025 | Palang | Sumurgung | 21:19 | 21:20 | 21:28 | 9 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Kades Sumurgung | - | - | Sawah | ±30jt | Piket Mako Damkar Menerima Laporan Dari Kades Sumurgung Bahwa Ada Kebakaran Toko Bangunan. Piket Mako Damkar Menuju Lokasi Melakukan Mitigasi Dan Memastikan Tidak Ada Titik Api |
| 13 | 28 March 2025 | Jatirogo | Sadang | 00:28 | 00:30 | 00:39 | 11 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Suratno | 001 | 002 | Sadang | 45.000.000,- | Pada Hari Jumat Tgl 28 Maret 2025. Sekitar Pukul 00.20 Tetangga Pemilik Rumah Mencium Bau Kebakaran Yg Sangat Menyengat,Setika Itu Tetangga Korban Langsung Keluar Rumah Saat Sudah Diluar Langsung Kepulan Api Sudah Membakar Rumah Yg Ada Disamping Rumahnya Seketika Langsung Teriak Meminta Tolong Warga Sekitar Langsung Berkeliaran Mencoba Memadamkan Api Dengan Alat Seadanya. Karena Merasa Api Semakin Besar Langsung Menghubungi Tim Pemadam Kebakaran Jatirogo. |
| 14 | 30 March 2025 | Rengel | Rengel | 20:22 | 20:22 | 20:26 | 4 menit | Lainnya | Korsleting Listrik | Dimas Sugiarta | 04 | 06 | Purboyo Mayang Sekar | 10.000.000 | |
| 15 | 04 April 2025 | Jatirogo | Kebonharjo | 06:39 | 06:42 | 06:47 | 8 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Suntini | 03 | 02 | | Rp 40.000.000 | Api Berasal Dari Konsleting Listrik Yang Mengeluarkan Percikan Api Dan Menyambar Benda Sekitar Yang Terbuat Kayu ( Bahan Mudah Terbakar ) |
| 16 | 09 April 2025 | Tuban | Kelurahan Karangsari | 16:10 | 16:12 | 16:18 | 8 menit | Mobil | Korsleting Listrik | Ari Tohar | | | | -/+ 70.000.000 | Ketika Sedang Mengendarai Mobil Terdengar Suara Ledakan Dan Pemilik Mobil Turun. Kemudian Muncul Asap Dan Api Dari Bagian Kap Depan Mobil. |
| 17 | 12 April 2025 | Tuban | Latsari | 18:34 | 18:36 | 18:45 | 11 menit | Lainnya | Korsleting Listrik | Yeyen Budi Agung Suweknyo | | | | belum bisa dipastikan | Karyawan Hit Chiken Melihat Kepulan Asap Dan Percikan Api Dari Travo Menjalar Ke Ijuk Ulir (Penghalang Hewan ) Kemudian Api Membesar |

| NO | HARI/ TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | | LAPORAN DITERIMA (WIB) | MENUJU LOKASI (WIB) | TIBA DILOKASI (WIB) | WAKTU TEMPUH (DALAM MENIT) | JENIS KEBAKARAN | DUGAAN PENYEBAB KEBAKARAN | DATA PELAPOR | | | | TAKSIRAN KERUGIAN (Rp) | KRONOLOGI KEJADIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KECAMATAN | DESA/KEL | | | | | | | NAMA | ALAMAT | | | | |
| | | | | | | | | | | | RT | RW | DUSUN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 18 | 17 April 2025 | Parengan, Soko | Pandanwangi | 18:11 | 18:12 | 18:26 | 15 menit | Pemukiman | LPG | Moch Zainal Muksin (Perangkat Desa) / Eko Yulianto | 003 | 001 | Padas | (±) Rp. 2.000.000 | Kebocoran Selang Lpg |
| 19 | 20 April 2025 | Rengel | Kebonagung | 16:08 | 16:08 | 16:18 | 10 menit | Kandang | Bediang/sisa pembakaran | Ruswinardi | 02 | 04 | Prumbon | 3.000.000,- | |
| 20 | 21 April 2025 | Tuban | Kingking | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 7 menit | Lainnya | Korsleting Listrik | Brian Dwi Pradita | 005 | 005 | Perum Karang Indah | - | Infomasi Kronologi Dari Pelapor Habis Kontrol Dari Apotek Mahkota Melihat Kepulan Asap Dan Percikan Api Menjalar Tiang Listrik Ke Konektor Sambunagn Kabel Tegangan Tingi Kemudian Api Membesar Kemudian Pelapor Menghubungi Pos Mako Damkar Tuban. |
| 21 | 23 April 2025 | Soko | Sumurcinde | 21:33 | 21:35 | 21:43 | 10 menit | Pemukiman | Bediang/sisa pembakaran | Sarmi | 03 | 07 | Maner | Rp. 10.000.000 | Api Berasal Dari Tungku / Pawon Yang Digunakan Memasak Kemudian Ditinggal Tidur |
| 22 | 01 May 2025 | Tuban | Keurahan Sidorejo | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 5 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Andre | | | | Kerugian -/+ 27.000.000 | Sebab:Diduga Api Berasal Dari Konsleting Kabel Yg Berada Dikamar Tidur , Terjadi Percikan Api Dan Sempat Ada Bunyi Ledakan. Api Langsung Membesar Dan Membakar Seisi Kamar , Penghuni Rumah Langsung Menghubungi Petugas Damkar Dan Tim Langsung Datang Melakukkan Pemadaman Dan Pembasahan. |
| 23 | 21 May 2025 | Tambakboyo | Tambakboyo | 18:02 | 18:05 | 18:26 | 24 menit | Lahan Kosong | Oknum yang tidak bertanggungjawab/Masih dalam penyelidikan | Lilik Koestijono | 01 | 01 | Karangtawang | - | Kronologi Awalmula Asap Masuk Ke Rumah Makan Dan Pemilik Warung Langsung Mengecek Halaman Belakang Dan Ada Titik Api Di Lahan Kosong Milik Pemdes Kemudian Lapor Perangkat Desa Dan Diteruskan Ke Petugas Damkar |
| 24 | 14 July 2025 | Tuban | Kebonsari | 14:25 | 14:26 | 14:30 | 5 menit | Pemukiman | LPG | Ibu Mariska Paguh | 02 | 03 | Kebonsari Gg 5 | Kurang lebih 65.000.000 | Sebab/Kronologi:Ada Salah Satu Karyawan Yg Sdg Merebus Air, Selang Beberapa Saat, Korban (Afandi, 31 Th/ Karyawan) Mengisi/ _Refill_ Gas Portable Dekat Dengan Kompor Yg Masih Menyala (Seketika Api Menyambar Refill Gas Dan Korban Terpental, Dan Diamankan Rekan Kerja, Api Menyambar Material Disebelahnya, Termasuk 1 Unit Sepeda Motor Vixion Dan Terdengar Beberapa Kali Ledakan Dari Tkk( Tempat Kejadian Perkara) Dan Membakar 2 Kamar Dan Ruangan Kosong, Penghuni Rumah Langsung Menghubungi Tim Damkar Mako Tuban Dan Tim Langsung Datang Melakukkan Pemadaman Dan Pembasahan. |
| 25 | 21 July 2025 | Montong | Sumurgung | 10:35 | 10:35 | 10:45 | 10 menit | Pemukiman | Kelalaian | Pambudi Perangkat Desa / Tosan Korban | 009 | 002 | Beyan | Rp 87.000.000 | Diduga Karena Obat Nyamuk Menjalar Ke Tempat Tidur |
| 26 | 23 July 2025 | Jenu | Sugihwaras | 07:45 | 07:46 | 07:50 | 5 menit | Lahan Kosong | Oknum yang tidak bertanggungjawab/Masih dalam penyelidikan | Drs. Chusnul Yakin | | | Jl.Karangrejo | Nihil | Pada Hari Minggu 20 Juli Warga Kerja Bakti Di Sekitar Lahan Kosong Dan Membuang Rumput Hasil Kerja Bakti Di Pingir Jalan Samping Lahan Dan Pada Hari Rabu 23 Juli Ada Orang Tidak Dikenal Lewat Dan Membuang Putung Rokok Yang Masih Menyala Di Rumput Kering Bekas Kerjabakti Kemudian Terbakar Dan Menyambar Alang-Alang Demikian Untuk Menjadikan Periksa |
| 27 | 24 July 2025 | Semanding | Karang | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 5 menit | Tempat Usaha | Kelalaian | Taridjo | 003 | 004 | Krajan | 35.000.000. | Kantor Satpol Pp Dan Pemadam Kebakaran Tuban Pos Mako Menerima Laporan Dari *Taridjo* Ada Kebakaran Gudang Barang Bekas Atau Rosokan.Sebelumnya Pelapor Dan Warga Sekitar Berupaya Memadamkan Api Dengan Alat Seadanya. • Selanjutnya Yang Bersangkutan Meminta Bantuan Ke Satuan Pol Pp Dan Damkar Untuk Di Lakukan Pemadaman. Upaya Yang Dilakuakan Tim Damkar Pos Mako Mendatangi Lokasi Dan Melakuakan Pemadaman Dan Pembasahan Dengan Mengunakan 2 Armada Mobil Pemadam Kebakaran. |
| 28 | 01 August 2025 | Soko | Prambontergayang | 14:46 | 14:48 | 15:00 | 14 menit | Lahan Kosong | Bediang/sisa pembakaran | Bapak Suparji | 005 | 008 | Jalin | Nihil | Warga Yang Membakar Sampah Kemudian Menjalar Ke Pohon Bambu |
| 29 | 02 August 2025 | Parengan | Sembung | 12:00 | 12:00 | 12:15 | 15 menit | Lahan Kosong | Bediang/sisa pembakaran | Eko Sulistiyono | 01 | 04 | Wirun | Rp - | Api Berasal Dari Pembakaran Sampah Di Samping Lahan Tebu |
| 30 | 03 August 2025 | Singgahan | Tingkis | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 4 menit | Lainnya | Bediang/sisa pembakaran | Didik | 001 | 002 | Panglima Sudirman | Nihil | Diduga Ada Warga Membakar Sampah Di Bawah Pohon Sehingga Api Menjalar Ke Pohon Yang Berpotensi Membakar Kabel Pln |
| 31 | 11 August 2025 | Soko | Sokosari | 18:45 | 18:45 | 18:56 | 11 menit | Lainnya | Kelalaian | Padnadi | 003 | 003 | Sumurcinde | - | Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025 Sekitar Pukul 18.45 Wib Pos Pemadam Kebakaran Pos Rengel Menerima Laporan Permohonan Pemadaman Kebakaran Pohon Sloben Di Area Makam Desa Sumurcinde Kec. Soko Kab. Tuban |
| 32 | 15 August 2025 | Semanding | Prunggahan Wetan | 16:22 | 16:24 | 16:32 | 10 menit | Lainnya | Kelalaian | Dwi Putri Novieani | 03 | 05 | Sendangharjo Gg 3 | -/+ 500.000 | Diduga Api Berasal Dari Warga Yang Membakar Rumput Kering Disekitar Rumpun Bambu Dan Ditinggal Kemudian Menjalar Ke Rumpun Bambu Didekatnya. Api Langsung Membesar Dan Membakar Area Banbu, Warga Sekitar Yang Sedang Melintas Mengetahui Dan Langsung Menghubungi Petugas Damkar Dan Tim Langsung Datang Melakukkan Pemadaman Dan Pembasahan. |
| 33 | 17 August 2025 | Montong | Guwoterus | 08:21 | 08:22 | 08:30 | 9 menit | Pemukiman | LPG | Trimulyo | 07 | 02 | Jaten | ± 200 juta | Diduga Gas Elpiji Bocor Menyambar Ke Tungku Tradisional Serta Tumpukan Tinner Kemudian Pemilik Menyiram Dengan Air Dan Api Semakin Besar Merembet Ke Barang Yang Mudah Terbakar |
| 34 | 19 August 2025 | Semanding | Gedongombo | 20:20 | 20:21 | 20:26 | 6 menit | Lainnya | Korsleting Listrik | Edi Sulistono | 01 | 01 | | Masih belum bisa memastikan | Info Dari Pelapor Atau Warga Setempat Melihat Kepulan Asap Dan Percikan Api Menjalar Tiang Listrik Sambungan Kabel Tegangan Tinggi Dan Menetes Ke Kabel Optik Kemudian Api Membesar Selanjutnya Pelapor Menghubungi Pos Mako Damkar Tuban |
| 35 | 21 August 2025 | Semanding | Bektiharjo | 22:13 | 22:14 | 22:22 | 9 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Warsono | | | Krajan | - | Dugaan Sementara Konsleting Arus Listrik (Arus Pendek)Muncul Percikan Dari Listrik Yang Menyambar Ke Tumpukan Karton Telur Dan Genset. Selanjutnya Pelapor Menghubungi Pos Mako Damkar Tuban |
| 36 | 22 August 2025 | Widang | Desa Minohorejo | 12:02 | 12:04 | 12:18 | 16 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Totok Subiantoro | | | Dusun Pandan | Rp.700.000.000 | |
| 37 | 23 August 2025 | Jenu | Temaji | 23:03 | 23:05 | 23:15 | 12 menit | Kandang | Bediang/sisa pembakaran | Pelapor. M. Galih Dan Pemilik. Bpk Tamin | 03 | 03 | Temaji | Rp. 30.000.000 | Awal Mula Menurut Laporan Pelapor (M. Galih) Pada Saat Hendak Memancing Tiba Tiba Ada Kepulan Asap Disertai Api, Yang Kemudian Di Laporkan Kejadian Tersebut Ke Pemilik (Tamin). Dan Tim Mako Pun Meluncur Ke Lokasi Setelah Di Hubungi Dengan Membawa 2 Armada |
| 38 | 26 August 2025 | Plumpang | Desa Ngrayung | 12:38 | 12:41 | 12:54 | 16 menit | Lahan Kosong | Bediang/sisa pembakaran | Toni Agus Setiawan | | | | Rp 1.800.000,00 | |

| NO | HARI/ TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | | LAPORAN DITERIMA (WIB) | MENUJU LOKASI (WIB) | TIBA DILOKASI (WIB) | WAKTU TEMPUH (DALAM MENIT) | JENIS KEBAKARAN | DUGAAN PENYEBAB KEBAKARAN | DATA PELAPOR | | | | TAKSIRAN KERUGIAN (Rp) | KRONOLOGI KEJADIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KECAMATAN | DESA/KEL | | | | | | | NAMA | ALAMAT | | | | |
| | | | | | | | | | | | RT | RW | DUSUN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 39 | 27 August 2025 | Semanding | Perunggahan Kulo | 15:48 | 15:49 | 15:55 | 7 menit | Kandang | Bediang/sisa pembakaran | Wahyuni Suliana Se. | 003 | 007 | Krajan | ±Rp. 5. 000.000 (Pakan ternak kering dan bangunan belakang) | Kronologi : Tetangga Saat Keluar Rumah Melihat Kepulan Asap Dari Belakang Gudang, Lalu Berteriak Ke Tetangga Lainnya, Lalu Pintu Gudang Di Dobrak Oleh Pak Rw Akhirnya Api Di Padamkan Dengan Alat Seadanya Dan Lalu Damkar Datang Dan Api Dan Asap Di Netralisir |
| 40 | 28 August 2025 | Rengel | Pekuwon | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 10 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Sunardi | 001 | 001 | Pekuwon | (±) Rp. 20. 000.000,- | Pada Tanggal 29 Agustus 2025 Pukul 08.30 Wib Tim Pos Damkar Rengel Menerima Laporan Warung Makan Milik Bpk. H. Samani Yg Di Sewa Oleh Sdr. Fauzi Di Dsn. Pekuwon Rt.001/Rw.001, Desa. Pekuwon Kec. Rengel Kab. Tuban, Tim Damkar Pos Rengel Langsung Mendatangi Tkk Dan Melakukan Pemadaman Pukul 08.40 Wib ,Api Pokok Padam Pada Pukul 09.00 Wib. Dilanjutkan Dengan Pembasahan Sampai Dengan Pukul 09.25 Wib . Keterangan: Penyebab Kebakaran: Diduga Konseliting Listrik |
| 41 | 01 September 2025 | Tuban | Sumurgung | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 8 menit | Lainnya | Oknum yang tidak bertanggungjawab/Masih dalam penyelidikan | M Suhud Candra | 04 | 01 | Bongkol | - | Diduga Api Berasal Dari Warga Yang Membakar Rumput Kering Setelah Kerjabhakti Disekitar Pohon Dan Ditinggal Kemudian Menjalar Ke Pohon Didekatnya. Api Langsung Membesar Dan Membakar Pohon Kering , Warga Sekitar Yang Mengetahui Dan Langsung Menghubungi Petugas Damkar Personil Datang Langsung Melakukkan Pemadaman Dan Pembasahan Sekaligus Melokalisir Area Agar Tidak Menjalar Ke Area Makam. |
| 42 | 03 September 2025 | Montong | Pucangan Perbatasan Pongpongan | 22:16 | 22:17 | 22:37 | 21 menit | Hutan | Oknum yang tidak bertanggungjawab/Masih dalam penyelidikan | Edi Heriyanto | 01 | 02 | Jalan Raya Merakurak - Montong | Nihil | Api Membakar Pohon Jati Situs Jati Gembol Desa Pucangan Montong |
| 43 | 06 September 2025 | Rengel | Karangtinoto | 19:02 | 19:02 | 19:12 | 10 menit | Lainnya | Kelalaian | Anggun Sulistiyowati | 002 | 001 | Sambungrejo | Nihil | Warga Membakar Sampah Merembet Ke Pohon Bambu |
| 44 | 09 September 2025 | Tuban | Sumurgung | 21:54 | 21:56 | 22:02 | 8 menit | Kandang | Bediang/sisa pembakaran | Kacung Irwanto | 04 | 04 | Sumurgung | Rp. 3.000.000,.00 | Menurut Keterangan Pelapor Terdapat Kepulan Asap Di Sekitar Tumpukan Pakan Sapi (Jerami Kering) Di Samping Rumah. Kemudian Disusul Hembusan Angin Kencang Sehingga Merembet Ke Tumpukan Pakan Jerami Kering Yang Lain. Setelah Tim Datang Dan Melakukan Pemadaman Dugaan Penyebab Adalah Bedian Atau Sisa Pembakaran Sampah Yang Bara Apinya Merembet Ke Tumpukan Jerami |
| 45 | 10 September 2025 | Merakurak | Temandang | 08:53 | 08:55 | 09:10 | 17 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Darmadi | 03 | 01 | Tlogoagung | Rp 10.000.000,00 | Ketika Tim Damkar Datang Api Sudah Dipadamkan Oleh Tim Dari Sig Dan Tim Damkar Melakukan Pembasahan, Dugaan Awal Api Berasal Dari Konsleting Listrik Pada Lemari Pendingin. |
| 46 | 10 September 2025 | Palang | Kradenan | 14:38 | 14:40 | 14:48 | 10 menit | Pemukiman | Bediang/sisa pembakaran | Misnan Riyadi | | | Karangrejo | 1.000.000.00 | Saat Memanggang Ikan Api Menyambar Ke Kayu Dan Api Membesar Dan Pemilik Rumah Lagsung Melaporkan Ke Damkar Pos Mako Untuk Meminta Bantuan Pemadaman . |
| 47 | 10 September 2025 | Rengel | Pekuwon | 04:50 | 04:51 | 05:00 | 10 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Kasdari ( Putra Korban ) | 012 | 003 | Pekuwon | (±) Rp. 90.000.000,- | Pada Tanggal 10 September 2025 Pukul 04.50 Wib Tim Pos Damkar Rengel Menerima Laporan Kebakaran Rumah Kosong Milik Ibu. Kamsirah Yg Di Fungsikan Untuk Garasi Motor Dan Perabotan Rumah Tangga Yang Beralamatkan Di Dsn. Pekuwon Rt.012/Rw.003, Desa. Pekuwon Kec. Rengel Kab. Tuban, Tim Damkar Pos Rengel Langsung Mendatangi Tkk Dan Melakukan Pemadaman ,Api Pokok Padam Pada Pukul 05.20 Wib. Dilanjutkan Dengan Pembasahan Sampai Dengan Pukul 06.04 Wib . Keterangan: Penyebab Kebakaran: Diduga Konseliting Listrik. |
| 48 | 20 September 2025 | Jatirogo | Sekaran | 11:33 | 11:34 | 11:45 | 12 menit | Pemukiman | LPG | Sukemi | 03 | 04 | Dusun Babagan | Rp 100.000,00 | Tim Mendatangi Lokasi Dan Langsung Mengevakuasi Tabung Elpiji Yang Terbakar Tersebut, Serta Memastikan Lokasi Sudah Aman. Demikian Untuk Menjadikan Periksa🙏🙏 Satpol Pp Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Jl. Ra. Kartini Kutorejo Kec.Tuban Kab.Tuban Jawa Timur 62311 |
| 49 | 20 September 2025 | Montong | Pucangan | 14:42 | 14:45 | 14:55 | 13 menit | Kandang | Bediang/sisa pembakaran | Sakur | 02 | 03 | | Rp 8.400.000,00 | Membakar Sampah Di Sebelah Kandang, Tanpa Disadari Menjalar Ke Kandang |
| 50 | 24 September 2025 | Jenu | Sugihwaras | 17:25 | 17:27 | 17:39 | 14 menit | Lahan Kosong | Kelalaian | Ruslan | 01 | 05 | Jembel | - | Diduga Seseorang Warga Membakar Sampah Yang Kemudian Ditinggalkan, Api Merembet Kelahan Kosong Yang Dipenuhi Alang" Dan Api Cepat Membesar. Kemudian Perangkat Desa Menghubungi Callcenter Damkar Untuk Meminta Bantuan Pemadaman . 1 Unit Fire Truk Langsung Datang Kelokasi Untuk Melakukan Pemadaman Sekaligus Pembasahan |
| 51 | 27 September 2025 | Tuban | Sidorejo | 10:48 | 10:49 | 10:53 | 5 menit | Pemukiman | Bediang/sisa pembakaran | Novies Eka Prayuda | 005 | 005 | Jl Dr Wahidi Sudiro Husodo | - | Menurut Keterangan Pelapor Bpk ( Novie Guru Smada) Tempat Pembuangan Akhir (Bank Sampah) Terbakar Menjalar Ke Asbes Samping Bank Sampah. Yang Di Situ Terdapat Jirigen Dan Plastik Botol Aqua Sehingga Menjalar Ke Asbes Sampai Di Samping Tembok Smp 7 Di Takutkan Menjalar Ke Sekolah Smp 7.Pelapor Selanjutnya Menghubungi Petugas Damkar Dan Tim Langsung Datang Melakukan Pemadaman Dan Pembasahan. |
| 52 | 01 October 2025 | Parengan | Brangkal | 20:15 | 20:16 | 20:31 | 16 menit | Lainnya | Korsleting Listrik | Yulianti Niswati | 001 | 003 | Brangkal | Nihil | Sebab Diduga Kabel Lecet |
| 53 | 02 October 2025 | Semanding | Karang | 16:13 | 16:13 | 16:19 | 6 menit | Lahan Kosong | Kelalaian | Pipiet Wibawanto | 011 | 05 | Karang Indah Timur | _ | Diduga Oknum Tidak Bertanggung Jawab Membakar Sampah Dan Ditinggalkan ,Api Membesar Dan Merembet Ke Tumpukan Sampah Kemudian Warga Sekitar Menghubungi Damkar Untuk Meminta Bantuan Pemadaman, Pos Mako Berangkat Dengan 2 Armada Dan 7 Personil |
| 54 | 03 October 2025 | Jatirogo | Demit | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10 menit | Lainnya | Kelalaian | Bu Parwati Dan Mbah Sukirah | 02 | 03 | Blimbing | ±Rp. 200.000.000,00 | |
| 55 | 03 October 2025 | Tuban | Sukolilo | 18:52 | 18:53 | 18:57 | 5 menit | Lainnya | Korsleting Listrik | Fitri | 04 | 03 | Sukolilo Gang 7 | Belum diketahui | Personil Damkar Tiba Dilokasi Langsung Melakukkan Pemadaman Dengan Menggunakan Apar , Personel Juga Melokalisir Area Yg Terpercik Api Dan Dipastikan Aman Sebelum Personel Kembali Ke Pos Mako. Demikian Untuk Menjadi Periksa. Satpol Pp Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Jl. Ra. Kartini Kutorejo Kec.Tuban Kab.Tuban Jawa Timur 62311 |
| 56 | 07 October 2025 | Kerek | Jerorejo | 01:44 | 01:46 | 02:16 | 32 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Bapak Edi Suhermanto Koramil Kerek | | | | Rp 500.000.000 | Tim Damkar Pos Mako Mendapat Laporan Dari Pak Edi Koramil Kerek Bahwa Ada Kepulan Asap Dan Nyala Api Di Toko Indomaret Kemudian Tim Bergegas Bersiap Menuju Lokasi Dan Melakukan Pemadaman |
| 57 | 09 October 2025 | Senori | Medalem | 01:11 | 01:12 | 01:30 | 19 menit | Kandang | Bediang/sisa pembakaran | Fitria Nur Kumala | 007 | 001 | Sunan Kalijaga | Rp 10.000.000 | Api Berasal Dari Sisa Pembakaran Sampah Yang Kemudian Menyambar Ke Tumpukan Jerami |

| NO | HARI/ TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | | LAPORAN DITERIMA (WIB) | MENUJU LOKASI (WIB) | TIBA DILOKASI (WIB) | WAKTU TEMPUH (DALAM MENIT) | JENIS KEBAKARAN | DUGAAN PENYEBAB KEBAKARAN | DATA PELAPOR | | | | TAKSIRAN KERUGIAN (Rp) | KRONOLOGI KEJADIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KECAMATAN | DESA/KEL | | | | | | | NAMA | ALAMAT | | | | |
| | | | | | | | | | | | RT | RW | DUSUN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 58 | 11 October 2025 | Widang | Desa Mrutuk | 07:04 | 07:05 | 07:20 | 16 menit | Pemukiman | Kelalaian | Budiono | 003 | 005 | Cambor | RP 15.000.000,00 | Mengisi Bbm Jenis Pertalite Dan Sedang Menyalakan Kompor |
| 59 | 09 October 2025 | Semanding | Gedongombo | 07:41 | 07:43 | 07:51 | 10 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Nanang | 012 | 015 | Kiring | -/+ 5000.000 | Kebakaran Diduga Berasal Dari Korsleting Listrik Pada Kipas Angin. Api Pokok Dipadamkan Pemilik Rumah Dengan Menggunakan Apar. Demikian Untuk Menjadi Periksa. Satpol Pp Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Jl. Ra. Kartini Kutorejo Kec.Tuban Kab.Tuban Jawa Timur 62311 |
| 60 | 16 October 2025 | Merakurak | Sambungrejo | 15:00 | 15:02 | 15:15 | 15 menit | Lainnya | Bediang/sisa pembakaran | Ibu Nurul Afifah | 01 | 01 | Semampir | Nihil | Malam Ketika Selesai Giat Bersih Bersih Makam, Warga Setempat Membakar Sampah Daun Kering Di Sekitar Makam Mbah Boka Baki. Namun Setelah Di Tinggal Dan Dirasa Sudah Padam Bara Muncul Kembali Di Pagi Hari Dan Membakar Area Akar Pohon Besar Dan Menjalar Sampai Siang Hari Muncul Asap Hitam Dan Terbakar Bagian Dalam. Karena Agak Tinggi Warga Sekitar Sulit Memadamkan Sehingga Menghubungi Tim Damkar Tuban. Setelah Bolak Balik Mengisi Air Tangki Di Sumber Air Desa (Toren). Api Berhasil Di Padamkan -/+ 3 Jam Kemudian D |
| 61 | 24 October 2025 | Tuban | Kutorejo | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 3 menit | Tempat Usaha | Korsleting Listrik | Rofenti,Drh | 003 | 003 | Kutorejo | ± belum bisa di pastikan | Laporan Awal Dari Pelapor Konsleting Listrik Tim Sampek Lokasi Api Sudah Membesar Dan Membakar Tumpukan Patung Manakin Dan Lemari Kayu Gantung. Warga Sekitar Yang Mengetahui Langsung Datang Ke Pos Mako Petugas Damkar Dan Tim Langsung Datang Penaganan Awal Mengunakan Alat Pemadam Api Ringan Dan 1 Unit Mobil Damkar |
| 62 | 25 October 2025 | Rengel | Rengel | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 2 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Sigit Ari Wijaya | 003 | 001 | Jln. Ahmad Yani No. 04 | Rp 30.000.000 | Terjadi Korsleting Listrik Pada Kulkas Di Area Dapur |
| 63 | 22 October 2025 | Senori | Sidoharjo | 09:50 | 09:55 | 10:04 | 14 menit | Tempat Usaha | Kelalaian | Ahmad Nurul Huda | 03 | 06 | Mulyoagung | Rp 188.000.000 | Ampas Bleacing Eart Baru Diturunkan Dari Dump Truck Terkena Percikan Bunga Api Yang Keluar Dari Knalpot Dump Truck |
| 64 | 02 November 2025 | Merakurak | Sambonggede | 23:34 | 23:36 | 23:44 | 10 menit | Tempat Usaha | Kelalaian | Darmanto | 02 | 01 | Krajan (Selatan Pasar Merakurak) | -/+ Rp 15.000.000.,00 | Menurut Keterangan Pelapor Menghangatkan Sayur Lupa Di Matikan (Kompornya) Dari Habis Isya(-/+ Pukul 20.00) Yang Merembet Ke Area Dapur. Tim Kelokasi Dan Melakukan Pemadaman Dan Pembasahan Di Bantu Warga Dan Perangkat Desa Serta Redkar Setempat. Dari Polsek Merakurak Datang Dengan 3 Personil. Api Tidak Sampai Merembet Ke Bangunan Sekitar. |
| 65 | 05 December 2025 | Soko | Mojoagung | 18:31 | 18:32 | 18:43 | 12 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Sudarsono | 001 | 004 | Sambungrejo | Nihil | Pos Pemadam Rengel Menerima Laporan Dari Bapak Sudarsono Bahwa Meteran Rumahnya Terbakar/Konslet |
| 66 | 24 December 2025 | Senori | Banyuurip | 10:00 | 10:01 | 10:30 | 30 menit | Pemukiman | Korsleting Listrik | Bejo | 04 | 01 | Banyuurip | 50jt | Kebakaran Di Duga Karena Listrik Konslet |

**Keterangan :**

Highlight Kuning = Respon Time Tidak Terpenuhi

**Persentase Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time**

Jumlah Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time / Jumlah Keseluruhan Kasus/Kejadian Kebakaran x 100%

$$\frac{55}{66}\ x\ 100\% = 83,33\ \%$$

Mengetahui,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tuban

**JISWANTO, SH., MM.**
Pembina
NIP. 19690303 199003 1 007

# SERTIFIKAT

**Nomor : 030.023/Sert/PT.CSI/XI/2025**

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
## KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

| NILAI IKM | RESPONDEN |
|---|---|
| **89,12**<br>**(Sangat Baik)** | **46 Orang**<br>**Jenis Kelamin**<br>Laki-Laki : 32 orang<br>Perempuan : 14 orang<br>**Pendidikan**<br>SD/Sederajat : 0 orang<br>SMP/Sederajat : 0 orang<br>SMA/Sederajat : 31 orang<br>D1/D2/D3 : 4 orang<br>D4/S1 : 8 orang<br>S2 : 3 orang<br>S3 : 0 orang<br>**Periode Survei :**<br>**08 September - 03 Oktober 2025** |

**Surabaya, 10 November 2025**

**Lussi Agustin, S.Stat., M.KP.**
Direktur Utama

# KERTAS KERJA REVIU LKjIP TAHUN 2025

**NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TUBAN**

**TANGGAL REVIU: 26 FEBRUARI 2026**

| NO. | URAIAN | | CHECKLIST | CATATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Substansi Laporan** | Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Perangkat Daerah | √ | |
| | | LKj telah menyajikan informasi target kinerja | √ | |
| | | LKj telah menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai | √ | |
| | | Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | √ | |
| | | Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | √ | |
| | | Telah menyajikan akuntablitas keuangan | √ | |
| 2. | **Mekanisme penyusunan** | LKj Perangkat Daerah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu | √ | |
| | | Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai | √ | |
| | | Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | √ | |
| | | Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja | √ | |
| | | Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya | √ | |
| | | Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait | √ | |
| 3. | **Substansi Umum** | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja | √ | |
| | | Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis | √ | |
| | | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra | √ | |
| 4. | **Konsistensi atas Sistematika LKJiP** | | | |
| | **SUBSTANSI BAB I** | | | |

| NO. | URAIAN | | CHECKLIST | CATATAN |
|---|---|---|---|---|
| | **Pendahuluan** | 1.LKj telah menyajikan Latar Belakang | √ | |
| | | 2.LKj telah menyajikan Tugas dan Fungsi dan Organisasi | √ | |
| | | 3. LKj telah menyajikan Aspek Strategis serta Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi | √ | |
| | | 4. LKj telah menyajikan Landasan Hukum | √ | |
| | **SUBSTANSI BAB II** | | | |
| | **Perencanaan Kinerja** | **1.Rencana Strategis Perangkat Daerah** | | |
| | | a. Renstra Tahun 2021-2026 | | |
| | | LKj telah menyajikan visi, misi, sasaran dan IKU yang menjadi dasar PK Tahun 2025 | √ | |
| | | b. Renstra Tahun 2025-2029 | | |
| | | LKj telah menyajikan visi, misi, sasaran dan IKU yang menjadi dasar Review/Perubahan PK Tahun 2025, beserta penjelasan keterkaitan/penyelarasan dengan periode sebelumnya | √ | |
| | | **2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025** | | |
| | | a. LKj telah menyajikan PK Tahun 2025 (perencanaan Awal/Lama) | √ | |
| | | b. LKj telah menyajikan Review/Perubahan PK Tahun 2025 | √ | |
| | | c. LKj telah menyajikan Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025 | √ | |
| | **SUBSTANSI BAB III** | | | |
| | **3.1 Capaian Kinerja Organisasi** | A. LKj telah menyajikan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ***(berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan lama/sebelum perubahan)*** | √ | |
| | | B. LKj telah menyajikan Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi: | | |
| | | 1. LKj telah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini **(Disertai analisis penyebab ketercapaian kinerja)** | √ | |
| | | **2.** LKj telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir **(Disertai analisis tren capaiannya)** | √ | |

| NO. | URAIAN | CHECKLIST | CATATAN |
|---|---|---|---|
| | 3. LKj telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (**Disertai analisis sudah sejauh mana perkembangan capaian kinerja tahun ini menuju ketercapaian target jangka menengah (target akhir renstra)**) | √ | |
| | 4. LKj telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja) **(Disertai penjelasan sudah sejauh mana vapaian kinerja kita dibandingkan dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional)** | √ | |
| | 5. LKj telah menyajikan Analisis kualitas capaian kinerja Sasaran Strategis, yang meliputi: | | |
| | a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja **(Berisi penjelasan dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dari poin 1-4 dan alternatif solusi/penanggulangan yang sudah dilakukan (bisa terkait penggantian strategi atau fokus intervensi). Terutama untuk kinerja yang capaiannya tinggi sekali atau rendah sekali)** | √ | |
| | b. Upaya nyata dan/atau hambatannya atas pencapaian kinerja | √ | |
| | c. Alternatif solusi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) | √ | |
| | d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ | |

| NO. | URAIAN | | CHECKLIST | CATATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | (disertai dengan tingkat efisiensi)<br>**(Berisi penjelasan/analisis terkait upaya2 efisiensi yang telah dilakukan. Misalnya : ada perubahan strategi dalam pelaksanaan (dari rapat luring ke daring, efisiensi perjadin dan dialihkan ke zoom atau kegiatan lain, dll)** | | |
| | | e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja<br>**(Berisi penjelasan/analisis mengenai program/kegiatan mana yang dirasa cukup banyak menunjang efektifitas keberhasilan kinerja. Jelaskan juga Kegiatan yang kurang mendapat respon positif dari masyarakat (karena tidak tepat sasaran atau ada kendala lain)** | √ | |
| | **3.2 Realisasi Anggaran** | LKj telah menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja | √ | |
| | **SUBSTANSI BAB IV** | | | |
| | **Penutup** | Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. | | |
| | | 4.1. Kesimpulan | **Ada** | |
| | | 4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut | **ada** | |

| TIM INSPEKTORAT DAERAH | TIM BAGIAN ORGANISASI | OPD YANG DIREVIU |
|---|---|---|
| 1. Mahfud As Sya`Roni | 1. Fitria Lailatul Jannah | 1. Lia Khasanah, S.Si. |
| 2. Siti Fatimah | | 2. |

**MENGETAHUI**
**IRBAN I**

Novita Anggraeni, S
NIP. 19821116 201504 2 001

**MENGETAHUI**
**Plt. KABAGOR**

Beny Sanjaya, SE
NIP. 197810132002121 008